



PEMERINTAH ACEH

# RENCANA KERJA TAHUN 2022



**DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN ACEH TAHUN 2021**

Jl. P. Nyak Makam No. 24, Kec. Kuta Alam, Kota Banda Aceh

Website: [distanbun.acehprov.go.id/](http://distanbun.acehprov.go.id/)



## DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>i</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Landasan Hukum .....	4
1.3. Maksud dan Tujuan.....	7
1.4. Sistematika Penulisan .....	9
<b>BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT ACEH TAHUN LALU .....</b>	<b>16</b>
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh Tahun 2020 dan Renstra Periode 2017-2022. <i>Tabel T-C.</i> <i>29</i> .....	16
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh. <i>Tabel T-C. 30</i> .....	60
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh.....	64
2.4. Review Terhadap Rencana Awal RKPA Tahun 2022 Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh. <i>Tabel T-C. 31</i> .....	68
<b>BAB III TUJUAN, SASARAN, PERANGKAT ACEH.....</b>	<b>86</b>
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional .....	86
3.2. Tujuan dan Sasaran Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh Tahun 2022 .....	93
<b>BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN .....</b>	<b>108</b>
3.1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022 .....	108
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>111</b>



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang.**

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Sementara itu paralel dengan pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 juga mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) SKPD dan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh sebagai Satuan Kerja Perangkat Aceh yang berperan dalam membangun dibidang Pertanian memerlukan sistem perencanaan secara simultan yang mempertimbangkan faktor kondisi riil wilayah/daerah, anggaran, kemampuan sumber daya manusia dan penguasaan teknologi. Penganggaran dan perencanaan berbasis kinerja diarahkan pada perencanaan yang didasarkan pada pengetahuan, keterampilan, sikap dan kemampuan yang dimiliki oleh SKPA Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh untuk melaksanakan tugas serta pekerjaan percepatan pelaksanaan program/kegiatan Pembangunan Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan secara lebih maju menuju swasembada pangan berkelanjutan. Oleh karena itu Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh menyusun Rencana Kerja (RENJA) Tahun



Anggaran 2022 sebagai bagian dari Rencana Awal Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) Tahun 2022, Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh Tahun 2017-2022 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh (RPJMA) Periode Tahun 2017-2022.

Penyusunan Dokumen Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh tahun 2022 dilakukan dengan beberapa pendekatan perencanaan pembangunan yang meliputi pendekatan teknokratis, partisipatif, politis, *top down*, *bottom-up* dan *money follow program*. Pendekatan teknokratis dilaksanakan dengan metoda dan kerangka berpikir yang merupakan proses keilmuan untuk memperoleh pengetahuan secara sistematis terkait perencanaan pembangunan berdasarkan bukti fisik, data dan informasi yang akurat, serta dapat dipertanggungjawabkan yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Perkebunan. Pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan (*stakeholders*) melalui musrenbang, Pendekatan politis adalah pendekatan perencanaan pembangunan yang berupa kebijakan-kebijakan kepala daerah. Pendekatan perencanaan pembangunan daerah bawah-atas (*bottom-up*) dan atas-bawah (*top-down*), hasilnya akan diselaraskan sehingga tercipta sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah. Sistem penganggaran sebelumnya masih menggunakan sistem *money follow function*, dimana anggaran mengikuti tugas dan fungsi pada kementerian lembaga. Sejak tahun 2017, anggaran Negara harus berorientasi manfaat untuk rakyat dan berorientasi prioritas untuk mencapai tujuan pembangunan nasional, inilah yang disebut *Money Follow Program*, dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip penganggaran.

Melalui pendekatan ini diharapkan :

1. adanya skala prioritas alokasi yang tinggi pada program-program yang memberikan manfaat yang besar kepada masyarakat;



2. program dan kegiatan yang akan didanai lebih tegas dan jelas, sehingga jelas sasaran yang akan dicapai lebih optimal dan teratur;
3. mendorong terciptanya efisiensi melalui koordinasi yang jelas antarprogram dan kegiatan.

Konsep *money follow program* menegaskan perlunya pendekatan penganggaran yang berdasarkan pada bobot program/ kegiatan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh merupakan bagian dari Satuan Kerja Perangkat Aceh yang bertugas melaksanakan sebagian pencapaian **tujuan** dan **sasaran** yang terkandung dalam **Visi Pemerintah Aceh** yaitu **"TERWUJUDNYA ACEH YANG DAMAI DAN SEJAHTERA MELALUI PEMERINTAHAN YANG BERSIH, ADIL DAN MELAYANI"** dalam rangka mencapai sasaran **Misi Pemerintah Aceh**. Terdapat lima misi dari sepuluh misi Pemerintah Aceh yang berkaitan langsung dan tidak langsung dengan Misi ke : 6) Mewujudkan kedaulatan dan ketahanan pangan; 4) Membangun masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing di tingkat nasional dan regional; 8) Membangun dan mengembangkan sentra-sentra produksi, industri dan industri kreatif yang kompetitif; 9) Revitalisasi fungsi perencanaan daerah dengan prinsip *Evidence Based Planning* yang efektif, efisien dan berkelanjutan, dan 10) Pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur terintegrasi, dan lingkungan yang berkelanjutan. Disamping itu Dinas Pertanian dan Perkebunan juga sangat erat kaitannya dengan pencapaian keberhasilan Program **15 Unggulan Aceh Hebat**. Dari 15 Unggulan Aceh Hebat Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh bertugas mendukung suksesnya 15 Unggulan Aceh Hebat antara lain Unggulan Aceh Hebat ke : 03) Aceh Carong; 05) Aceh Meugoe dan Meulaot; 06) Aceh Troe; 07) Aceh Kreatif; 08) Aceh Kaya; 13) Aceh Green, dan 15) Aceh Semeugot.



Dalam pencapaian keberhasilan Visi Misi Pemerintah Aceh dan Program Unggulan Aceh Hebat, Bappeda telah mencanangkan 8 (delapan) Prioritas Pembangunan Aceh dalam RKPA Tahun 2021 dengan Tema "PENGEMBANGAN KAWASAN STRATEGIS DAN KONEKTIFITAS UNTUK PERTUMBUHAN BERKUALITAS". Dari delapan prioritas RKPA Tahun 2021 terdapat Empat Prioritas yang merupakan bagian dari tugas dan fungsi Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh diantaranya Prioritas : 1) Penurunan Angka Kemiskinan dan Pengangguran; 3) Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah Melalui Pengembangan Kawasan Strategis dan Penguatan Konektifitas; 4) Peningkatan Ketahanan Pangan dan Energi; 6) Peningkatan Investasi dan Nilai Tambah Hasil Pertanian, Industri Kreatif, dan Pariwisata; dan 7) Optimalisasi Sumberdaya Alam berkelanjutan dan Penurunan Resiko Bencana;

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh Tahun 2022 disusun dalam bentuk Rencana Kerja (Renja) yang memuat "Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2020 serta Renstra SKPA, Analisis Kinerja Pelayanan SKPA, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPA, Review Terhadap Rencana Kerja (RENJA) RKPA".

## **1.2. Landasan Hukum.**

Landasan Hukum dalam Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun Anggaran 2022 ini adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 Tentang Budidaya Tanaman.
2. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman.
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (UU SPPN).



4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda).
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
6. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.
7. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2006 Tentang Sistem Penyuluhan Pertanian.
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
9. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang;
10. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
11. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Hortikultura.
12. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.
13. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
14. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan.
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
16. Peraturan Presiden No 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.
17. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
18. Instruksi Presiden RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.



20. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/OT.140/8/2012 Tahun 2012 Tentang Kawasan Pertanian Tanaman Pangan.
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan KLHS dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
23. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 56 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian.
24. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 830 Tahun 2016 Tentang Lokasi Pengembangan Kawasan Pertanian Nasional.
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
26. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 18/Permentan/RC.040/4/2018 Tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi Petani.
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
28. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 472/Kpts/RC.040/6/2018 Tentang Lokasi Kawasan Pertanian Nasional.





29. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
30. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh.
31. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perkebunan
32. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2017 tentang Tanaman Pangan dan Hortikultura;
33. Qanun Aceh Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
34. Peraturan Gubernur No. 126 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh; dan
35. Keputusan Gubernur Aceh Nomor 520 Tahun 2017 Tentang Kawasan Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura.

### **1.3. Maksud dan Tujuan.**

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun Anggaran 2022 sebagai data awal dalam Penetapan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2022 yang merupakan Pedoman dan Acuan dalam pelaksanaan rencana program/kegiatan SKPA Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh dalam kurun waktu satu tahun yang akan datang, sehingga arah dan tujuan Pembangunan Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan dapat konsisten dan berkesinambungan. Dimana Rencana Kerja (RENJA) ini telah disesuaikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 serta Tugas dan Fungsi Dinas Pertanian dan



Perkebunan Aceh dalam kurun waktu dimulai sejak Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022.

Maksud dan Tujuan dalam Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun Anggaran 2022 ini adalah sebagai berikut :

1. Sebagai bahan Penelaahan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2022 Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh.
2. Mengevaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Tahun Anggaran 2020 dan Capaian Renstra SKPA Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh.
3. Menganalisis Kinerja Pelayanan SKPA Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh dalam rangka mendukung Rencana Kerja Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan yang ingin dicapai.
4. Merumuskan isu-isu penting dalam rangka Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi serta Kewenangan Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh.
5. Melakukan Review Terhadap Rencana Awal RKPA pada tahun yang akan datang.

Untuk mendukung Program Prioritas Pemerintah Aceh melalui Dinas Teknis pada SKPA Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, maka tujuan Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) dalam rangka Pembangunan SKPA Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh yang ingin dicapai pada tahun 2022 adalah sebagai berikut :

- a. Menciptakan *Good Government* dilingkungan Dinas Pertanian dan Perkebunan, efektivitas *pengawasan* kinerja untuk pelayanan publik.
- b. Mempercepat distribusi sarana produksi (Saprodi) dan hasil panen dan bertambahnya luas areal Penanaman Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan.
- c. Meningkatkan Produksi dan Produktivitas serta mutu hasil pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan serta pengembangan pemasaran hasil



- produk pertanian dan perkebunan unggulan daerah melalui penelitian-penelitian, Pameran Pembangunan Daerah dan Nasional dan Luar Negeri sekaligus sebagai ajang promosi hasil produk pertanian unggulan daerah.
- d. Meningkatkan penerapan sarana dan prasarana teknologi pertanian tepat guna dalam rangka budidaya tanaman padi, palawija, hortikultura dan perkebunan.
  - e. Peningkatan penumbuhan dan pengembangan kawasan serta peningkatan IP300, (sentra agribisnis) spesifik lokasi tanaman padi, palawija. Hortikultura dan Perkebunan.
  - f. Peningkatan sistem peramalan, pengendalian dan penanggulangan organisme pengganggu tanaman pertanian dan perkebunan.
  - g. Penguatan UPJA Provinsi dan Kabupaten dengan membentuk brigade tanam dan brigade panen.
  - h. Penguatan Peran dan Fungsi UPTD Lingkup Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh.
  - i. Penguatan Institusi Perbenihan Balai Benih Induk dan Balai Benih Utama.
  - j. Peningkatan Kapasitas SDM dan Sarana Prasarana Penyuluh dan Petani.

#### **1.4. Sistematika Penulisan.**

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD dan RPJMD dan RKPD pasal 78 menyatakan bahwa penyusunan Rencana Kerja (RENJA) RKPd mencakup penelaahan Rencana Kerja (RENJA) Renja Perangkat Daerah.



## BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) SKPA agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

### 1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja SKPA, proses penyusunan Renja SKPA, keterkaitan antara Renja SKPA dengan dokumen RKPA, Renstra SKPA, dengan Renja K/L dan Tindak Lanjutnya dengan Proses penyusunan RAPBA.

### 1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur SOTK, kewenangan SKPA, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPA.

### 1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja SKPA.

### 1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPA serta susunan garis besar isi dokumen.



## BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

### 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Tahun 2020 dan Capaian Renstra SKPA

Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPA tahun 2020 dan perkiraan capaian tahun 2021, mengacu kepada APBA tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja SKPA sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPA berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPA tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPA tahun lalu, dan realisasi Renstra SKPA mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan SKPA dan/atau realisasi APBA untuk SKPA yang bersangkutan.

Pokok-pokok materi yang disajikan pada bab ini, antara lain :

- Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya, atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
- Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra SKPA;
- Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.
- Tabel yang harus disajikan adalah Tabel T-C. 29



## 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPA

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPA berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.6 tahun 2008.

Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPA, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPA serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

Jika SKPA yang bersangkutan belum mempunyai tolok ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, maka setiap SKPA perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan SKPA yang bersangkutan.

Pada pembahasan sub bab ini perlu disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan SKPA yang disesuaikan menurut SKPA masing-masing, dengan format Tabel T-C.30.

## 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPA

Berisikan uraian mengenai :

- Se jauh mana tingkat kinerja pelayanan SKPA dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPA, diuraikan mengenai koordinasi dan sinergi program antara SKPA Provinsi dengan



SKPK Kabupaten/Kota serta dengan Kementerian Pertanian di tingkat pusat dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan;

- Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPA;
- Dampaknya terhadap capaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (Millenium Development Goals) / SDGs;
- Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPA; dan
- Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

#### 2.4. Review terhadap Rencana Kerja (RENJA) RKPA

Berisikan uraian mengenai :

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara Rencana Kerja (RENJA) RKPA dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan Rencana Kerja (RENJA) RKPD, misalnya : terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di Rencana Kerja (RENJA) RKPA, atau program dan kegiatan cocok namun besarnya berbeda; dan
4. Lampiran tabel T-C.31.



### BAB III. TUJUAN DAN SASARAN.

#### 3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan Nasional dan sebagaimana maksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan Daerah dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPA.

#### 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPA

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPA yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPA.

### BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN.

#### 4.1. Program, Kegiatan DAN Sub Kegiatan.

Berisikan penjelasan mengenai :

- Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.

Misalnya:

- Pencapaian visi dan misi kepala daerah;
- Pengentasan kemiskinan;
- Pendayagunaan potensi ekonomi daerah;
- Pengembangan daerah terisolir.

- Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi :

- Jumlah program dan jumlah kegiatan;





- Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu;
- Total kebutuhan dana/pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.
- Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan Rencana Kerja (RENJA) RKPA, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.
- Tabel rencana program, kegiatan dan sub kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan.

#### **BAB IV. PENUTUP**

Berisikan uraian penutup, berupa :

- Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya, maupun ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan;
- Kaidah-kaidah pelaksanaan; dan
- Rencana tindak lanjut.



## **BAB II**

### **EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA)**

#### **TAHUN 2020**

#### **2.1. Evaluasi Pelaksanaan Tahun 2020 dan Capaian Renstra SKPA.**

##### **2.1.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2020.**

Tahun 2020 merupakan tahun ketiga pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) Periode 2017 - 2022, dari lima tahun masa pelaksanaan program pembangunan sebagaimana telah dituangkan Renstra Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh. Pada Tahun 2020 adalah awal dari pelaksanaan Rencana Startegis (Renstra) Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh serta Realisasi Target Kinerja Hasil Program/Kegiatan Pada Tahun 2020.

Realisasi Capaian Kinerja Program Rencana Kerja tersebut sebagaimana telah didokumentasikan kedalam RKA-APBA dan DPA APBA Tahun 2020. Dari program/kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2020 mengalami kenaikan besaran pagu dari Target Kinerja yang akan dilaksanakan sebagaimana tertuang dalam RPJM Aceh, Renstra dan Renja Dinas Pertanian dan Dinas Perkebunan Aceh Tahun 2020 sebesar Rp. 327.377.311.809,-, sedangkan realisasi capaian kinerja program dalam DPA-SKPA Tahun 2020 sebesar Rp. 270.939.360.489.- (82,76%), dengan sisa anggaran sebesar Rp. 56.437.951.320.- (17,24%).

Realisasi pagu terhadap capaian program tahun 2020 tersebut adanya penurunan realisasi yang disebabkan adanya kegiatan yang dirasionalkan. Dari target dan realisasi capaian rencana kerja tahun 2020 terdapat beberapa perubahan besaran pagu dan rekening. Adapun penjelasan target dan realisasi capaian kinerja program sebagai berikut :



### **BELANJA TIDAK LANGSUNG.**

Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai Negeri Sipil sebanyak 644 orang yang terdiri dari Dinas, 4 UPTD dan 3 SMK-PP Aceh. Pagu Anggaran yang disediakan sesuai dengan Renstra untuk tahun 2020 sebesar Rp.93.366.276.388.- dengan capaian realisasi fisik 81,86%, realisasi keuangan sebesar 76.433.941.350,-(81,86%). Terjadi silpa sebesar Rp. 16.932.335.038,-(18,14%)

### **BELANJA LANGSUNG**

Alokasi dana untuk belanja langsung Tahun 2020 adalah Rp.234.011.035.421,- dengan realisasi fisik kegiatan 85,35% dan realisasi keuangan Rp. 194.505.419.139,- atau sebesar 83,12% sisa dana Rp. 39.505.616.282,-. (16,88%). Sisa lebih pelaksanaan anggaran (SILPA) yang tidak dapat dilaksanakan antara lain disebabkan karena :

1. Keterbatasan melakukan kegiatan dilapangan akibat Pandemi Covid-19.
2. Sisa Tender.
3. Gagal Tender (pekerjaan tidak terealisasi).
4. Waktu pelaksanaan pekerjaan terbatas.
5. Efisiensi dari penetapan harga penawaran yang lebih rendah, pantas, dan wajar dan tidak mengurangi kualitas.
6. Efisiensi dari penyediaan jasa surat menyurat, perjalanan dinas, bahan bakar minyak/gas dan pelumas, pembayaran telepon, air, listrik, internet, cetak, penggandaan, honor-honor, penggantian suku cadang, pajak kendaraan bermotor, bahan praktek/keterampilan, pakaian, kelengkapan kerja lapangan, peralatan/perlengkapan pakai habis, Pengadaan Alat Kantor lainnya dan alat bantu keamanan, peralatan kebersihan dan bahan pembersih, asuransi kesehatan, uang saku dan transport peserta pertemuan, jasa nara sumber, jasa pembaca doa/alquran, makanan dan minuman, transportasi, ATK, Pengadaan computer unit/jaringan, pengadaan bangunan gedung kantor, jasa service, pemeliharaan asset tetap dan asset lainnya, seminar kit, dan akomodasi pertemuan/workshop.



## **REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN**

### **1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.**

#### **a. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat.**

Penyediaan jasa surat menyurat yang merupakan kegiatan rutin setiap SKPA dengan target kinerja tahun 2020 besaran pagu dana sebesar Rp. 50.172.000,- dengan realisasi fisik sebesar 92,11% dan realisasi keuangannya sebesar Rp. 46.026.200,- (91,74%). Terjadinya silpa sebesar Rp. 4.145.800 (8,26%). Indikator sasaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya penyampaian, pelayanan jasa surat menyurat dalam mempercepat proses administrasi. Kegiatan ini mencakup Dinas, 4 UPTD dan 3 SMK-PP dengan target kinerja selama 12 bulan dan realisasi kinerja mencapai 12 bulan. Kegiatan dimaksud yang bersumber dari Dana DBH.

#### **b. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.**

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik juga merupakan kegiatan rutin setiap SKPA dengan target kinerja tahun 2020 besaran pagu dana Rp. 2.491.980.289,- realisasi fisik mencapai 81,48% dan realisasi keuangan Rp. 2.030.420.891,- (81,48%). Terjadinya silpa sebesar Rp. 461.559.398,- (8,52%). Indikator sasaran dari kegiatan ini adalah terwujudnya pelayanan administrasi kantor yang bermutu, tepat waktu dan tepat sasaran. Kegiatan ini mencakup pada Dinas, 4 UPTD dan 3 SMK-PP dengan target kinerja selama 12 bulan dan realisasi kinerja mencapai 12 bulan. Kegiatan dimaksud yang bersumber dari Dana DBH.

#### **c. Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor.**

Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor merupakan kegiatan rutin setiap SKPA dengan target kinerja tahun 2020 besaran pagu dana Rp. 322.100.000,- dengan realisasi fisik 98,01% dan realisasi keuangan



Rp. 313.726.450,- (97,40%). terjadi silpa sebesar Rp. 8.373.550,- (2,60%). Indikator sasaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya proses percepatan pelayanan administrasi perkantoran. Kegiatan ini mencakup pada Dinas, 4 UPTD dan 3 SMK-PP dengan target kinerja selama 12 bulan dan realisasi kinerja mencapai 12 bulan. Kegiatan dimaksud yang bersumber dari Dana DAU.

d. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional.

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional merupakan kegiatan rutin setiap SKPA dan sebagai penunjang kerja aparatur dengan target kinerja tahun 2020 besaran pagu dana sebesar Rp. 3.919.374.905.- dengan realisasi fisik 78,30% dan realisasi keuangan Rp. 2.987.191.503.- (76,22%). Terjadinya silpa pada kegiatan ini sebesar Rp. 932.183.402,- (23,78%). Indikator sasaran dari kegiatan ini adalah tersedianya dokumen perizinan pajak kendaraan operasional serta terpeliharanya sarana kerja tersebut. Kegiatan ini mencakup kendaraan roda dua dan empat dinas pada Dinas, 4 UPTD dan 3 SMK-PP dengan target kinerja selama 12 bulan dan realisasi kinerja mencapai 12 bulan. Kegiatan dimaksud yang bersumber dari Dana Perimbangan DAU.

e. Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor.

Penyediaan jasa kebersihan kantor merupakan kegiatan rutin setiap SKPA dan sebagai penunjang kerja aparatur dengan target kinerja tahun 2020 besaran pagu dana sebesar Rp. 1.226.707.609,- dengan realisasi fisik 87,19% dan realisasi keuangan Rp. 1.068.970.517,- (87,14%) Terjadinya silpa pada kegiatan ini sebesar Rp. 157.737.092,- (12,86%). Indikator sasaran dari kegiatan ini adalah tersedianya jasa kebersihan kantor.



Kegiatan ini mencakup Dinas, 4 UPTD dan 3 SMK-PP dengan target kinerja selama 12 bulan dan realisasi kinerja mencapai 12 bulan. Kegiatan dimaksud yang bersumber dari Dana DAU.

f. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor (ATK).

Penyediaan jasa alat tulis kantor merupakan kegiatan rutin setiap SKPA dan sebagai penunjang kerja aparatur dengan target kinerja tahun 2020 besaran pagu dana sebesar Rp. 499.336.531,- dengan realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan Rp. 498.086.939,- (99,75%) Terjadinya silpa pada kegiatan ini sebesar Rp. 1.249.592,- (0,25%). Indikator sasaran dari kegiatan ini adalah tersedianya peralatan dan bahan kelengkapan kerja berupa ATK dalam rangka menunjang kelancaran proses administrasi. Kegiatan ini mencakup Dinas, 4 UPTD dan 3 SMK-PP dengan target kinerja selama 12 bulan dan realisasi kinerja mencapai 12 bulan. Kegiatan dimaksud yang bersumber dari Dana DAU.

g. Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan.

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan merupakan kegiatan rutin setiap SKPA dan sebagai penunjang kerja aparatur dengan target kinerja tahun 2020 besaran pagu dana sebesar Rp. 380.327.585,- dengan realisasi fisik sebesar 73,83% dan realisasi keuangan Rp.280.770.948,- (73,82%). Terjadi silpa sebesar Rp. 99.556.637,- (26,18%) Kedepan kita upayakan kembali penayangannya melalui media cetak. Indikator sasaran dari kegiatan ini adalah terselenggaranya proses administrasi perkantoran. Kegiatan ini mencakup Dinas, 4 UPTD dan 3 SMK-PP dengan target kinerja selama 12 bulan dan realisasi kinerja mencapai 12 bulan. Kegiatan dimaksud yang bersumber dari Dana DBH.



h. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor merupakan kegiatan rutin setiap SKPA sebagai penunjang kerja aparatur dengan target kinerja tahun 2020 besaran pagu dana sebesar Rp. 148.592.840,- dengan realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 147.707.029,- (99,40%), terjadi silpa sebesar Rp. 885.811,-(0,60%). Indikator sasaran dari kegiatan ini adalah terciptanya kelancaran proses kegiatan perkantoran. Kegiatan ini mencakup penyediaan komponen penerangan kantor Dinas, 4 UPTD dan 3 SMK-PP dengan target kinerja selama 12 bulan dan realisasi kinerja mencapai 12 bulan. Kegiatan dimaksud yang bersumber dari Dana DBH.

i. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan merupakan kegiatan rutin setiap SKPA sebagai penunjang kerja aparatur dengan target kinerja tahun 2020 besaran pagu dana sebesar Rp. 160.000.000,- dengan realisasi fisik sebesar (30,00%) dan realisasi keuangan sebesar Rp. 46.176.000,- (28,86%), Terjadi silpa sebesar Rp. 113.824.000,-(71,14%). Indikator sasaran dari kegiatan ini adalah tersedianya bahan bacaan untuk mendukung kegiatan dinas dan bahan bacaan Sekolah serta implementasi pekerjaan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Kegiatan ini mencakup Pengadaan bahan bacaan dan peraturan perundangan pada Dinas, 4 UPTD dan 3 SMK-PP dengan target kinerja selama 12 bulan dan realisasi kinerja mencapai 12 bulan. Kegiatan dimaksud yang bersumber dari Dana DBH.



j. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman.

Penyediaan makan dan minum merupakan kegiatan rutin setiap SKPA sebagai penunjang kerja aparatur dengan target kinerja tahun 2020 besaran pagu dana sebesar Rp. 537.718.884,- dengan realisasi fisik sebesar 64,50% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 346.803.946,- (64,50%), terjadi silpa sebesar Rp. 190.914.938,- (35,50%). Indikator sasaran dari kegiatan ini adalah Terciptanya optimasi pelayanan aparatur dan makan siswa dalam rangka proses belajar mengajar. Kegiatan ini mencakup pada Dinas Pertanian dan Perkebunan, 4 UPTD dengan target kinerja selama 12 bulan dan realisasi kinerja mencapai 12 bulan. Kegiatan dimaksud yang bersumber dari Dana DBH.

k. Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah.

Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang juga merupakan kegiatan rutin setiap SKPA sebagai penunjang koordinasi kerja aparatur dengan target kinerja tahun 2020 besaran pagu dana sebesar Rp. 915.396.993,- dengan realisasi fisik sebesar 75,67% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 692.676.063,- (75,67%) terjadi silpa sebesar Rp. 222.720.930,- (24,35%). Indikator sasaran dari kegiatan ini adalah terwujudnya koordinasi kegiatan dengan pihak terkait. Kegiatan ini mencakup target pada Sekretariat Dinas Pertanian dan Perkebunan dengan target kinerja selama 12 bulan dan realisasi kinerja mencapai 12 bulan. Kegiatan dimaksud yang bersumber dari Dana DBH.

l. Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran.

Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan target kinerja tahun 2020 besaran pagu dana sebesar Rp. 7.325.402.059,- dengan realisasi fisik sebesar 87,90% dan realisasi keuangan sebesar Rp.





6.436.630.000,- (87,87%) terjadi silpa sebesar Rp. 888.772.059,- (12,13%). Indikator sasaran dari kegiatan ini adalah Terciptanya peningkatan pelayanan administrasi perkantoran dan terbayarnya jasa tenaga kontrak (Non PNS). Kegiatan ini mencakup target pada Dinas, 4 UPTD dan 3 SMK-PP dengan target kinerja selama 12 bulan dan realisasi kinerja mencapai 12 bulan. Kegiatan dimaksud yang bersumber dari Dana SILPA Otsus Aceh.

## **2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.**

### **a. Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor.**

Pembangunan gedung kantor merupakan kegiatan pengadaan prasarana bangunan gedung kantor dalam rangka pelaksanaan peningkatan pelayanan kepada masyarakat oleh aparatur dengan target kinerja tahun 2020 besaran pagu dana sebesar Rp. 5.682.816.561,- dengan realisasi fisik sebesar 10,92% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 619.356.029,- (10,90%) terjadi silpa sebesar Rp. 5.063.460.532,- (89,10%), Kegiatan ini Bersumber dari dana Silpa otsus Aceh.

### **b. Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor.**

Penyediaan perlengkapan gedung kantor merupakan kegiatan rutin setiap SKPA sebagai penunjang sarana dan prasarana kerja aparatur dengan target kinerja tahun 2020 besaran pagu dana sebesar Rp. 1.870.907.495,- dengan realisasi fisik sebesar 93,42% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.734.534.200,- (92,71%) terjadi silpa sebesar Rp. 136.373.295,- (7,29%). Kegiatan dimaksud yang bersumber dari Dana Silpa Otsus aceh.



c. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor.

Rehabilitasi rutin/berkala gedung kantor merupakan kegiatan rutin setiap SKPA dalam rangka untuk pemeliharaan Gedung kantor tempat kerja aparatur dengan target kinerja tahun 2020 besaran pagu dana sebesar Rp. 586.926.911,- dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 586.194.550,- (99,88%) terjadi silpa sebesar Rp. 732.361,- (0,12%). Kegiatan dimaksud yang bersumber dari Dana DBH.

d. Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor.

Pemeliharaan sedang/berat rumah gedung kantor merupakan kegiatan rutin setiap SKPA dalam rangka untuk pemeliharaan sarana kerja aparatur dengan target kinerja tahun 2020 besaran pagu dana sebesar Rp. 947.800.000,- dengan realisasi fisik sebesar 95,31% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 901.498.362,- (95,11%) terjadi silpa sebesar Rp. 46.301.638,- (4,89%). Kegiatan dimaksud yang bersumber dari Dana DBH.

### **3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur.**

a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya.

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya dalam rangka meningkatkan disiplin aparatur dengan target kinerja tahun 2020 besaran pagu dana sebesar Rp. 624.193.340,- dengan realisasi fisik sebesar 88,40% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 551.770.322,- (88,40%) terjadi silpa sebesar Rp. 72.423.018,- (11,60%). Hal ini disebabkan pakaian dinas aparatur setiap tahunnya sangat dibutuhkan dalam rangka peningkatan pelayanan publik. indikator sasaran dari kegiatan ini adalah meningkatnya disiplin aparatur. Kegiatan ini



mencakup pekerjaan pada Dinas, 4 UPTD dan 3 SMK-PP. Kegiatan dimaksud yang bersumber dari Dana DBH.

#### **4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.**

##### **a. Pendidikan dan Pelatihan Formal.**

Kegiatan pendidikan dan pelatihan formal dalam rangka meningkatkan pengetahuan aparatur dalam pelayanan publik maka ditargetkan kinerja tahun 2020 besaran pagu dana sebesar Rp.144.725.000.-dengan realisasi 0% tidak terlaksanakan akibat Refocusing terkait Pandemi COVID 19.

##### **b. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan.**

Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan merupakan kegiatan rutin pada SKPA dalam rangka mensosialisasikan berbagai kebijakan yang tertuang dalam peraturan perundangan yang harus dilaksanakan dan diterapkan oleh aparatur untuk ketertiban administrasi dan dijalankan sesuai peraturan berlaku. Kegiatan ini ditargetkan menyerap anggaran sebesar Rp. 119.039.636,- dengan realisasi 0%, Kegiatan ini juga tidak terlaksana akibat Refocusing terkait Pandemi COVID 19.



## **PROGRAM/KEGIATAN SPESIFIK DINAS.**

### **1. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani.**

- a. Kegiatan Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis (Bidang Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Perkebunan) .

Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis merupakan kegiatan dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani dan pelaku agribisnis dalam hal teknis budidaya, pemeliharaan tanaman, peningkatan mutu hasil dan pemasaran hasil komoditas pertanian/perkebunan guna memperoleh peningkatan nilai tambah dalam rangka kemandirian dan kesejahteraan petani. Kegiatan ini merencanakan target kinerja program pada tahun 2020 (7 Angkatan dan 175 Petani), dengan alokasi pagu dana sebesar Rp. 551.705.349,- dari target yang direncanakan kinerja program pada tahun 2019 terealisasi fisik kegiatan tersebut sebesar 98,91% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 543.650.832,-. (98,54%) dengan realisasi kinerja sebesar 7 Angkatan dan 175 Petani. Terjadi silpa sebesar Rp. 8.054.517.- Kegiatan dimaksud yang bersumber dari Dana Otsus Aceh.

- b. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Tani Melalui Pelatihan Teknologi Tepat Guna (Bidang Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Perkebunan).

Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Tani Melalui Pelatihan Teknologi Tepat Guna merupakan dukungan prioritas program Dinas dengan indikator kegiatan terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Tani Peningkatnya Indeks yang diterima petani Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan dengan rencana target capaian kinerja 3 kabupaten serta besaran pagu sebesar Rp. 443.208.892.- dengan realisasi fisik sebesar 100%, dan realisasi keuangan sebesar Rp. 442.506.762,-. (99,84%) dengan realisasi dari target kinerja sebesar 7 Kelompok dan



175 Petani. terjadi silpa sebesar Rp. 702.130.- (0,16%). Kegiatan dimaksud yang bersumber dari SILPA Otsus dan Dana Otsus Aceh.

- c. Kegiatan Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Tanaman Semusim dan Rempah (Bidang Pengolahan dan Pemasaran Perkebunan).

Kegiatan Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Tanaman Semusim dan Rempah merupakan dukungan prioritas program Dinas dengan indikator kegiatan terlaksananya Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Tanaman Semusim dan Rempah. Kegiatan ini ditargetkan menyerap anggaran sebesar Rp. 644.579.200,- dengan realisasi fisik sebesar 92,88% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 597.463.824,- (92,69%), terjadi silpa sebesar Rp. 47.115.376.- (7,31%).

- d. Kegiatan Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Tanaman Pangan (Bidang Tanaman Pangan).

Kegiatan Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Tanaman Pangan merupakan dukungan prioritas program Dinas dengan indikator kegiatan Terlaksananya Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil tanaman pangan (Kajian Fungsi Alat dan Pelatihan). Kegiatan ini ditargetkan menyerap anggaran sebesar Rp. 572.488.292,- dengan realisasi fisik sebesar 92,33% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 520.128.798,- (90,85%), terjadi silpa sebesar Rp. 52.359.494.- (9,15%).

- e. Kegiatan Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Hortikultura (Bidang Hortikultura).



Kegiatan Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Tanaman Hortikultura merupakan dukungan prioritas program Dinas dengan indikator kegiatan terlaksananya Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Tanaman Hortikultura. Kegiatan ini ditargetkan menyerap anggaran sebesar Rp. 436.422.910,- dengan realisasi fisik sebesar 87,20% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 378.376.948,- (86,70%), terjadi silpa sebesar Rp. 58.045.962.- (13,30%). Dengan capaian realisasi kegiatan berupa dilaksanakannya rapat evaluasi di kabupaten Aceh timujr dan juga tersedianya Unit Pengolahan Hasil (UPH) bawang merah untuk 3 (tiga) Kabupaten diantaranya kabupaten Pidie, Aceh Utara dan Aceh Timur.

- f. Kegiatan Promosi atas Hasil Perkebunan Unggulan Daerah ( Bidang Pengolahan dan Pemasaran Perkebunan ).

Kegiatan Promosi atas Hasil Perkebunan Unggulan Daerah merupakan dukungan prioritas program Dinas dengan indikator kegiatan terlaksananya Promosi atas Hasil Perkebunan Unggulan Daerah. Kegiatan ini ditargetkan menyerap anggaran sebesar Rp. 1.281.902.555,- dengan realisasi fisik sebesar 86,61% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.088.379.806,- (84,90%), terjadi silpa sebesar Rp. 193.522.749.- (15,10%).

- g. Kegiatan Promosi dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan (Bidang Tanaman Pangan).

Kegiatan Promosi dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan merupakan dukungan prioritas program Dinas dengan indikator kegiatan Terlaksananya Promosi dan pemasaran hasil tanaman pangan (Bazar produk Olahan, Fasilitasi kemitraan dan Pameran). Kegiatan ini ditargetkan menyerap anggaran sebesar Rp. 232.875.141,- dengan



realisasi fisik sebesar 85,55% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 197.835.700,- (84,95%), terjadi silpa sebesar Rp. 35.039.441,- (15,05%).

- h. Kegiatan Promosi dan Pemasaran Hasil Hortikultura (Bidang Hortikultura).

Kegiatan Promosi dan Pemasaran Hasil Tanaman Hortikultura merupakan dukungan prioritas program Dinas dengan indikator kegiatan terlaksananya Promosi dan Pemasaran Hasil Tanaman Hortikultura. Kegiatan ini ditargetkan menyerap anggaran sebesar Rp. 829.137.055,- dengan realisasi fisik sebesar 62,12% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 511.897.092,- (61,74%), terjadi silpa sebesar Rp. 317.239.963,- (38,26%). Dengan capaian terlaksananya kegiatan Pasar Tani yang rutin dia selenggarakan sebulan 2 (dua) kali untuk mendukung pemasaran produk hasil pertanian yang dihasilkan oleh petani.

- i. Kegiatan Peningkatan Kelembagaan dan SDM Petani (Bidang Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Perkebunan).

Kegiatan Peningkatan Kelembagaan dan SDM Petani merupakan dukungan prioritas program Dinas dengan indikator kegiatan terlaksananya peningkatan Pengetahuan dan Keahlian SDM Petani. Besaran Pagu pada kegiatan ini sebesar Rp. 1.167.786.159,- dengan realisasi fisik sebesar 94,10% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.094.382.650,- (99,71%), terjadi silpa sebesar Rp. 73.403.509 (0,29%). Kegiatan dimaksud yang bersumber dari Dana Otsus Aceh.

- j. Kegiatan Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis (SiLPA) (Bidang Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Perkebunan).



Kegiatan Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis merupakan kegiatan dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani dan pelaku agribisnis dalam hal teknis budidaya, pemeliharaan tanaman, peningkatan mutu hasil dan pemasaran hasil komoditas pertanian/perkebunan guna memperoleh peningkatan nilai tambah dalam rangka kemandirian dan kesejahteraan petani. Besaran Pagu pada kegiatan ini sebesar Rp. 719.098.063,- dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 719.077.875,- (100%). Dari realisasi target capaian kinerja terlaksana untuk 16 angkatan/kelompok, Kegiatan dimaksud bersumber dari Dana SiLPA Otsus Aceh.

- k. Kegiatan Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil tanaman tahunan dan penyegar (Migas) (Bidang Pengolahan dan Pemasaran Perkebunan)

Kegiatan ini memiliki besaran pagu Rp. 830.925.579,- tetapi tidak terlaksana karena Refocusing Anggaran terkait Pandemi COVID 19.

- l. Kegiatan Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Tanaman Tahunan dan Penyegar (Otsus) (Bidang Pengolahan dan Pemasaran Perkebunan).

Kegiatan Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Tanaman Tahunan dan Penyegar merupakan dukungan prioritas program Dinas dengan indikator kegiatan terlaksananya Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Tanaman Tahunan dan Penyegar. Kegiatan ini ditargetkan menyerap anggaran sebesar Rp. 599.407.800,- dengan realisasi fisik sebesar 97,42% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 574.255.800,- (95,80%), terjadi silpa sebesar Rp. 25.152.000.- (4,20%). Kegiatan dimaksud bersumber dari Dana Otsus Aceh.





## **2. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan.**

- a. Kegiatan Pemeliharaan Tanaman Perkebunan Rakyat (Bidang Perbenihan, Produksi dan Perlindungan Perkebunan).

Kegiatan Pemeliharaan Tanaman Perkebunan Rakyat merupakan prioritas program Dinas dengan indikator kegiatan terpeliharanya tanaman perkebunan milik rakyat. Kegiatan ini ditargetkan menyerap anggaran sebesar Rp. 889.640.857,- dengan realisasi fisik sebesar 99,91% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 865.777.391,- (97,32%), terjadi silpa sebesar Rp. 23.863.466.- (2,68%). Kegiatan dimaksud bersumber dari Dana Otsus Aceh.

- b. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Usaha Perkebunan Besar (Bidang Pengolahan dan Pemasaran Perkebunan).

Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Usaha Perkebunan Besar merupakan prioritas program Dinas dengan indikator kegiatan terlaksananya pembinaan usaha perkebunan besar. Kegiatan ini ditargetkan menyerap anggaran sebesar Rp. 582.744.275,- dengan realisasi fisik sebesar 99,88% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 574.410.805,- (98,57%), terjadi silpa sebesar Rp. 8.333.470.- (1,43%).

- c. Kegiatan Pengembangan Perbenihan/Perbibitan Tanaman Pangan (UPTD Balai Benih Hortikultura, Tanaman Pangan dan Tanaman Perkebunan).

Kegiatan Pengembangan Perbenihan/Perbibitan Tanaman Pangan merupakan prioritas program Dinas dengan indikator kegiatan terlaksananya Pengembangan Perbenihan/Perbibitan Tanaman Pangan. Kegiatan ini ditargetkan menyerap anggaran sebesar Rp.



857.605.583,- dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 752.379.760,- (87,73%), terjadi silpa sebesar Rp. 105.225.823.- (12,27%).

- d. Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Perbenihan Tanaman Pangan (UPTD Balai Benih Hortikultura, Tanaman Pangan dan Tanaman Perkebunan).

Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Perbenihan Tanaman Pangan merupakan dukungan prioritas Program Dinas dengan indikator kegiatan terlaksananya Peningkatan Sarana dan Prasarana Perbenihan Tanaman Pangan. Kegiatan ini ditargetkan menyerap anggaran sebesar Rp. 426.750.000,- dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 391.010.000,- (91,63%), terjadi silpa sebesar Rp. 35.740.000.- (8,37%).

- e. Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Perbenihan Tanaman Hortikultura (UPTD Balai Benih Hortikultura, Tanaman Pangan dan Tanaman Perkebunan).

Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Perbenihan Tanaman Hortikultura merupakan prioritas program Dinas dengan indikator kegiatan terlaksananya Peningkatan Sarana dan Prasarana Perbenihan Tanaman Hortikultura. Kegiatan ini ditargetkan menyerap anggaran sebesar Rp. 214.000.000,- dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 213.228.588,- (99,64%), terjadi silpa sebesar Rp. 771.412.- (0,36%).

- f. Kegiatan Pengembangan Perbenihan/Perbibitan Tanaman Hortikultura (UPTD Balai Benih Hortikultura, Tanaman Pangan dan Tanaman Perkebunan).



Kegiatan Pengembangan Perbenihan/Perbibitan Tanaman Hortikultura merupakan prioritas program Dinas dengan indikator kegiatan terlaksananya Pengembangan Perbenihan/Perbibitan Tanaman Hortikultura. Kegiatan ini ditargetkan menyerap anggaran sebesar Rp. 1.351.250.106,- dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.270.539.695,- (94,03%), terjadi silpa sebesar Rp. 80.710.411,- (5,97%). Kegiatan dimaksud yang bersumber dari Dana Otsus Aceh.

- g. Kegiatan Penyediaan Bibit Unggul Tanaman Tahunan dan Penyegar (Bidang Perbenihan, Produksi dan Perlindungan Perkebunan).

Kegiatan Penyediaan Bibit Unggul Tanaman Tahunan dan Penyegar merupakan prioritas program Dinas dengan indikator kegiatan terlaksananya Penyediaan Bibit Unggul Tanaman Tahunan dan Penyegar. Kegiatan ini ditargetkan menyerap anggaran sebesar Rp. 5.831.764.087,- dengan realisasi fisik sebesar 80,44% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 4.691.165.686,- (80,44%), terjadi silpa sebesar Rp. 1.140.598.401,- (19,56%).

- h. Kegiatan Penyediaan Bibit Unggul Tanaman Semusim dan Rempah (Bidang Perbenihan, Produksi dan Perlindungan Perkebunan).

Kegiatan Penyediaan Bibit Unggul Tanaman Semusim dan Rempah merupakan prioritas program Dinas dengan indikator kegiatan terlaksananya Penyediaan Bibit Unggul Tanaman Semusim dan Rempah. Kegiatan ini ditargetkan menyerap anggaran sebesar Rp. 577.970.201,- dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 571.199.799,- (98,83%), terjadi silpa sebesar Rp. 6.770.402,- (1,17%). Kegiatan dimaksud yang bersumber dari Dana Otsus Aceh.



- i. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Usaha Perbenihan/Perbibitan Perkebunan (Bidang Perbenihan, Produksi dan Perlindungan Perkebunan).

Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Usaha Perbenihan/Perbibitan Perkebunan merupakan prioritas program Dinas dengan indikator kegiatan terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Usaha Perbenihan/Perbibitan Perkebunan. Kegiatan ini ditargetkan menyerap anggaran sebesar Rp. 909.385.876,- dengan realisasi fisik sebesar 93,19% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 836.616.064,- (92,00%), terjadi silpa sebesar Rp. 72.769.812,- (8%). Kegiatan dimaksud yang bersumber dari Dana Otsus Aceh.

- j. Kegiatan Pengembangan dan Penguatan Desa Mandiri Benih Padi (Bidang Tanaman Pangan).

Kegiatan Pengembangan dan Penguatan Desa Mandiri Benih Padi merupakan prioritas program Dinas dengan indikator kegiatan Terlaksananya Pengembangan dan Penguatan DMB Padi. Kegiatan ini ditargetkan menyerap anggaran sebesar Rp. 964.789.245,- dengan realisasi fisik sebesar 98,72% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 948.969.760,- (98,36%), terjadi silpa sebesar Rp. 15.819.485,- (1,64%). Kegiatan dimaksud yang bersumber dari Dana Otsus Aceh.

- k. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Usaha Perbenihan/Perbibitan Tanaman Pangan (Bidang Tanaman Pangan).

Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Usaha Perbenihan/Perbibitan Tanaman Pangan merupakan prioritas program Dinas dengan indikator kegiatan Terlaksananya Pembinaan dan pengembangan usaha perbenihan/perbibitan Tanaman Pangan. Kegiatan ini ditargetkan menyerap anggaran sebesar Rp. 174.326.550,- dengan realisasi fisik sebesar 52,47% dan realisasi



keuangan sebesar Rp. 91.469.400,- (52,47%), terjadi silpa sebesar Rp. 82.857.150,- (47,53%). Kegiatan dimaksud yang bersumber dari Dana Otsus Aceh.

- i. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Usaha Perbenihan/Perbibitan Tanaman Hortikultura (Bidang Hortikultura).  
Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Usaha Perbenihan/Perbibitan Tanaman Hortikultura merupakan prioritas program Dinas dengan indikator kegiatan terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Usaha Perbenihan/Perbibitan Tanaman Hortikultura. Kegiatan ini ditargetkan menyerap anggaran sebesar Rp. 1.571.760.419,- dengan realisasi fisik sebesar 99,35% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.492.397.510,- (94,95%), terjadi silpa sebesar Rp. 79.362.909,- (5,05%). Kegiatan dimaksud yang bersumber dari Dana Otsus Aceh.
  
- m. Kegiatan Optimasi Lahan Pertanian (Bidang Sarana dan Prasarana).  
Kegiatan Optimasi Lahan Pertanian merupakan prioritas program Dinas dengan indikator kegiatan terlaksananya Optimasi Lahan Pertanian. Kegiatan ini ditargetkan menyerap anggaran sebesar Rp. 6.952.849.908,- dengan realisasi fisik sebesar 65,35% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 4.537.219.279,- (65,26%), terjadi silpa sebesar Rp. 2.415.630.629,- (34,74%). Kegiatan dimaksud yang bersumber dari Dana Otsus Aceh.
  
- n. Kegiatan Perluasan Areal Pertanian (Bidang Sarana dan Prasarana).  
Kegiatan Perluasan Areal Pertanian merupakan prioritas program Dinas dengan indikator kegiatan terlaksananya Perluasan Areal



Pertanian. Kegiatan ini ditargetkan menyerap anggaran sebesar Rp. 279.872.909,- dengan realisasi fisik sebesar 96,25% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 263.278.500,- (94,07%), terjadi silpa sebesar Rp. 16.594.409,- (5,93%).

- o. Kegiatan Pengadaan Alat Mesin Pertanian Pra Panen (Bidang Sarana dan Prasarana).

Kegiatan Pengadaan Alat Mesin Pertanian Pra Panen merupakan prioritas program Dinas dengan indikator kegiatan terlaksananya Pengadaan Alat Mesin Pertanian Pra Panen. Kegiatan ini ditargetkan menyerap anggaran sebesar Rp. 153.083.932,- dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 150.855.953,- (98,54%), terjadi silpa sebesar Rp. 2.227.979,- (1,46%). Kegiatan dimaksud yang bersumber dari Dana Otsus Aceh.

- p. Kegiatan Pengadaan Alat Mesin Pertanian Pasca Panen (Bidang Tanaman Pangan).

Kegiatan Pengadaan Alat Mesin Pertanian Pasca Panen merupakan prioritas program Dinas dengan indikator kegiatan Terlaksananya Pengadaan Alat dan Mesin Pasca Panen. Kegiatan ini ditargetkan menyerap anggaran sebesar Rp. 630.030.131,- dengan realisasi fisik sebesar 87,92% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 544.951.400,- (86,50%), terjadi silpa sebesar Rp. 85.078.731,- (13,5%). Kegiatan dimaksud yang bersumber dari Dana Otsus Aceh.

- q. Kegiatan Peningkatan Prasarana Pertanian (Bidang sarana dan Prasarana).

Kegiatan Peningkatan Prasarana Pertanian merupakan prioritas program Dinas dengan indikator kegiatan terlaksananya Peningkatan



Prasarana Pertanian. Kegiatan ini ditargetkan menyerap anggaran sebesar Rp. 4.417.926.466,- dengan realisasi fisik sebesar 99,79% dan realisasi keuangan sebesar Rp.4.397.251.400,- (99,53%), terjadi silpa sebesar Rp. 20.675.066.- (0,47%). Kegiatan dimaksud yang bersumber dari Dana Otsus Aceh.

- r. Kegiatan Peningkatan Prasarana Perkebunan (Bidang Sarana dan Prasara).

Kegiatan Peningkatan Prasarana Perkebunan merupakan prioritas program Dinas dengan indikator kegiatan terlaksananya Peningkatan Prasarana Perkebunan. Kegiatan ini ditargetkan menyerap anggaran sebesar Rp. 2.487.423.209,- dengan realisasi fisik sebesar 99,53% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 2.474.291.250,- (99,47%), terjadi silpa sebesar Rp. 13.131.959 (0,53%). Kegiatan dimaksud yang bersumber dari Dana Otsus Aceh.

- s. Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana UPTD Mekanisasi Pertanian (UPTD Mekanisasi Pertanian).

Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana UPTD Mekanisasi Pertanian merupakan prioritas program Dinas dengan indikator kegiatan terlaksananya Peningkatan Sarana dan Prasarana UPTD Mekanisasi Pertanian. Kegiatan ini ditargetkan menyerap anggaran sebesar Rp. 11.218.830.811,- dengan realisasi fisik sebesar 97,50% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 10.904.886.180,- (97,20%), terjadi silpa sebesar Rp. 313.944.631.- (2,8%). Kegiatan dimaksud yang bersumber dari Dana Otsus Aceh.

- t. Kegiatan Penyelenggaraan BLUD Mekanisasi Pertanian (UPTD Mekanisasi Pertanian).



Kegiatan Penyelenggaraan BLUD Mekanisasi Pertanian merupakan prioritas program Dinas dengan indikator kegiatan terlaksananya Penyelenggaraan BLUD Mekanisasi Pertanian. Kegiatan ini ditargetkan menyerap anggaran sebesar Rp. 3.000.000.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 0,,-. Tidak dilaksanakan disebabkan karena peraturan pelaksanaan kegiatan BLUD belum tersedia.

- u. Kegiatan Pengembangan Kawasan Padi (Bidang Tanaman Pangan)  
Kegiatan Pengembangan Kawasan Padi merupakan prioritas program Dinas dengan indikator kegiatan terlaksananya Pengembangan Kawasan Padi melalui Pengembangan Kawasan Padi. Kegiatan ini ditargetkan menyerap anggaran sebesar Rp. 18.998.679.860,- dengan realisasi fisik sebesar 95,52% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 17.126.549.618,- (90,15%), terjadi silpa sebesar Rp. 1.872.130.242,- (9,85%).
- v. Kegiatan Pengembangan Kawasan Jagung (Bidang Tanaman Pangan).  
Kegiatan Pengembangan Kawasan Jagung merupakan prioritas program Dinas dengan indikator kegiatan terlaksananya Pengembangan Kawasan Jagung. Kegiatan ini ditargetkan menyerap anggaran sebesar Rp. 22.780.958.793,- dengan realisasi fisik sebesar 78,90% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 17.974.632.365,- (78,90%), terjadi silpa sebesar Rp. 4.806.326.428,- (21,10%).
- w. Kegiatan Pengembangan Kawasan Aneka Kacang dan Umbi (Bidang Tanaman Pangan).  
Kegiatan Pengembangan Kawasan Aneka Kacang dan Umbi merupakan prioritas program Dinas dengan indikator kegiatan terlaksananya Pengembangan Kawasan Aneka Kacang dan Umbi melalui Pengembangan Kawasan Kacang Tanah. Kegiatan ini





ditargetkan menyerap anggaran sebesar Rp. 251.981.310,- dengan realisasi fisik sebesar 83,34% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 201.415.000,- (79,93%), terjadi silpa sebesar Rp. 50.566.310 (20,07%).

- x. Kegiatan Pengembangan Sentra Aneka Buah (Bidang Hortikultura).  
Kegiatan Pengembangan Sentra Aneka Buah merupakan prioritas program Dinas dengan indikator kegiatan Terlaksananya Pengembangan Sentra Buah-buahan. Kegiatan ini ditargetkan menyerap anggaran sebesar Rp. 1.846.841.799,- dengan realisasi fisik sebesar 89,66% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.642.241.444,- (88,92%), terjadi silpa sebesar Rp. 204.600.355,- (11,08%). Dari kegiatan ini tercapainya pengembangan sentra Alpukat di kabupaten Aceh Besar (150 Ha), Pengadaan Bibit Durian dan Rambutan di Aceh Besar dan kegiatan pendukung berupa Pertemuan Evaluasi kegiatan hortikultura, Kegiatan dimaksud yang bersumber dari Dana Otsus Aceh.
- y. Kegiatan Pengembangan Kawasan Tanaman Sayuran (Bidang Hortikultura).  
Kegiatan Pengembangan Kawasan Tanaman Sayuran merupakan prioritas program Dinas dengan indikator kegiatan Terlaksananya Pengembangan Kawasan Bawang Merah. Kegiatan ini ditargetkan menyerap anggaran sebesar Rp. 7.411.637.015,- dengan realisasi fisik sebesar 80,87% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 5.993.817.000,- (80,87%), terjadi silpa sebesar Rp. 1.417.820.015,- (19,13%). Dari realisasi kegiatan ini terlaksananya pengembangan Kawasan bawang merah seluas 150 Ha, bibit jengkol sebanyak 64.910 btg. Kegiatan dimaksud bersumber dari Dana Otsus Aceh.



- z. Kegiatan Pengembangan Kawasan Perkebunan Komoditi Strategis (Bidang Perbenihan, Produksi dan Perlindungan Perkebunan).

Kegiatan Pengembangan Kawasan Perkebunan Komoditi Strategis merupakan prioritas program Dinas dengan indikator kegiatan terlaksananya pengembangan kawasan perkebunan Komoditi Strategis. Kegiatan ini ditargetkan menyerap anggaran sebesar Rp. 5.660.554.552,- dengan realisasi fisik sebesar 99,96% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 5.354.696.916,- (94,60%), terjadi silpa sebesar Rp. 305.857.636.- (5,40%).

- aa. Kegiatan Pengembangan Kawasan Perkebunan Komoditi Unggul (Bidang Perbenihan, Produksi dan Perlindungan Perkebunan) .

Kegiatan Pengembangan Kawasan Perkebunan Komoditi Unggul merupakan prioritas program Dinas dengan indikator kegiatan terlaksananya pengembangan kawasan perkebunan Komoditi Unggul. Kegiatan ini ditargetkan menyerap anggaran sebesar Rp. 2.251.666.949,- dengan realisasi fisik sebesar 99,23% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 2.210.521.250,- (98,17%), terjadi silpa sebesar Rp. 41.145.699.- (1,83%).

- bb. Kegiatan Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih Unggul Tanaman Pangan dan Hortikulura (UPTD Balai Benih Pengawasan dan Sertifikasi Tanaman Pangan, Hortikulura dan Perkebunan).

Kegiatan Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih Unggul Tanaman Pangan dan Hortikulura merupakan prioritas program Dinas dengan indikator kegiatan terlaksananya Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih Unggul Tanaman Pangan dan Hortikulura. Kegiatan ini ditargetkan menyerap anggaran sebesar Rp. 1.176.786.939,- dengan realisasi fisik sebesar 97,20% dan realisasi keuangan sebesar



Rp. 1.139.284.550,- (96,81%), terjadi silpa sebesar Rp. 37.502.389,- (3,19%).

- cc. Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih TPH dan Perkebunan (UPTD Balai Benih pengawasan dan Sertifikasi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan).

Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana UPTD Pengawasan dan Sertifikasi Benih TPH dan Perkebunan merupakan prioritas program Dinas dengan indikator kegiatan terlaksananya Peningkatan Sarana dan Prasarana UPTD Pengawasan dan Sertifikasi Benih TPH dan Perkebunan. Kegiatan ini ditargetkan menyerap anggaran sebesar Rp. 34.255.217,- dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 34.243.000,- (99,96%), terjadi silpa sebesar Rp. 12.217,- (0,04%).

- dd. Kegiatan Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih Unggul Tanaman Perkebunan (UPTD Balai Benih pengawasan dan Sertifikasi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan).

Kegiatan Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih Unggul Tanaman Perkebunan merupakan prioritas program Dinas dengan indikator kegiatan terlaksananya Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih Unggul Tanaman Perkebunan. Kegiatan ini ditargetkan menyerap anggaran sebesar Rp. 718.657.504,- dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 707.828.359,- (98,40%), terjadi silpa sebesar Rp. 10.829.145,- (1,60%).

- ee. Kegiatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman Pangan dan Hortikultura (UPTD Balai Proteksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan).



Kegiatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman Pangan dan Hortikultura merupakan prioritas program Dinas dengan indikator kegiatan terlaksananya Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman Pangan dan Hortikultura. Kegiatan ini ditargetkan menyerap anggaran sebesar Rp. 2.739.919.006,- dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 2.660.896.722,- (97,12%), terjadi silpa sebesar Rp. 79.022.284.- (2,88%).

- ff. Kegiatan Rehabilitasi Tanaman Perkebunan Rakyat (Bidang Perbenihan, Produksi dan Perlindungan Perkebunan).

Kegiatan Rehabilitasi Tanaman Perkebunan Rakyat merupakan prioritas program Dinas dengan indikator kegiatan Terlaksananya rehabilitasi tanaman perkebunan rakyat. Kegiatan ini ditargetkan menyerap anggaran sebesar Rp. 3.737.447.036,- dengan realisasi fisik sebesar 93,46% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 3.458.383.850,- (92,53%), terjadi silpa sebesar Rp. 279.063.186.- (7,47%).

- gg. Kegiatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman Perkebunan (UPTD Balai Proteksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan).

Kegiatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman Perkebunan merupakan dukungan prioritas program Dinas dengan indikator kegiatan terlaksananya Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman Perkebunan. Kegiatan ini ditargetkan menyerap anggaran sebesar Rp. 746.183.351,- dengan realisasi fisik sebesar 91,24% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 680.337.158,- (91,18%), terjadi silpa sebesar Rp. 65.846.193.- (8,82 %).



- hh. Kegiatan Perlindungan Tanaman Perkebunan (Bidang Perbenihan, Produksi dan Perlindungan Perkebunan).

Kegiatan Perlindungan Tanaman Perkebunan merupakan prioritas program Dinas dengan indikator kegiatan Terlaksananya Pengendalian Kebakaran Lahan dan Kebun Rakyat. Kegiatan ini ditargetkan menyerap anggaran sebesar Rp. 275.088.310,- dengan realisasi fisik sebesar 88,37% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 239.274.810,- (86,98%), terjadi silpa sebesar Rp. 35.813.500,- (13,02%).

- ii. Kegiatan Gerakan Pengendalian OPT Perkebunan (Bidang Perbenihan, Produksi dan Perlindungan Perkebunan).

Kegiatan Gerakan Pengendalian OPT Perkebunan merupakan prioritas program Dinas dengan indikator kegiatan Terlaksananya pengendalian OPT Kopi. Kegiatan ini ditargetkan menyerap anggaran sebesar Rp. 265.086.369,- dengan realisasi fisik sebesar 86,88% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 228.002.931,- (86,01%), terjadi silpa sebesar Rp. 37.083.438,- (13,99%).

- jj. Kegiatan Perlindungan Tanaman Pangan (Bidang Tanaman Pangan).

Kegiatan Perlindungan Tanaman Pangan merupakan prioritas program Dinas dengan indikator kegiatan Terlaksananya Pengendalian Kebakaran Lahan dan Kebun Rakyat. Kegiatan ini ditargetkan menyerap anggaran sebesar Rp. 1.505.719.419,- dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.478.132.500,- (98,17%), terjadi silpa sebesar Rp. 27.586.919,- (1,83%).



- kk. Kegiatan Perlindungan Tanaman Hortikultura (Bidang Hortikultura).
- Kegiatan Perlindungan Tanaman Perkebunan merupakan prioritas program Dinas dengan indikator kegiatan Terlaksananya Pengendalian Kebakaran Lahan dan Kebun Rakyat. Kegiatan ini ditargetkan menyerap anggaran sebesar Rp. 37.540.000,- dengan realisasi fisik sebesar 98,67% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 37.020.000,- (98,61%), terjadi silpa sebesar Rp. 520.000,- (1,39%).
- ll. Kegiatan Pengembangan Tanaman Perkebunan untuk Dayah / Pesantren (Bidang Perbenihan, Produksi dan Perlindungan perkebunan).
- Kegiatan Pengembangan Tanaman Perkebunan untuk Dayah / Pesantren merupakan prioritas program Dinas dengan indikator kegiatan Terlaksananya Pemberdayaan Dayah / Pesantren untuk bidang perkebunan Rakyat. Kegiatan ini ditargetkan menyerap anggaran sebesar Rp. 1.210.215.954,- dengan realisasi fisik sebesar 98,11% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.098.863.454,- (90,80%), terjadi silpa sebesar Rp. 111.352.500,- (9,20%).
- mm. Kegiatan Pengawasan Distribusi Pupuk Bersubsidi dan Pestisida (Bidang Sarana dan Prasarana).
- Kegiatan Pengawasan Distribusi Pupuk Bersubsidi dan Pestisida merupakan prioritas program Dinas dengan indikator kegiatan Terlaksananya Peredaran Pupuk yang bersubsidi untuk masyarakat. Kegiatan ini ditargetkan menyerap anggaran sebesar Rp. 314.906.626,- dengan realisasi fisik sebesar 89,25% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 278.704.400,- (88,50%), terjadi silpa sebesar Rp. 36.202.226,- (11,50%).



- nn. Kegiatan Pembiayaan Pertanian (Bidang Sarana dan Prasarana).  
Kegiatan Pembiayaan Pertanian merupakan prioritas program Dinas dengan indikator kegiatan Terlaksananya Peredaran Pupuk yang bersubsidi untuk masyarakat. Kegiatan ini ditargetkan menyerap anggaran sebesar Rp. 428.192.488,- dengan realisasi fisik sebesar 89,84% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 381.807.195,- (89,17%), terjadi silpa sebesar Rp. 46.385.293,- (10,83%).
- oo. Kegiatan Pengembangan Perbenihan/Perbibitan Tanaman Perkebunan (UPTD Balai Benih Hortikultura, Tanaman Pangan dan Tanaman Perkebunan).  
Kegiatan Pengembangan Perbenihan / Perbibitan Tanaman Perkebunan merupakan prioritas program Dinas dengan indikator kegiatan Tersedianya benih/bibit untuk menunjang Program Pemerintah. Kegiatan ini ditargetkan menyerap anggaran sebesar Rp. 711.158.265,- dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 643.870.724,- (90,54%), terjadi silpa sebesar Rp. 67.287.541,- (9,46%).
- pp. Kegiatan Pelatihan Operasionalisasi Alat Mesin Pertanian (UPTD Mekanisasi Pertanian).  
Kegiatan Pelatihan Operasionalisasi Alat Mesin Pertanian ini ditargetkan menyerap anggaran sebesar Rp. 514.297.232,- dengan realisasi 0%
- qq. Kegiatan Pengawasan dan Pembinaan Peredaran Peralatan Mesin pertanian/perkebunan (UPTD Mekanisasi Pertanian).  
Kegiatan Pengawasan dan Pembinaan Peredaran Peralatan Mesin pertanian/perkebunan ini ditargetkan menyerap anggaran sebesar Rp.



65.868.000,- dengan realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp.65.868000,- (100%).

- rr. Kegiatan Pemberdayaan Keujreun Blang (P3A/GP3A) (Bidang sarana dan Prasarana).

Kegiatan Pemberdayaan Keujreun Blang (P3A/GP3A) merupakan prioritas program Dinas dengan indikator kegiatan terlaksananya Pemberdayaan Keujreun Blang (P3A/GP3A). Kegiatan ini ditargetkan menyerap anggaran sebesar Rp. 240.165.392,- dengan realisasi fisik sebesar 92,71% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 222.236.864,- (92,53%), terjadi silpa sebesar Rp. 17.928.528 (7,47%)

- ss. Kegiatan Pengadaan Alat Mesin Pertanian Pasca Panen (Migas kabupaten/kota) (Bidang Tanaman Pangan).

Kegiatan Pengadaan Alat Mesin Pertanian Pasca Panen ini memiliki anggaran sebesar Rp. 1.108.602.000,- tetapi tidak dapat terlaksana terkait Refocusing ( Pandemi COVID 19 ).

- tt. Kegiatan Pengembangan Kawasan Perkebunan Komoditi Strategis (Migas kabupaten/kota) (Bidang Perbenihan, Produksi dan Perlindungan Perkebunan).

Kegiatan Pengembangan Kawasan Perkebunan Komoditi Strategis merupakan prioritas program Dinas dengan indikator kegiatan terlaksananya pengembangan kawasan perkebunan Komoditi Strategis. Kegiatan ini ditargetkan menyerap anggaran sebesar Rp. 219.995.500,- dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 219.981.000,- (99,90%), terjadi silpa sebesar Rp. 14.500.- (0,01%).





- uu. Kegiatan Pengembangan Kawasan Perkebunan Komoditi Unggul (Migas Kabupaten/kota) (Bidang Perbenihan, Produksi dan Perlindungan Perkebunan) .

Kegiatan Pengembangan Kawasan Perkebunan Komoditi Unggul merupakan prioritas program Dinas dengan indikator kegiatan terlaksananya pengembangan kawasan perkebunan Komoditi Unggul. Kegiatan ini ditargetkan menyerap anggaran sebesar Rp. 499.932.000,- dengan realisasi 0%, tidak dapat dilaksanakan karena Refocusing terkait COVID 19.

- vv. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Usaha Perbenihan/Perbibitan Tanaman Pangan (Silpa Otsus) (Bidang Tanaman Pangan).

Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Usaha Perbenihan/Perbibitan Tanaman Pangan merupakan prioritas program Dinas dengan indikator kegiatan Terlaksananya Pembinaan dan pengembangan usaha perbenihan/perbibitan Tanaman Pangan. Kegiatan ini ditargetkan menyerap anggaran sebesar Rp. 1.548.326.894,- dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.458.374.000,- (94.19%), terjadi silpa sebesar Rp. 89.952.894.- (5,81%).

- ww. Kegiatan Pengembangan Kawasan Padi (SILPA Otsus) (Bidang Tanaman Pangan)

Kegiatan Pengembangan Kawasan Padi merupakan prioritas program Dinas dengan indikator kegiatan terlaksananya Pengembangan Kawasan Padi melalui Pengembangan Kawasan Padi. Kegiatan ini ditargetkan menyerap anggaran sebesar Rp.8.863.130.000,- dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp.7.934.782.375,- (89.53%), terjadi silpa sebesar Rp. 928.347.625.- (10,47%).



- xx. Kegiatan Pengembangan Kawasan Jagung (SILPAS) (Bidang Tanaman Pangan).

Kegiatan Pengembangan Kawasan Jagung merupakan prioritas program Dinas dengan indikator kegiatan terlaksananya Pengembangan Kawasan Jagung. Kegiatan ini ditargetkan menyerap anggaran sebesar Rp. 717.000.000,- dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 658.500.000,- (91,84%), terjadi silpa sebesar Rp. 58.500.000.- (8,16%).

- yy. Kegiatan Pengembangan Sentra Aneka Buah (SILPA) (Bidang Hortikultura).

Kegiatan Pengembangan Sentra Aneka Buah merupakan prioritas program Dinas dengan indikator kegiatan Terlaksananya Pengembangan Sentra Buah-buahan. Kegiatan ini ditargetkan menyerap anggaran sebesar Rp. 3.126.900.758,- dengan realisasi fisik sebesar 89,69% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 2.709.775.217,- (88,66%), terjadi silpa sebesar Rp. 417.125.541.- (11,34%). Capaian realisasi dari kegiatan ini tersedianya Bibit Rambutan 9.128 btg, Alpukat 2.500 btg, Durian 3.500 btg, Jambu 3.000 btg, Mangga 3.500 btg, Manggis 2.500 btg, Sirsak 2.081 btg, Jambu Bol 6.638 btg, lengkeng 3.200 btg, untuk diserahkan kepada masyarakat di beberapa kabupaten. Kegiatan dimaksud yang bersumber dari Dana SILPA Aceh.

- zz. Kegiatan Pengembangan Kawasan Tanaman Sayuran (SILPA) (Bidang Hortikultura).

Kegiatan Pengembangan Kawasan Tanaman Sayuran merupakan prioritas program Dinas dengan indikator kegiatan Terlaksananya Pengembangan Kawasan Bawang Merah. Kegiatan ini ditargetkan



menyerap anggaran sebesar Rp. 1.964.536.946,- dengan realisasi fisik sebesar 90,30% dan realisasi keuangan sebesar Rp.1.773.131.300,- (90,26%), terjadi silpa sebesar Rp. 191.405.646.- (9,74%). Capaian dari kegiatan ini adalah Budidaya Bawang merah berupa benih bawang merah varietas Brebes sebanyak 1.300 kg, Saprodi Cabe Kab.Aceh Besar 15 Ha, Saprodi tanaman Hortikultura 20 Ha, pengembangan Kawasan cabe merah 60 Ha, Pengembangan Kawasan Bawang Merah 23,5 Ha dan terlaksananya kegiatan pendukung CPCL, Pembinaan dan Monev kegiatan ke kabupaten. Kegiatan dimaksud yang bersumber dari Dana SILPA.

- aaa. Kegiatan Pemeliharaan Tanaman Perkebunan Rakyat (DBHCHT) (Bidang Perbenihan, Produksi dan Perlindungan Perkebunan).

Kegiatan Pemeliharaan Tanaman Perkebunan Rakyat merupakan prioritas program Dinas dengan indikator kegiatan terpeliharanya tanaman perkebunan milik rakyat. Kegiatan ini ditargetkan menyerap anggaran sebesar Rp. 4.841.561.284,- dengan realisasi fisik sebesar 50,43% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 2.437.420.246,- (50,34%), terjadi silpa sebesar Rp. 2.104.141.038.- (49,66%).

- bbb. Kegiatan Penyediaan Bibit Unggul Tanaman Tahunan dan Penyegar (SILPA Otsus) (Bidang Perbenihan, Produksi dan Perlindungan Perkebunan).

Kegiatan Penyediaan Bibit Unggul Tanaman Tahunan dan Penyegar ditargetkan menyerap anggaran sebesar Rp. 519.119.527,- tetapi tidak terealisasi karena Refocusing terkait Pandemi COVID 19.

- ccc. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Usaha Perbenihan/ Perbibitan Perkebunan (SILPA Otsus) (Bidang Perbenihan, Produksi dan Perlindungan Perkebunan).



Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Usaha Perbenihan/Perbibitan Perkebunan ditargetkan menyerap anggaran sebesar Rp. 5.640.111.609,- dengan realisasi 0%, tidak dapat dilaksanakan karena Refocusing terkait Pandemi COVID 19.

ddd. Kegiatan Pengembangan Kawasan Perkebunan Komoditi Strategis (SILPA)(Bidang Perbenihan, Produksi dan Perlindungan Perkebunan).

Kegiatan Pengembangan Kawasan Perkebunan Komoditi Strategis merupakan prioritas program Dinas dengan indikator kegiatan terlaksananya pengembangan kawasan perkebunan Komoditi Strategis. Kegiatan ini ditargetkan menyerap anggaran sebesar Rp.9.556.127.500,- dengan realisasi fisik sebesar 91,69% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 8.723.343.750,- (91,20%), terjadi silpa sebesar Rp. 832.783.750.- (8,80%).

eee. Kegiatan Pengembangan Kawasan Perkebunan Komoditi Unggul (SILPA)(Bidang Perbenihan, Produksi dan Perlindungan Perkebunan) .

Kegiatan Pengembangan Kawasan Perkebunan Komoditi Unggul merupakan prioritas program Dinas dengan indikator kegiatan terlaksananya pengembangan kawasan perkebunan Komoditi Unggul. Kegiatan ini ditargetkan menyerap anggaran sebesar Rp. 6.506.510.250,- dengan realisasi fisik sebesar 94,16% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 6.106.062.125,- (93,85%), terjadi silpa sebesar Rp. 400.448.125.- (6,15%).

fff. Kegiatan Rehabilitasi Tanaman Perkebunan Rakyat (SILPA Otsus) (Bidang Perbenihan, Produksi dan Perlindungan Perkebunan).

Kegiatan Rehabilitasi Tanaman Perkebunan Rakyat ini ditargetkan menyerap anggaran sebesar Rp.1.199.986.847,- dengan realisasi 0% karena tidak dapat dilaksanakan akibat dari Refocusing terkait



Pandemi COVID 19, Kegiatan dimaksud yang bersumber dari Dana SILPA Otsus Aceh.

- ggg. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Usaha Perkebunan Besar (DBH) (Bidang Pengolahan dan Pemasaran Perkebunan).

Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Usaha Perkebunan Besar merupakan prioritas program Dinas dengan indikator kegiatan terlaksananya pembinaan usaha perkebunan besar. Kegiatan ini ditargetkan menyerap anggaran sebesar Rp. 219.715.577,- dengan realisasi fisik sebesar 94,63% dan realisasi keuangan sebesar Rp.202.438.671,- (92,14%), terjadi silpa sebesar Rp. 17.276.906,- (7,86%).

- hhh. Kegiatan Optimasi Lahan Pertanian (SILPA) (Bidang Sarana dan Prasarana).

Kegiatan Optimasi Lahan Pertanian merupakan prioritas program Dinas dengan indikator kegiatan terlaksananya Optimasi Lahan Pertanian. Kegiatan ini ditargetkan menyerap anggaran sebesar Rp.5.517.262.460,- dengan realisasi fisik sebesar 99,32% dan realisasi keuangan sebesar Rp.5.475.305.905,- (99,24%), terjadi silpa sebesar Rp. 41.956.555,- (0,76%).

- iii. Kegiatan Pengadaan Alat Mesin Pertanian Pra Panen (SILPA Otsus) (Bidang Sarana dan Prasarana).

Kegiatan Pengadaan Alat Mesin Pertanian Pra Panen ini ditargetkan menyerap anggaran sebesar Rp.352.385.280,- dengan



realisasi 0%, tidak dapat dilaksanakan karena Refocusing terkait Pandemi COVID 19.

- jjj. Kegiatan Pengadaan Alat Mesin Pertanian Pra Panen (SILPA) (Bidang Sarana dan Prasarana).

Kegiatan Pengadaan Alat Mesin Pertanian Pra Panen merupakan prioritas program Dinas dengan indikator kegiatan terlaksananya Pengadaan Alat Mesin Pertanian Pra Panen. Kegiatan ini ditargetkan menyerap anggaran sebesar Rp. 659.700.000,- dengan realisasi fisik sebesar 74,64% dan realisasi keuangan sebesar Rp.492.381.000,- (74,64%), terjadi silpa sebesar Rp. 167.319.000.- (25,36%).

- kkk. Kegiatan Peningkatan Prasarana Pertanian (Otsus) (Bidang sarana dan Prasarana).

Kegiatan Peningkatan Prasarana Pertanian ini ditargetkan menyerap anggaran sebesar Rp.999.722.000,- dengan realisasi 0%, tidak terlaksana akibat Refocusing terkait Pandemi COVID 19. Kegiatan dimaksud yang bersumber dari Dana Otsus.

- lll. Kegiatan Peningkatan Prasarana Pertanian (SILPA) (Bidang sarana dan Prasarana).

Kegiatan Peningkatan Prasarana Pertanian merupakan prioritas program Dinas dengan indikator kegiatan terlaksananya Peningkatan Prasarana Pertanian. Kegiatan ini ditargetkan menyerap anggaran sebesar Rp. 5.252.448.320,- dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp.5.222.069.000,- (99,43%), terjadi silpa sebesar Rp.30.379.320.- (0,57%).

- mmm. Kegiatan Peningkatan Prasarana Perkebunan (SILPA) (Bidang Sarana dan Prasara).



Kegiatan Peningkatan Prasarana Perkebunan merupakan prioritas program Dinas dengan indikator kegiatan terlaksananya Peningkatan Prasarana Perkebunan. Kegiatan ini ditargetkan menyerap anggaran sebesar Rp.13.075.767.600,- dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp.12.575.781.300,- (96,18%), terjadi silpa sebesar Rp. 499.986.300 (3,82%).

- nnn. Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana UPT Proteksi TPH dan Perkebunan(DAK) (UPTD Balai Proteksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan).

Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana UPT Proteksi TPH dan Perkebunan merupakan prioritas program Dinas dengan indikator kegiatan terlaksananya Peningkatan Sarana dan Prasarana UPTD Proteksi TPH dan Perkebunan. Kegiatan ini ditargetkan menyerap anggaran sebesar Rp.1.996.080.000- dengan realisasi fisik sebesar 27,65% dan realisasi keuangan sebesar Rp.551.920.000,- (27,65%), terjadi silpa sebesar Rp. 1.444.160.000.- (72,35%).

- ooo. Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih TPH dan Perkebunan (DAK) (UPTD Balai Benih Pengawasan dan Sertifikasi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan).

Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih TPH dan Perkebunan merupakan prioritas program Dinas dengan indikator kegiatan terlaksananya Peningkatan Sarana dan Prasarana UPTD Balai Benih Pengawasan dan Sertifikasi TPH dan Perkebunan. Kegiatan ini ditargetkan menyerap anggaran sebesar Rp.1.623.312.000,- dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi



keuangan sebesar Rp.467.749.000,- (28,81%), terjadi silpa sebesar Rp. 1.155.563.000,- (71,19%).

- ppp. Kegiatan Penyelenggaraan BLUD Mekanisasi Pertanian (SILPA BLUD) (UPTD Mekanisasi Pertanian).

Kegiatan Penyelenggaraan BLUD Mekanisasi Pertanian merupakan prioritas program Dinas dengan indikator kegiatan terlaksananya Penyelenggaraan BLUD Mekanisasi Pertanian. Kegiatan ini ditargetkan menyerap anggaran sebesar Rp. 200.000.000,- realisasi keuangan sebesar 0% Tidak dilaksanakan disebabkan karena peraturan pelaksanaan kegiatan BLUD belum tersedia.

- qqq. Kegiatan Pengembangan Kawasan Padi (Migas Kabupaten/Kota) (Bidang Tanaman Pangan)

Kegiatan Pengembangan Kawasan Padi merupakan prioritas program Dinas dengan indikator kegiatan terlaksananya Pengembangan Kawasan Padi melalui Pengembangan Kawasan Padi. Kegiatan ini ditargetkan menyerap anggaran sebesar Rp.423.192.500,- dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp.422.804.250,- (99,91%), terjadi silpa sebesar Rp.388.250,- (0,09%).

### **3. Program Perencanaan pembangunan Ekonomi**

- a. Kegiatan Perencanaan Pembangunan Pertanian Tanaman Pangan (Sekretariat). Kegiatan ini ditargetkan menyerap anggaran Rp.1.722.350.962,- dengan realisasi fisik sebesar 86,46% dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.445.398.690,- (83,92%) terjadi silpa sebesar Rp. 276.952.272,- (16,08%).





- b. Kegiatan Perencanaan Pembangunan Perkebunan (Sekretariat). Kegiatan ini ditargetkan menyerap anggaran Rp.643.315.944,- dengan realisasi fisik sebesar 87,39% dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 551.480.237,- (85,72%) terjadi silpa sebesar Rp.91.835.707,- (14,28%).
- c. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Pertanian TPH (Sekretariat). Kegiatan ini ditargetkan menyerap anggaran Rp.535.835.157,- dengan realisasi fisik sebesar 55,77% dengan realisasi keuangan sebesar Rp.297.598.800,- (55,54%) terjadi silpa sebesar Rp.238.236.357,- (44,46%).
- d. Kegiatan Penyusunan Data Statistik dan Informasi Pertanian TPH (Sekretariat). Kegiatan ini ditargetkan menyerap anggaran Rp.561.273.921,- dengan realisasi fisik sebesar 84,95% dengan realisasi keuangan sebesar Rp.476.676.519,- (84,93%) terjadi silpa sebesar Rp.84.597.402,- (15,07%).
- e. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Perkebunan (Sekretariat). Kegiatan ini ditargetkan menyerap anggaran Rp.398.492.721,- dengan realisasi fisik sebesar 48,01% dengan realisasi keuangan sebesar Rp.191.039.600,- (47,94%) terjadi silpa sebesar Rp.207.453.121,- (52,06%).
- f. Kegiatan Penyusunan Data Statistik dan Informasi Perkebunan (Sekretariat). Kegiatan ini ditargetkan menyerap anggaran Rp.966.169.464,- dengan realisasi fisik sebesar 88,27% dengan



realisasi keuangan sebesar Rp.843.478.598,- (87,30%) terjadi silpa sebesar Rp.122.690.866,-(12,70%).

#### **4. Program Pengembangan dan Peningkatan Penyuluhan.**

- a. Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Diklat Pertanian (Bidang penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Perkebunan).

Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Diklat Pertanian merupakan dukungan prioritas program Dinas dengan indikator kegiatan terlaksananya Peningkatan Sarana dan Prasarana Diklat Pertanian. Kegiatan ini ditargetkan menyerap anggaran sebesar Rp.510.885.272,- dengan realisasi fisik sebesar 98,89% dan realisasi keuangan sebesar Rp.496.345.950,- (97.15%), terjadi silpa sebesar Rp.14.539.322,-(2,85%).

- b. Kegiatan Pendidikan Kejuruan Pertanian (Bidang penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Perkebunan).

Kegiatan Pendidikan Kejuruan Pertanian merupakan dukungan prioritas program Dinas dengan indikator kegiatan terlaksananya Pendidikan Kejuruan Pertanian. Kegiatan ini ditargetkan menyerap anggaran sebesar Rp. 6.745.040.264,- dengan realisasi fisik sebesar 62,49% dan realisasi keuangan sebesar Rp.4.208.203.118,- (62,39%), terjadi silpa sebesar Rp.2.536.837.146,-(37,61%). Kegiatan ini dilakukan melalui peningkatan SDM Pertanian dengan rencana target capaian kinerja 3 SMK-PP Aceh. Kegiatan dimaksud yang bersumber dari Dana Otsus Aceh dan SILPA Otsus.

- c. Kegiatan Penyuluhan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna (Bidang penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Perkebunan).



Kegiatan Penyuluhan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna merupakan dukungan prioritas program Dinas dengan indikator kegiatan terlaksananya Penyuluhan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna melalui pengadaan sarana dan prasarana, teknologi pertanian/perkebunan tepat guna. Kegiatan ini ditargetkan menyerap anggaran sebesar Rp.1.790.997.299,- dengan realisasi fisik sebesar 94,50% dan realisasi keuangan sebesar Rp.1.639.308.750,-(91,53%), terjadi silpa sebesar Rp. 151.688.549,- (8,47%). Dengan target capaian kinerja 23 Kabupaten/Kota dan 2 Kegiatan. Kegiatan dimaksud yang bersumber dari Dana Otsus Aceh.

- d. Kegiatan Pendidikan bagi Penyuluh Pertanian (Bidang penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Perkebunan).  
Kegiatan Pendidikan bagi penyuluh pertanian merupakan dukungan prioritas program Dinas dengan indikator kegiatan terlaksananya Penyuluh yang berkualitas. Kegiatan ini ditargetkan menyerap anggaran sebesar Rp.532.520.649,- dengan realisasi fisik sebesar 89,91% dan realisasi keuangan sebesar Rp.464.116.822,-(87,15%), terjadi silpa sebesar Rp.68.403.827,- (12,85%).
- e. Kegiatan IPDMIP: (Integrated Participatory DSevelopment and Management of Irrigation Programe) Bidang Pertanian (Bidang penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Perkebunan).  
Kegiatan SIPDMIP merupakan dukungan prioritas program Dinas dengan ditargetkan menyerap anggaran sebesar Rp. 244.774.104,- dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp.234.209.600,-(95,68%), terjadi silpa sebesar Rp.10.564.504,- (4,32%).



- f. Kegiatan Updating Data dan Informasi Penyuluh Pertanian (Bidang penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Perkebunan).  
Kegiatan Updating Data dan Informasi Penyuluh Pertanian merupakan dukungan prioritas program Dinas dengan indikator kegiatan terlaksananya Update data dan informasi Penyuluh Pertanian melalui Sinkronisasi dan Upgrading Data Penyuluhan Pertanian. Kegiatan ini ditargetkan menyerap anggaran sebesar Rp.424.113.931,- dengan realisasi fisik sebesar 94,22% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 399.011.150,- (94,08%), terjadi silpa sebesar Rp.25.102.781,-(5,92%).
- g. Kegiatan Supervisi Penyuluhan Pertanian (Bidang penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Perkebunan).  
Kegiatan Supervisi Penyuluhan Pertanian merupakan dukungan prioritas program Dinas dengan indikator kegiatan terlaksananya Penyuluhan Pertanian yang berinovasi tinggi. Kegiatan ini ditargetkan menyerap anggaran sebesar Rp.39.519.850,- dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp.39.109.600,- (98,96%), terjadi silpa sebesar Rp.410.250,- (1,04%).
- h. Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Penyuluhan (Migas kabupaten/kota) (Bidang Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Perkebunan).  
Kegiatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan merupakan dukungan prioritas program Dinas dengan indikator kegiatan terlaksananya Pengembangan Sarana dan Prasarana Penyuluhan. Kegiatan ini ditargetkan menyerap anggaran sebesar Rp. 1.948.602.877,- dengan realisasi 0%, kegiatan ini tidak dapat terlaksana karena Refocusing



terkait Pandemi COVID 19. Kegiatan dimaksud yang bersumber dari Dana Migas Kabupaten / kota.

- i. Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Penyuluhan (SILPA Otsus) (Bidang Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Perkebunan).

Kegiatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan ini direncanakan menyerap anggaran Rp.1.524.957.481,- dengan realisasi 0% juga tidak terlaksana dikarenakan Refocusing terkait Pandemi COVID 19.

- j. Kegiatan Penyuluhan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna (SILPA) (Bidang penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Perkebunan).

Kegiatan Penyuluhan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna merupakan dukungan prioritas program Dinas dengan indikator kegiatan terlaksananya Penyuluhan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna melalui pengadaan sarana dan prasarana, teknologi pertanian/perkebunan tepat guna. Kegiatan ini ditargetkan menyerap anggaran sebesar Rp.4.303.572.707,- dengan realisasi 0% karena tidak terlaksana akibat dari Refocusing terkait Pandemi COVID 19. Kegiatan dimaksud yang bersumber dari Dana SILPA.

- k. Kegiatan Pendidikan bagi Penyuluh Pertanian (SILPA Otsus) (Bidang penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Perkebunan).

Kegiatan Pendidikan bagi penyuluh pertanian merupakan dukungan prioritas program Dinas dengan indikator kegiatan terlaksananya Penyuluh yang berkualitas. Kegiatan ini ditargetkan menyerap anggaran sebesar Rp.1.550.089.919,- dengan realisasi 0% tidak terlaksana karena Refocusing terkait Pandemi COVID 19.

Berdasarkan hasil evaluasi yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2018



serta perkiraan capaian program dan kegiatan tahun 2019, dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh sebagai berikut:

1. Perencanaan pembangunan melalui pendekatan teknokratis, partisipatif, politis, *top down*, *bottom-up* dan *money follow program* dilakukan belum maksimal.
2. Keterbatasan data dan informasi;
3. Belum optimalnya kemampuan sumber daya manusia;
4. Belum optimalnya koordinasi antar Kabupaten/Kota;
5. Belum dipahaminya secara utuh tentang output yang ingin dicapai dari setiap kegiatan, sehingga masih adanya kesulitan merealisasikan sasaran program menjadi outcome kegiatan yang menunjang efektivitas program/kegiatan ;
6. Perlunya peningkatan komitmen dan pemahaman untuk mempedomani indikasi kegiatan dalam Renstra, RKPA maupun dalam RPJMA dalam merencanakan kegiatan.
7. Dalam melaksanakan kegiatan setiap penanggung jawab kegiatan untuk tidak bertumpu pada pencapaian realisasi fisik dan keuangan semata, akan tetapi perlu evaluasi lebih mendalam terhadap pencapaian realisasi manfaat dari pelaksanaan setiap kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.
8. Perlu merencanakan kegiatan kedepannya untuk dilakukan evaluasi dan monitoring terhadap kegiatan yang telah dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya.
9. Kegiatan yang bersumber dana dari DOKA Kabupaten/Kota yang terdapat didalam DPA APBA rata-rata sulit dapat dilaksanakan disebabkan salah penempatan rekening, penjabaran rincian tidak sesuai dengan nomenklatur,

Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan yang dilaksanakannya, menjadi hal yang mutlak dilakukan



secara sistematis dan terstruktur. Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh menyadari bahwa masih ada kelemahan/kekurangan yang harus diperbaiki dan dilakukan untuk mencapai kinerja yang lebih baik. Untuk itu perlu dilakukan evaluasi terhadap apa yang telah dilaksanakan guna mengetahui penyebab kekurangan/kegagalan tersebut sebagai umpan balik/*feed back* dari apa yang telah dan akan dilaksanakan.

Dari seluruh program/kegiatan tersebut dapat terealisasi fisik sebesar 81,86% dan realisasi keuangan sebesar 81,86% dari target yang harus dicapai sebesar 100%.

b. Kebijakan/tindakan perencanaan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Pada faktor-faktor penyebab tersebut di atas maka Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh melakukan kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil sebagai berikut :

- Melakukan Monitoring, Evaluasi atas pelaksanaan kegiatan dan pekerjaan yang dianggap kurang optimal pelaksanaannya.

Monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan dan pekerjaan dengan hasil evaluasi bahwa dari kegiatan pelaksanaan anggaran yang dirasakan masih adanya keterlambatan realisasi pertanggungjawaban keuangan, namun dalam pelaksanaan kegiatan relatif sesuai jadwal yang ditentukan pada tahun bersangkutan.

- Menganalisa data dan permasalahan yang ada

Menganalisa data dan permasalahan yang ada dalam pelaksanaan kegiatan, pada kegiatan peningkatan prasarana pertanian dan perkebunan dirasakan masih terdapat kendala dalam hal tahapan prosedur administrasi perencanaan dan penyiapan lahan, dan analisa



dampak lingkungan maupun kajian terhadap peningkatan prasarana pertanian dan perkebunan belum dilaksanakan dalam hal mitigasi resiko bencana maupun dampak lain yang ditimbulkan yang dapat merugikan masyarakat.

- Mengambil kebijakan/tindakan untuk memperkecil resiko/akibat dari permasalahan yang ada.

Aspek kerugian negara diupayakan risikonya dapat diminimalisir. kebijakan/tindakan untuk memperkecil resiko/akibat dari permasalahan yang ada senantiasa dilakukan dengan mengikuti prosedur dan sistem sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.

- Mengusulkan anggaran lanjutan untuk kegiatan yang diperkirakan tidak akan selesai pada tahun bersangkutan.

Apabila terdapat kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan atau tidak selesai dilaksanakan pada tahun bersangkutan karena suatu hal maka kegiatan diusulkan anggaran lanjutan.

Kegiatan yang akan diusulkan harus dikaji dulu permasalahannya apakah karena gagal lelang, pelaksanaan terlambat, atau faktor lain yang mengakibatkan pelaksanaan kegiatan tidak dapat dilaksanakan.



**RENCANA KERJA (RENJA)**  
**DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN ACEH**  
**TAHUN 2022**



Tabel T-C.29

**EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPA DAN PENCAPAIAN RENSTRA SKPA S/D TAHUN 2020**

Nama SKPA : Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA TAHUN 2017-2022)		TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2020			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA SKPA TAHUN 2022)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN BERJALAN (2021)	
					TARGET RENJA SKPA TAHUN 2020	REALISASI RENJA SKPA TAHUN 2020	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D 2021	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7=6/5)	(8)	(9=4+6+7)	(10=9/3)	
<b>2.00.03.2.00.03..00</b>	<b>NON PROGRAM</b>									
	Belanja Tidak Langsung	Terlaksananya pembayaran gaji dan hak-hak pegawai	718	Org	718	718	100			
<b>2.00.03.2.00.03.01.01</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>									
2.00.03.2.00.03.01.01.001	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyampaian Pelayanan Jasa Surat Dalam Percepatan Proses Administrasi	12	Bln	12	12	100			
2.00.03.2.00.03.01.01.002	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya Peningkatan Kualitas Pelayanan	12	Bln	12	12	100			
2.00.03.2.00.03.01.01.003	Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya peningkatan perlengkapan dan peralatan kantor	12	Bln	12	12	100			
2.00.03.2.00.03.01.01.006	Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya kenyamanan kinerja aparatur dalam rangka proses pelayanan public	12	Bln	12	12	100			
2.00.03.2.00.03.01.01.008	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terlaksananya Peningkatan Kualitas Pelayanan	12	Bln	12	12	100			
2.00.03.2.00.03.01.01.010	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terlaksananya peningkatan kebutuhan ATK pegawai	12	Bln	12	12	100			
2.00.03.2.00.03.01.01.011	Kegiatan Pengadaan barang cetakan dan penggandaan	Peningkatan pengadaan barang cetakan	12	Bln	12	12	100			
2.00.03.2.00.03.01.01.012	Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	tersedianya kebutuhan alat penerangan gedung kantor	12	Bln	12	12	100			
2.00.03.2.00.03.01.01.015	Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Meningkatnya kinerja sumberdaya aparatur pemerintah	12	Bln	12	12	100			
2.00.03.2.00.03.01.01.017	Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman	terwujudnya peningkatan kualitas kinerja dan pelayanan kepada publik dan makan siswa	12	Bln	12	12	100			
2.00.03.2.00.03.01.01.018	Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	terlaksananya sinkronisasi dalam pencapaian kinerja yang tepat waktu dan tepat sasaran	12	Bln	12	12	100			
2.00.03.2.00.03.01.01.022	Kegiatan Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	memberikan kemudahan dalam proses pelayanan dan percepatan administrasi perkantoran	12	Bln	12	12	100			
<b>2.00.03.2.00.03.01.02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>									
2.00.03.2.00.03.01.02.003	Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor	Terlaksananya pembangunan gedung kantor sebagai fasilitas kinerja aparatur didalam percepatan pelayanan publik	31	Pkt	16	16	100			
2.00.03.2.00.03.01.02.007	Kegiatan Pengadaan perlengkapan gedung kantor	tersedianya perlengkapan gedung kantor	34	Keg	10	10	100			
2.00.03.2.00.03.01.02.022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung perkantoran	Terpeliharanya gedung perkantoran yang merupakan aset daerah	16	Unit	12	12	100			
2.00.03.2.00.03.01.02.042	Kegiatan rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor	terpeliharanya gedung kantor sebagai aset daerah untuk menunjang kinerja aparatur dalam percepatan pelayanan masyarakat	46	Pkt	14	14	100			
<b>2.00.03.2.00.03.01.03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>									
2.00.03.2.00.03.01.03.002	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	Terciptanya keseragaman identitas dan disiplin pegawai Dinas. 4 UPTD dan 3 sekolah kedinasan	2.766	Stel	2.766	2766	100			
<b>2.00.03.2.00.03.01.05</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>									
2.00.03.2.00.03.01.05.001	Kegiatan pendidikan dan Pelatihan Formal	Terciptanya motivasi, sumber daya Aparatur yang profesional dalam pelayanan publik	24	Keg	6	6	100			
2.00.03.2.00.03.01.05.002	Kegiatan Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Tersosialisasinya ketentuan menurut peraturan dan perundang-undangan yang berlaku	24	Keg	6	6	100			
<b>3.27.01.</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>									
3.27.01.1.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Laporan Capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu (Lakip, Renja, Laporan Keuangan, Laporan Realisasi, DLL di bagi dengan Total Laporan Wajib)								
3.27.01.1.01.04.	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD.	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan, Data Statistik dan Informasi Pertanian.	23	Kab./Kota			18 Dok.	12 Bln	100	
3.27.01.1.01.06.	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya Evaluasi Program/Kegiatan	23	Kab./Kota			20 Dok.	23 Kab./Kota	100	
<b>3.27.01.1.02</b>	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan</b>								
3.27.01.1.02.01.	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya pembayaran gaji dan hak- hak pegawai	718	Org			995 Org	12 Bln	100	

# RENCANA KERJA (RENJA)

## DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN ACEH

### TAHUN 2022



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7=6/5)	(8)	(9=4+6+)	(10=9/3)
<b>3.27.01.1.05</b>	<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Aparatur yang memenuhi Kompetensi</b>							100
3.27.01.1.05.02.	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Terciptanya keseragaman identitas dan disiplin pegawai Dinas	1038	Stel					100
3.27.01.1.05.09.	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Tercapainya motivasi, sumber daya aparatur yang profesional dalam pelayanan publik	100	Org			23 Org.	11 Org	100
3.27.01.1.05.10.	Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya sosialisasi menurut peraturan dan perundang-undangan yang berlaku	12	Bln			5 keg	12 Bln	100
<b>3.27.01.1.06</b>	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Tingkat Kelengkapan Saran dan Prasarana Aparatur</b>							
3.27.01.1.06.01.	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya kebutuhan instalasi listrik dan alat penerangan gedung kantor	12	Bln			12 Bln	12 Bln	100
3.27.01.1.06.04.	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terlaksananya Penediaan kebutuhan ATK, Makan dan minum	12	Bln			12 Bln	12 Bln	100
3.27.01.1.06.05.	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terlaksananya Penyediaan Barang Cetak	12	Bln			12 Bln	12 Bln	100
3.27.01.1.06.06.	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12	Bln			12 Bln	12 Bln	100
3.27.01.1.06.09.	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya sinkronisasi, Koordinasi dan Konsultasi dalam pencapaian kinerja yang tepat waktu dan tepat sasaran	12	Bln			12 Bln	12 Bln	100
<b>3.27.01.1.07</b>	<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Tingkat Kelengkapan Saran dan Prasarana Aparatur</b>							
3.27.01.1.07.09.	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya gedung kantor	12	Bln			10 Unit	10 Unit	100
3.27.01.1.07.10.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	12	Bln			12 pkt	11 Unit	100
<b>3.27.01.1.08</b>	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah</b>							
3.27.01.1.08.01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang terkirim					12 Bln	12 Bln	100
3.27.01.1.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik selamasatu tahun	12	Bln			12 Bln	12 Bln	100
3.27.01.1.08.03.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya Peningkatan Perlengkapan dan Peralatan Kantor	12	Bln			12 Bln	12 Bln	100
3.27.01.1.08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa tenang administrasi/ Teknis Kegiatan terlaksananya peningkatan kualitas pelayanan	12	Bln			12 Bln	12 Bln	100
<b>3.27.01.1.09</b>	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Tingkat Kelengkapan Saran dan Prasarana Aparatur</b>							
3.27.01.1.09.02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya Peningkatan kinerja aparaturnya dalam pelayanan publik	12	Bln			437 unit	12 Bln	100
3.27.01.1.09.09.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya rehabilitasi gedung Terpeliharanya gedung perkantoran yang merupakan aset daerah	12	Bln			13 pkt	12 Bln	100
<b>3.27.01.1.10</b>	<b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>								
3.27.01.1.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Terlaksananya Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD					12 Bln		
<b>2.00.03.2.00.03.01.15</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KEJAHTERAAN PETANI</b>								
2.00.03.2.00.03.01.15.001	Kegiatan Pelatihan petani dan pelaku agribisnis	Terlaksananya Pelatihan petani dan pelaku agribisnis pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.	142	Kls	40	11	28		
2.00.03.2.00.03.01.15.013	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Tani melalui Pelatihan Teknologi Tepat Guna	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Tani melalui Pelatihan Teknologi Tepat Guna	40	Klp	4	9	225		
2.00.03.2.00.03.01.15.016	Kegiatan Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil Tanaman Semusim dan Rempah	Terlaksananya Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil Tanaman Semusim dan Rempah	19	Unit	21	6	29		
2.00.03.2.00.03.01.15.017	Kegiatan Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil tanaman tahunan dan penyegar	Terlaksananya Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil tanaman tahunan dan penyegar	96	Unit	9	9	100		
2.00.03.2.00.03.01.15.018	Kegiatan Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil tanaman pangan	Terlaksananya Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil tanaman pangan.	16	Keg	5	2	40		
2.00.03.2.00.03.01.15.019	Kegiatan Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil tanaman hortikultura	Terlaksananya Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil tanaman hortikultura	8	Kawasan	4	1	25		
2.00.03.2.00.03.01.15.020	Kegiatan Promosi atas hasil perkebunan unggulan daerah	Terlaksananya Promosi atas hasil perkebunan unggulan daerah	32	Keg	7	2	29		
2.00.03.2.00.03.01.15.021	Kegiatan Promosi dan pemasaran hasil tanaman pangan	Terlaksananya Promosi dan pemasaran hasil tanaman pangan	19	Keg	6	3	50		
2.00.03.2.00.03.01.15.022	Kegiatan Promosi dan pemasaran hasil tanaman hortikultura	Terlaksananya Promosi dan pemasaran hasil tanaman hortikultura	20	Keg	2	3	150		
2.00.03.2.00.03.01.15.023	Kegiatan Peningkatan Kelembagaan dan SDM Petani.	Terlaksananya Peningkatan Kelembagaan dan SDM Petani	22	Kab./Kota	8	8	100		
<b>3.27.02.</b>	<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN</b>								
<b>3.27.02.1.01.</b>	<b>Kegiatan Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian</b>	<b>Meningkatnya indeks yang diterima petani (It) Tanaman Pangan / Hortikultura / Perkebunan</b>							
3.27.02.1.01.01.	Sub Kegiatan Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Terlaksananya peredaran pupuk bersubsidi	22	Kab./Kota			5000 Ha	23 Kab/Kota	100
3.27.02.1.01.02.	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Terlaksananya Pengawasan dan pembinaan peredaran peralatan mesin pertanian/perkebunan	22	Kab./Kota			6 Keg	23 Kab/Kota	100

# RENCANA KERJA (RENJA)

## DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN ACEH

### TAHUN 2022



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7=6/5)	(8)	(9=4+6+7)	(10=9/3)
<b>3.27.02.1.02.</b>	<b>Kegiatan Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman</b>	<b>Meningkatnya indeks yang diterima petani (It) Tanaman Pangan / Hortikultura / Perkebunan</b>							
3.27.02.1.02.01.	Sub Kegiatan Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	Terlaksananya Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih Unggul Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	22	Kab./Kota			3 keg	22 Kab/Kota	100
3.27.02.1.02.02.	Sub Kegiatan Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	Terlaksananya Pembinaan dan pengembangan usaha perbenihan/perbibitan Tanaman Hortikultura Terlaksananya Pengendalian Organisme Pengganggu tanaman	22	Kab./Kota			4 keg	11Komoditi	100
3.27.02.1.02.03.	Sub Kegiatan Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan	Terlaksananya Pengembangan Kawasan Padi (MT Gadu).	22	Kab./Kota			9 Keg	22 Kab/Kota	100
3.27.02.1.02.04.	Sub Kegiatan Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	Terlaksananya Penyediaan Bibit Tanaman Perkebunan	22	Kab./Kota			13 Keg	15 Komoditi	100
<b>3.27.02.1.03.</b>	<b>Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi</b>	<b>Meningkatnya indeks yang diterima petani (It) Tanaman Pangan / Hortikultura / Perkebunan</b>							
3.27.02.1.03.04.	Sub Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	Tersedianya benih sumber tanaman pangan, tanaman hortikultura dan tanaman perkebunan	22	Kab./Kota			7 keg	11 Komoditi	100
<b>2.00.03.2.00.03.01.19</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN PERKEBUNAN</b>								
2.00.03.2.00.03.01.19.038	Kegiatan Pemeliharaan Tanaman Perkebunan Rakyat	Terlaksananya Pemeliharaan Tanaman Perkebunan Rakyat	20.090	Ha	1.655	1.190	72		
2.00.03.2.00.03.01.19.039	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Usaha Perkebunan Besar	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan usaha perkebunan besar	23	Kab	150	2	1		
2.00.03.2.00.03.01.19.043	Kegiatan Pengembangan Perbenihan/Perbibitan Tanaman Pangan	Terlaksananya Pengembangan Perbenihan/Perbibitan Tanaman Pangan	3	Kmdt	39	3	8		
2.00.03.2.00.03.01.19.044	Kegiatan Peningkatan sarana dan prasarana perbenihan tanaman pangan	Terlaksananya Peningkatan sarana dan prasarana perbenihan tanaman pangan	725	Ha	39	3	8		
2.00.03.2.00.03.01.19.046	Kegiatan Peningkatan sarana dan prasarana perbenihan tanaman hortikultura	Terlaksananya Peningkatan sarana dan prasarana perbenihan tanaman hortikultura	36	Paket	10	1	10		
2.00.03.2.00.03.01.19.047	Kegiatan Pengembangan Perbenihan/Perbibitan Tanaman Hortikultura	Terlaksananya Pengembangan Perbenihan/Perbibitan Tanaman Hortikultura	5	Kmdt	10	10	100		
2.00.03.2.00.03.01.19.048	Kegiatan Penyediaan Bibit Unggul Tanaman Tahunan dan Penyegar	Terlaksananya Penyediaan Bibit Unggul Tanaman Tahunan dan Penyegar	5	Kmdt	394.950	372.126	94,22		
2.00.03.2.00.03.01.19.049	Kegiatan Penyediaan Bibit Unggul Tanaman Semusim dan Rempah	Terlaksananya Penyediaan Bibit Unggul Tanaman Semusim dan Rempah	3	Kmdt	465.000	2.645	0,57		
2.00.03.2.00.03.01.19.050	Kegiatan Pembinaan dan pengembangan usaha perbenihan/perbibitan perkebunan	Terlaksananya Pembinaan dan pengembangan usaha perbenihan/perbibitan perkebunan	5	Keg	17	2	11,76		
2.00.03.2.00.03.01.19.051	Kegiatan Pengembangan dan Penguatan Desa Mandiri benih Padi	Terlaksananya Pengembangan dan Penguatan Desa Mandiri benih Padi	60	Ha	690	690	100,00		
2.00.03.2.00.03.01.19.052	Kegiatan Pembinaan dan pengembangan usaha perbenihan/perbibitan Tanaman Pangan	Terlaksananya Pembinaan dan pengembangan usaha perbenihan/perbibitan Tanaman Pangan	2.600	Ha	475	15	3,16		
2.00.03.2.00.03.01.19.053	Kegiatan Pembinaan dan pengembangan usaha perbenihan/perbibitan Tanaman Hortikultura	Terlaksananya Pembinaan dan pengembangan usaha perbenihan/perbibitan Tanaman Hortikultura	11	Kmdt	12	12	100,00		
2.00.03.2.00.03.01.19.054	Kegiatan Optimalisasi lahan pertanian	Terlaksananya Optimalisasi lahan pertanian	4.000	Ha	200	130	65,00		
2.00.03.2.00.03.01.19.055	Kegiatan Perluasan Areal Pertanian	Terlaksananya Perluasan Areal Pertanian	1.000	Ha	200	200	100,00		
2.00.03.2.00.03.01.19.056	Kegiatan Pengadaan Alat Mesin Pertanian Prapanen	Terlaksananya Pengadaan Alat Mesin Pertanian Prapanen	240	Unit	2.737	10	0,37		
2.00.03.2.00.03.01.19.057	Kegiatan Pengadaan Alat Mesin Pertanian Pasca Panen	Terlaksananya Pengadaan Alat Mesin Pertanian Pasca Panen	135	Unit	111	100	90,09		
2.00.03.2.00.03.01.19.058	Kegiatan Peningkatan Prasarana Pertanian	Terlaksananya Peningkatan Prasarana Pertanian	12	Keg	17.950	4.040	22,51		
2.00.03.2.00.03.01.19.059	Kegiatan Peningkatan Prasarana Perkebunan	Terlaksananya Peningkatan Prasarana Perkebunan	8	Keg	111.596	100.000	89,61		
2.00.03.2.00.03.01.19.062	Kegiatan Peningkatan sarana dan prasarana UPTD Mekanisasi Pertanian	Terlaksananya Peningkatan sarana dan prasarana UPTD Mekanisasi Pertanian	32	Keg	1	1	100,00		
2.00.03.2.00.03.01.19.063	Kegiatan Penyelenggaraan BLUD Mekanisasi Pertanian	Terselenggaranya BLUD Mekanisasi Pertanian	4	Keg	1	0	0,00		
2.00.03.2.00.03.01.19.064	Kegiatan Pengembangan kawasan padi	Terlaksananya Pengembangan kawasan padi	280.000	Ha	40.000	35.000	87,50		
2.00.03.2.00.03.01.19.065	Kegiatan Pengembangan kawasan jagung	Terlaksananya Pengembangan kawasan jagung	31.500	Ha	40.090	12.900	32,18		
2.00.03.2.00.03.01.19.066	Kegiatan Pengembangan kawasan aneka kacang dan umbi	Terlaksananya Pengembangan kawasan aneka kacang dan umbi	7.500	Ha	120	100	83,33		
2.00.03.2.00.03.01.19.068	Kegiatan Pengembangan Sentra Aneka Buah	Terlaksananya Pengembangan Sentra Aneka Buah	0	0	10	186	1860,00		
2.00.03.2.00.03.01.19.069	Kegiatan Pengembangan kawasan tanaman sayuran	Terlaksananya Pengembangan kawasan tanaman sayuran	3	Kmdt	40	56	140,00		
2.00.03.2.00.03.01.19.072	Kegiatan Pengembangan kawasan Perkebunan komoditi strategis	Terlaksananya Pengembangan kawasan Perkebunan komoditi strategis	5	Kmdt	1.450	282	19,45		
2.00.03.2.00.03.01.19.073	Kegiatan Pengembangan kawasan Perkebunan komoditi unggul	Terlaksananya Pengembangan kawasan Perkebunan komoditi unggul	5	Kmdt	877	125	14,25		
2.00.03.2.00.03.01.19.074	Kegiatan Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih Unggul Tanaman Pangan dan Hortikultura	Terlaksananya Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih Unggul Tanaman Pangan dan Hortikultura	22	Kab	22	4	18,18		
2.00.03.2.00.03.01.19.075	Kegiatan Peningkatan Sarana Prasarana UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih TPH dan perkebunan	Terlaksananya Peningkatan Sarana Prasarana UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih TPH dan perkebunan	22	Kab	21	21	100,00		
2.00.03.2.00.03.01.19.076	Kegiatan Pengawasan peredaran dan sertifikasi Benih unggul tanaman perkebunan	Terlaksananya Pengawasan peredaran dan sertifikasi Benih unggul tanaman perkebunan	4	Kmdt	1	1	100,00		
2.00.03.2.00.03.01.19.077	Kegiatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman Pangan dan Hortikultura	Terlaksananya Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman Pangan dan Hortikultura	39	Keg	22	18	81,82		
2.00.03.2.00.03.01.19.079	Kegiatan Rehabilitasi tanaman Perkebunan Rakyat	Terlaksananya Rehabilitasi tanaman Perkebunan Rakyat	7.750	Ha	2.991	642	21,46		
2.00.03.2.00.03.01.19.080	Kegiatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman Perkebunan	Terlaksananya Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman Perkebunan	16	Keg	13	6	46,15		
2.00.03.2.00.03.01.19.081	Kegiatan Perlindungan Tanaman Perkebunan	Terlaksananya Perlindungan Tanaman Perkebunan	16	Kab	4	1	25,00		
2.00.03.2.00.03.01.19.082	Kegiatan Gerakan pengendalian OPT Perkebunan	Terlaksananya Gerakan pengendalian OPT Perkebunan	12	Kmdt	103	100	97,09		
2.00.03.2.00.03.01.19.083	Kegiatan Perlindungan Tanaman Pangan	Terlaksananya Perlindungan Tanaman Pangan	12	Kmdt	8	8	100		

# RENCANA KERJA (RENJA)

## DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN ACEH

### TAHUN 2022



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7=6/5)	(8)	(9=4+6)	(10=9/3)
2.00.03.2.00.03.01.19.084	Kegiatan Perlindungan Tanaman Hortikultura	Terlaksananya Perlindungan Tanaman Hortikultura	12	Kmdt	1	1	100		
2.00.03.2.00.03.01.19.086	Kegiatan Pengembangan Perkebunan di Lahan Dayah/Pesantren	Terlaksananya Pengembangan Perkebunan di Lahan Dayah/Pesantren	12	Kab	101	1.300	1.287		
2.00.03.2.00.03.01.19.087	Kegiatan Pengawasan Distribusi Pupuk Bersusidi dan Pesticida	Terlaksananya Pengawasan Distribusi Pupuk Bersusidi dan Pesticida	12	Kab	1	1	100		
2.00.03.2.00.03.01.19.088	Kegiatan Pembiayaan Pertanian	Terlaksananya Pembiayaan Pertanian	0	0	3	3	100		
2.00.03.2.00.03.01.19.089	Kegiatan Pengembangan Perbenihan/Perbibitan Tanaman Perkebunan	Terlaksananya Pengembangan Perbenihan/Perbibitan Tanaman Perkebunan	12	Kab	4	4	100		
2.00.03.2.00.03.01.19.090	Kegiatan Pelatihan Operasionalisasi Alat Mesin Pertanian	Terlaksananya Pelatihan Operasionalisasi Alat Mesin Pertanian	32	Keg	100	100	100		
2.00.03.2.00.03.01.19.091	Kegiatan Pengawasan dan pembinaan peredaran peralatan mesin pertanian/perkebunan	Terlaksananya Pengawasan dan pembinaan peredaran peralatan mesin pertanian/perkebunan	23	Kab	25	1	4		
2.00.03.2.00.03.01.19.092	Kegiatan Pemberdayaan Keureun Blang (P3A/GP3A)	Terlaksananya Pemberdayaan Keureun Blang (P3A/GP3A)	0	0	150	50	33		
2.00.03.2.00.03.01.19.093	Pengadaan Alat Mesin Pertanian Pasca Panen (Migas Kabupaten/Kota) (Bidang Tanaman Pangan)	Terlaksananya Pengadaan Alat Mesin Pertanian Pasca Panen (Migas Kabupaten/Kota)	0	0	1	1	100		
2.00.03.2.00.03.01.19.094	Pengembangan kawasan Perkebunan komoditi strategis (Migas Kabupaten/Kota) (Bidang Perbenihan, Produksi dan Perlindungan Perkebunan)	Terlaksananya Pengembangan kawasan Perkebunan komoditi strategis (Migas Kabupaten/Kota)	0	0	1	0	-		
2.00.03.2.00.03.01.19.095	Pengembangan kawasan Perkebunan komoditi unggul (Migas Kabupaten/Kota) (Bidang Perbenihan, Produksi dan Perlindungan Perkebunan)	Terlaksananya Pengembangan kawasan Perkebunan komoditi unggul (Migas Kabupaten/Kota)	0	0	1	1	100		
2.00.03.2.00.03.01.19.099	Binaan dan pengembangan usaha perbenihan/perbibitan Tanaman Pangan (SILPA Otsus) (Bidang Tanaman Pangan)	Terlaksananya Binaan dan pengembangan usaha perbenihan/perbibitan Tanaman Pangan (SILPA Otsus)	0	0	1	1	100		
2.00.03.2.00.03.01.19.100	Pengembangan kawasan padi (SILPA Otsus) (Bidang Tanaman Pangan)	Terlaksananya Pengembangan kawasan padi (SILPA Otsus)	0	0	1	1	100		
2.00.03.2.00.03.01.19.102	Pengembangan kawasan jagung (SILPA)	Terlaksananya Pengembangan kawasan jagung (SILPA)	0	0	1	1	100		
2.00.03.2.00.03.01.19.103	Pengembangan sentra aneka buah (SILPA) (Bidang Hortikultura)	Terlaksananya Pengembangan sentra aneka buah (SILPA)	0	0	546	546	100		
2.00.03.2.00.03.01.19.104	Pengembangan kawasan tanaman sayuran (SILPA) (Bidang Hortikultura)	Terlaksananya Pengembangan kawasan tanaman sayuran (SILPA)	0	0	99	99	100		
2.00.03.2.00.03.01.19.105	Pemeliharaan Tanaman Perkebunan Rakyat (DBHCHT) (Bidang Perbenihan, Produksi dan Perlindungan Perkebunan)	Terlaksananya Pemeliharaan Tanaman Perkebunan Rakyat (DBHCHT)	0	0	80	80	100		
2.00.03.2.00.03.01.19.107	Penyediaan Bibit Unggul Tanaman Tahunan dan Penyegar (SILPA Otsus) (Bidang Perbenihan, Produksi dan Perlindungan Perkebunan)	Terlaksananya Penyediaan Bibit Unggul Tanaman Tahunan dan Penyegar (SILPA Otsus)	0	0	1	1	100		
2.00.03.2.00.03.01.19.109	Binaan dan pengembangan usaha perbenihan/perbibitan perkebunan (SILPA Otsus) (Bidang Perbenihan, Produksi dan Perlindungan Perkebunan)	Terlaksananya Binaan dan pengembangan usaha perbenihan/perbibitan perkebunan (SILPA Otsus)	0	0	1	1	100		
2.00.03.2.00.03.01.19.111	Pengembangan kawasan Perkebunan komoditi strategis (SILPA) (Bidang Perbenihan, Produksi dan Perlindungan Perkebunan)	Terlaksananya Pengembangan kawasan Perkebunan komoditi strategis (SILPA)	0	0	559	559	100		
2.00.03.2.00.03.01.19.112	Pengembangan kawasan Perkebunan komoditi unggul (SILPA) (Bidang Perbenihan, Produksi dan Perlindungan Perkebunan)	Terlaksananya Pengembangan kawasan Perkebunan komoditi unggul (SILPA)	0	0	479	479	100		
2.00.03.2.00.03.01.19.113	Rehabilitasi tanaman Perkebunan Rakyat (SILPA Otsus) (Bidang Perbenihan, Produksi dan Perlindungan Perkebunan)	Terlaksananya Rehabilitasi tanaman Perkebunan Rakyat (SILPA Otsus)	0	0	1	0	-		
2.00.03.2.00.03.01.19.114	Binaan dan pengawasan usaha perkebunan besar (DBH) (Bidang Pengolahan dan Pemasaran Perkebunan)	Terlaksananya Binaan dan pengawasan usaha perkebunan besar (DBH)	0	0	1	1	100		
2.00.03.2.00.03.01.19.115	Optimasi lahan pertanian (SILPA) (Bidang Sarana dan Prasarana)	Terlaksananya Optimasi lahan pertanian (SILPA)	0	0	10.330	10.330	100		
2.00.03.2.00.03.01.19.117	Pengadaan Alat Mesin Pertanian Prapanen (SILPA Otsus) (Bidang Sarana dan Prasarana)	Terlaksananya Pengadaan Alat Mesin Pertanian Prapanen (SILPA Otsus)	0	0	1	1	100		
2.00.03.2.00.03.01.19.118	Pengadaan Alat Mesin Pertanian Prapanen (SILPA) (Bidang Sarana dan Prasarana)	Terlaksananya Pengadaan Alat Mesin Pertanian Prapanen (SILPA)	0	0	594	594	100		
2.00.03.2.00.03.01.19.119	Peningkatan Prasarana Pertanian (Otsus) (Bidang Sarana dan Prasarana)	Terlaksananya Peningkatan Prasarana Pertanian (Otsus)	0	0	1	1	100		
2.00.03.2.00.03.01.19.120	Peningkatan Prasarana Pertanian (SILPA) (Bidang Sarana dan Prasarana)	Terlaksananya Peningkatan Prasarana Pertanian (SILPA)	0	0	25.513	25.513	100		
2.00.03.2.00.03.01.19.122	Peningkatan Prasarana Perkebunan (SILPA) (Bidang Sarana dan Prasarana)	Terlaksananya Peningkatan Prasarana Perkebunan (SILPA)	0	0	45	45	100		
2.00.03.2.00.03.01.19.123	Peningkatan Sarana Prasarana UPT Proteksi TPH dan perkebunan (DAK) (UPTD Balai Proteksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan)	Terlaksananya Peningkatan Sarana Prasarana UPT Proteksi TPH dan perkebunan (DAK)	0	0	15	15	100		
2.00.03.2.00.03.01.19.124	Peningkatan Sarana Prasarana UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih TPH dan perkebunan (DAK) (UPTD Balai Benih Pengawasan dan Sertifikasi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan)	Terlaksananya Peningkatan Sarana Prasarana UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih TPH dan perkebunan (DAK)	0	0	2	2	100		
2.00.03.2.00.03.01.19.127	Penyelenggaraan BLUD Mekanisasi Pertanian (SILPA BLUD) (UPTD Mekanisasi Pertanian)	Terlaksananya Penyelenggaraan BLUD Mekanisasi Pertanian (SILPA BLUD)	0	0	1	0	-		
2.00.03.2.00.03.01.19.128	Pengembangan kawasan padi (Migas Kabupaten/Kota) (Bidang Tanaman Pangan)	Terlaksananya Pengembangan kawasan padi (Migas Kabupaten/Kota)	0	0	1	1	100		
<b>2.00.03.2.00.03.01.25</b>	<b>PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI</b>								
2.00.03.2.00.03.01.25.001	Kegiatan Perencanaan pembangunan pertanian tanaman pangan dan hortikultura	Terwujudnya sinkronisasi rancangan program dan pengendalian serta informasi pelaksanaan kegiatan	23	Kab	23	23	100		
2.00.03.2.00.03.01.25.003	Kegiatan Perencanaan pembangunan perkebunan	Terwujudnya sinkronisasi rancangan program dan pengendalian serta informasi pelaksanaan kegiatan	23	Kab	23	23	100		
2.00.03.2.00.03.01.25.005	Kegiatan Monitoring dan evaluasi pembangunan pertanian TPH	Terlaksananya Monitoring dan evaluasi pembangunan pertanian TPH	23	Kab	23	23	100		
2.00.03.2.00.03.01.25.006	Kegiatan Penyusunan data statistik dan informasi pertanian TPH	Terlaksananya Penyusunan data statistik dan informasi pertanian TPH	23	Kab	23	23	100		
2.00.03.2.00.03.01.25.007	Kegiatan Monitoring dan evaluasi pembangunan perkebunan	Terlaksananya Monitoring dan evaluasi pembangunan perkebunan	23	Kab	23	23	100		
2.00.03.2.00.03.01.25.008	Kegiatan Penyusunan data statistik dan informasi perkebunan	Terlaksananya Penyusunan data statistik dan informasi perkebunan	23	Kab	23	23	100		

# RENCANA KERJA (RENJA)

## DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN ACEH

### TAHUN 2022



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7=6/5)	(8)	(9=4+6+)	(10=9/3)
<b>3.27.03.</b>	<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN</b>								
<b>3.27.03.01.</b>	<b>Penataan Prasarana Pertanian</b>	Meningkatnya produksi pertanian per komoditas							
3.27.03.01.03.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	Terlaksananya Peningkatan Prasarana Pertanian	22	Kab./Kota			3 Keg	3 Keg	100
3.27.03.01.04.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	Terlaksananya Pertemuan Koordinasi dan Evaluasi Kegiatan Pengelolaan Lahan dan Air	22	Kab./Kota			2 keg	2 Keg	100
3.27.03.01.09.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Terlaksananya Pertemuan Sosialisasi dan Pemantapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	22	Kab./Kota			3 Keg	9 Keg	100
3.27.03.01.10.	Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	Terlaksananya Perbaikan dan Pemeliharaan Sarana UPTD	3	Kab./Kota			3 UPTD		
<b>3.27.05.</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN</b>								
<b>3.27.05.1.01.</b>	<b>Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi</b>	Meningkatnya produksi pertanian per komoditas							
3.27.05.1.01.01.	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Terlaksananya Pengendalian OPT Tanaman Pertanian dan Perkebunan	22	Kab./Kota			4 keg	14 Keg	100
<b>3.27.06.</b>	<b>PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN</b>								
<b>3.27.06.1.01.</b>	<b>Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	Terbina dan terawasinya usaha perkebunan besar							
3.27.06.1.01.03.	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan terhadap usaha perkebunan besar	22	Kab./Kota			8 keg	20 Kab./Kota	100
<b>2.00.03.2.00.03.01.28</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN PENYULUHAN</b>								
2.00.03.2.00.03.01.28.004	Peningkatan Sarana dan Prasarana Diklat Pertanian (Bidang Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Perkebunan)	Terlaksananya Peningkatan Sarana dan Prasarana Diklat Pertanian	12	Keg	4	4	100,00		
2.00.03.2.00.03.01.28.009	Pendidikan Kejuruan Pertanian (Bidang Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Perkebunan)	Terseleenggaranya Pendidikan Kejuruan Pertanian	3	Unit	3	3	100,00		
2.00.03.2.00.03.01.28.010	Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna (Bidang Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Perkebunan)	Terlaksananya penyuluhan penerapan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna	23	Kab	120	420	350,00		
2.00.03.2.00.03.01.28.011	Kegiatan Pendidikan bagi penyuluh pertanian (Bidang Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Perkebunan)	Meningkatnya Kualitas Sistem Penyuluh Pertanian/Perkebunan	24	Keg	2	2	100,00		
2.00.03.2.00.03.01.28.012	Kegiatan IPDMIP (Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Programe) Bidang Pertanian (Bidang Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Perkebunan)	Terlaksananya IPDMIP (Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Programe) Bidang Pertanian	4	Kab	1	1	100,00		
2.00.03.2.00.03.01.28.013	Updating Data dan Informasi Penyuluh Pertanian (Bidang Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Perkebunan)	Terlaksananya Updating Data dan Informasi Penyuluh Pertanian	22	Kab./Kota	180	2	1,11		
2.00.03.2.00.03.01.28.014	Kegiatan Supervisi penyuluhan pertanian (Bidang Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Perkebunan)	Terlaksananya Supervisi penyuluhan pertanian	22	Kab./Kota	1	1	100,00		
2.00.03.2.00.03.01.28.015	Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Penyuluhan (Migas Kabupaten/Kota) (Bidang Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Perkebunan)	Terlaksananya Pengembangan Sarana dan Prasarana Penyuluhan	22	Kab./Kota	1	0	0,00		
2.00.03.2.00.03.01.28.016	Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Penyuluhan (SILPA Otsus) (Bidang Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Perkebunan)	Terlaksananya Pengembangan Sarana dan Prasarana Penyuluhan	22	Kab./Kota	1	0	0,00		
2.00.03.2.00.03.01.28.018	Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna (SILPA) (Bidang Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Perkebunan)	Terlaksananya penyuluhan penerapan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna (SILPA)	22	Kab./Kota	1	0	0,00		
2.00.03.2.00.03.01.28.019	Kegiatan Pendidikan bagi penyuluh pertanian (SILPA Otsus) (Bidang Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Perkebunan)	Terlaksananya Pendidikan bagi penyuluh pertanian (SILPA Otsus)	22	Kab./Kota	1	0	0,00		
<b>3.27.07.</b>	<b>PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN</b>								
<b>3.27.07.1.01.</b>	<b>Kegiatan Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian</b>	Tersedianya tenaga penyuluh yang inovatif dan informatif							
3.27.07.1.01.02.	Sub Kegiatan Kerja Sama Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian Swadaya dan Swasta	Meningkatnya Kualitas Sistem Penyuluh Pertanian/Perkebunan	22	Kab./Kota			5 Keg	7 Keg	100
<b>3.27.07.1.02.</b>	<b>Kegiatan Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian</b>	Tersedianya hasil penyuluhan penerapan praktek pertanian							
3.27.07.1.02.01.	Sub Kegiatan Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian.	Terlaksananya Inovasi Pemanfaatan dan Pengolahan Hasil Tanaman Pangan	22	Kab./Kota					
3.27.07.1.02.02.	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Terlaksananya Pelatihan petani dan pelaku agribisnis pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	22	Kab./Kota			5 keg	30 Kelas	100
<b>3.27.07.1.03.</b>	<b>Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan</b>	Meningkatnya Kelembagaan dan SDM Petani							
3.27.07.1.03.01.	Sub Kegiatan Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koperasi Petani	Terlaksananya Peningkatan Kelembagaan dan SDM Petani	22	Kab./Kota			2 Keg	12 Keg	100
3.27.07.1.03.02.	Sub Kegiatan Pendampingan Manajemen Koperasi Petani	Terlaksananya IPDMIP (Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Programe) Bidang Pertanian, Peningkatan Kelembagaan dan SDM Petani	22	Kab./Kota			7 Keg	7 Keg	100
3.27.07.1.03.04.	Sub Kegiatan Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani	Meningkatnya Kualitas Sistem Penyuluh Pertanian/Perkebunan Terseleenggaranya Pendidikan Kejuruan Pertanian	22	Kab./Kota			3 SMK PP	3 SMK PP	100



## **2.1. Analisis Kinerja Pelayanan SKPA.**

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 126 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Daerah Provinsi Aceh. Dinas Pertanian dan Perkebunan merupakan unsur Pelaksana Pemerintah Daerah di Bidang Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Penyuluhan Pertanian yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Gubernur Aceh. Dinas Pertanian dan Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang pertanian dan Perkebunan serta Penyuluhan Pertanian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tugas ini diselenggarakan oleh seluruh komponen dalam dinas mulai dari Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kelompok Jabatan Fungsional, Kepala Sub Bagian sampai Kepala Seksi beserta stafnya serta Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) lingkup Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh.

Tugas Pokok Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh berdasarkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 126 Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas;
- b. Perumusan kebijakan di bidang prasarana dan sarana, tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.
- c. Penyusunan program penyuluhan pengembangan sumber daya tanaman pangan hortikultura dan perkebunan;
- d. Penataan prasarana tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- e. Pengawasan mutu dan peredaran benih tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- f. Pengawasan sarana tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- g. Pembinaan produksi di bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- h. Pengendalian dan penanggulangan hama penyakit tanaman pangan,

# RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA (RENJA)

## DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN ACEH

TAHUN 2022



- hortikultura dan perkebunan;
- i. Pengendalian dan penanggulangan bencana alam;
  - j. Pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
  - k. Penyelenggaraan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
  - l. Pemberian izin usaha/rekomendasi teknis tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
  - m. Pemantauan dan evaluasi dibidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
  - n. Pembinaan UPTD; dan
  - o. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang pertanian dan perkebunan.

Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPA berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM maupun terhadap IKK sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

Analisis kinerja pelayanan Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh berdasarkan indikator kinerja utama yang sudah ditentukan dalam Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh Tahun 2017–2022. Analisis Kinerja Pelayanan dapat digambarkan pada tabel T-C.30 sebagai berikut :

**RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA (RENJA)**  
**DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN ACEH**  
**TAHUN 2022**



**Tabel T-C.30**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPA Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh**

No.	Indikator	SPM/Stand	IKK	Satuan	Target Renstra SKPA				Capaian Realisasi		Proyeksi		Hasil Analisis
		Nasional	PP 6 2008		2019 (n-1)	2020 (n)	2021 (n+1)	2022 (n+1)	2019 (n-2)	2020 (n-1)	2021 (n)	2022 (n+1)	
1	2	3	4	5	7	8	9	9	10	11	12	13	14
	<b>Pertanian</b>												
1	Kontribusi Sektor Tanaman Pangan Terhadap PDRB			%	6,26	6,18	6,29	6,40	7,00	7,00	6,29	6,40	
2	Kontribusi Sektor Tanaman Hortikultura Terhadap PDRB			%	4,68	4,70	4,85	5,00	4,49	4,49	4,85	5,00	
3	Kontribusi Sektor Tanaman Perkebunan Terhadap PDRB			%	7,09	7,28	7,32	7,36	7,59	7,59	7,32	7,36	
4	Kontribusi Produksi Tanaman Pangan												
	- Padi			Ton	2.625.047	2.713.675	2.805.293	2.900.000	2.625.047	2.625.047	2.805.293	2.900.000	
	- Jagung			Ton	383.059	404.188	426.480	450.000	383.059	383.059	426.480	450.000	
	- Kedele			Ton	41.930	42.929	43.952	45.000	41.930	41.930	43.952	45.000	
	- Kacang Tanah			Ton	2.709	2.844	2.986	3.136	2.709	2.709	2.986	3.136	
	- Ubi Kayu			Ton	31.169	33.085	35.118	37.277	31.169	31.169	35.118	37.277	
5	Kontribusi Produktivitas Tanaman Pangan Per Hektar												
	- Padi			Ku/Ha	54,50	55,50	56,70	57,80	54,50	54,50	56,70	57,80	
	- Jagung			Ku/Ha	47,10	48,04	49,00	49,98	47,10	47,10	49,00	49,98	
	- Kedele			Ku/Ha	16,12	16,33	26,74	16,76	16,12	16,12	26,74	16,76	
	- Kacang Tanah			Ku/Ha	14,85	15,59	16,37	17,19	14,85	14,85	16,37	17,19	
	- Ubi Kayu			Ku/Ha	148,60	153,06	157,65	162,38	148,60	148,60	157,65	162,38	
6	Kontribusi Produksi Hortikultura												
	- Bawang Merah			Ton	7.785	8.174	8.583	9.012	7.785	7.785	8.583	9.012	
	- Cabe Merah			Ton	52.613	55.244	58.006	60.906	52.613	52.613	58.006	60.906	
	- Kentang			Ton	72.955	76.603	80.433	84.455	72.955	72.955	80.433	84.455	
	- Jeruk			Ton	7.983	8.382	8.801	9.241	7.983	7.983	8.801	9.241	
	- Pisang			Ton	83.958	88.156	92.564	97.192	83.958	83.958	92.564	97.192	
7	Kontribusi Produktivitas Hortikultura												
	- Bawang Merah			Ton/Ha	9,09	9,10	9,10	9,10	9,09	9,09	9,10	9,10	
	- Cabe Merah			Ton/Ha	10,65	10,65	10,66	10,67	10,65	10,65	10,66	10,67	
	- Kentang			Ton/Ha	23,97	23,98	24,00	24,01	23,97	23,97	24,00	24,01	
	- Jeruk			Ton/Ha	31,39	31,42	31,42	31,44	31,39	31,39	31,42	31,44	
	- Pisang			Ton/Ha	68,65	68,69	68,72	68,76	68,65	68,65	68,72	68,76	



**RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA (RENJA)**  
**DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN ACEH**  
**TAHUN 2022**



1	2	3	4	5	7	8	9	9	10	11	12	13	14
7	Kontribusi Produktivitas Hortikultura												
	- Bawang Merah			Ton/Ha	9,09	9,10	9,10	9,10	9,09	9,09	9,10	9,10	
	- Cabe Merah			Ton/Ha	10,65	10,65	10,66	10,67	10,65	10,65	10,66	10,67	
	- Kentang			Ton/Ha	23,97	23,98	24,00	24,01	23,97	23,97	24,00	24,01	
	- Jeruk			Ton/Ha	31,39	31,42	31,42	31,44	31,39	31,39	31,42	31,44	
	- Pisang			Ton/Ha	68,65	68,69	68,72	68,76	68,65	68,65	68,72	68,76	
8	Kontribusi Produksi Perkebunan												
	- Kelapa Sawit Rakyat			Ton	554.036	577.828	635.346	693.626	410.411,14	410.411,14	635.346	693.626	
	- Kelapa			Ton	63.500	64.000	64.500	65.000	63.771,69	63.771,69	64.500	65.000	
	- Kopi			Ton	65.200	65.300	65.400	65.500	65.902,07	65.902,07	65.400	65.500	
	- Kakao			Ton	45.000	46.000	46.200	46.800	41.093,06	41.093,06	46.200	46.800	
	- Karet			Ton	71.900	72.500	73.200	73.500	65.652,43	65.652,43	73.200	73.500	
	- Pala			Ton	7.000	7.500	8.230	8.500	6.586,02	6.586,02	8.230	8.500	
	- Lada			Ton	350	355	358	358	358,32	358,32	358	358	
	- Nilam			Ton	400	450	560	700	224,76	224,76	560	700	
	- Cengkeh			Ton	5.700	5.800	5.900	6.000	5.512,80	5.512,80	5.900	6.000	
	- Tembakau			Ton	4.370	4.620	4.870	5.120	2.149,30	2.149,30	4.870	5.120	
9	Kontribusi Produktivitas Perkebunan												
	- Kelapa Sawit Rakyat			Ton/Ha	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	
	- Kelapa			Ton/Ha	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	
	- Kopi			Ton/Ha	0,73	0,73	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	
	- Kakao			Ton/Ha	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	
	- Karet			Ton/Ha	0,95	0,95	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	
	- Pala			Ton/Ha	0,70	0,72	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	
	- Lada			Ton/Ha	0,76	0,77	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	
	- Nilam			Ton/Ha	0,36	1,30	1,45	1,50	1,50	1,50	1,45	1,50	
	- Cengkeh			Ton/Ha	0,58	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	
10	Cakupan Bina Kelompok Tani			Klp	1.294	1.361	1.450	1.539	1.294	1.294	1.450	1.539	
11	Rasio Penyuluh Terakreditasi			%	4,09	4,41	4,72	5,03	4,09	4,09	4,72	5,03	
12	Nilai Tukar Petani Tanaman Pangan			%	89,22	93,66	95,30	96,94	91,53	91,53	95,30	96,94	
13	Nilai Tukar Petani Hortikultura			%	104,72	109,64	108,22	109,64	102,30	102,30	108,22	109,64	
14	Nilai Tukar Petani Perkebunan			%	95,58	98,53	107,21	107,21	87,27	87,27	107,21	107,21	



Indikator Kinerja Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh tahun 2020 mengalami peningkatan terlihat dari jumlah produksi dan produktivitas tanaman padi dan palawija, tercapainya produksi dan produktivitas yang diperoleh sangat terkait dengan penggunaan benih unggul bermutu dan persediaan air cukup, pengendalian hama dan penyakit serta penyaluran pertanian yang efektif sebagai faktor sangat mempengaruhi dalam peningkatan produksi dan produktivitas dalam pengukuran keberhasilan kinerja Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh.

Upaya yang dapat dilakukan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja dimasa mendatang adalah dengan;

- a. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama yang baik dengan semua pihak terkait untuk memperlancar proses administrasi dan pelaksanaan kegiatan,
- b. Penetapan CP/CL di kabupaten diharapkan tepat waktu dan secepatnya sebelum jadwal pelelangan ditetapkan, dan
- c. Program/kegiatan pada tahun-tahun berikutnya diharapkan dapat membuat indikator, sasaran dan target yang direncanakan sesuai dengan Rencana Strategi (Renstra) Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh Tahun 2017-2022 dan Renja Tahun 2022 agar dapat diukur dan diidentifikasi permasalahan dan solusi pemecahannya.

Dari uraian di atas mengenai kinerja pelayanan SKPA tentang Produksi dan Produktivitas hasil Pertanian dan Perkebunan di lingkup Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, hal tersebut sangat dipengaruhi oleh ketersediaan anggaran dan pembiayaan yang cukup untuk menunjukkan tingkat capaian kinerja SKPA.

## **2.2. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh.**

Pembangunan pertanian memiliki peran strategis dalam perekonomian daerah. peran strategis tersebut digambarkan melalui kontribusi yang nyata pada



penyediaan bahan pangan, sumber pendapatan serta pelestarian lingkungan melalui penyediaan bahan pangan bagi masyarakat, penyediaan lapangan kerja masyarakat dan kontribusi dalam produk domestik regional bruto (PDRB) daerah.

Rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) Aceh tahun 2017 – 2022 menempatkan sektor pertanian sebagai prioritas melalui prioritas program "ketahanan pangan dan nilai tambah hasil pertanian" dan merupakan leading/penggerak untuk sektor-sektor lainnya seperti perdagangan, pengolahan hasil industri basisnya dan penggeraknya ada disektor pertanian, khususnya sub-sektor tanaman pangan hortikultura dan perkebunan.

Kendala dan permasalahan pembangunan sektor pertanian dan perkebunan saat ini seperti, optimalisasi sumber daya lahan pertanian masih rendah, alih fungsi lahan produktif (lahan sawah), akses petani terhadap lahan dan permodalan, lemahnya kapasitas dan kelembagaan petani serta kinerja penyuluhan pertanian, jaminan pemasaran dan pengolahan hasil serta upaya meningkatkan nilai tambah hasil pertanian dan perkebunan yang masih lemah, hal ini mengakibatkan laju pembangunan pertanian khususnya sektor tanaman pangan belum berjalan sesuai harapan.

Pembangunan sektor pertanian dan perkebunan membutuhkan sinergitas pihak terkait, kesamaan persepsi dan sinkronisasi yang kuat, tanpa ini rencana kerja yang sudah disusun dan kita tetapkan pasti akan berjalan tidak sesuai seperti yang kita harapkan, untuk itu pihak kami mengharapkan semua pihak terkait agar dapat melakukan persiapan–persiapan, sinergitas antara pihak terkait pelaksana koordinasi yang inten di daerah masing–masing karena pembangunan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat pada saat ini ada disektor pertanian dan perkebunan.



Pemerintah pusat melalui kementerian pertanian memprioritaskan Aceh di sektor pertanian dan perkebunan khususnya sektor tanaman pangan, mengingat kontribusi yang besar pada sumber mata pencarian, penyerapan tenaga kerja dan PDRB Aceh dari sektor ini, dan target yang ingin dicapai pada akhir RPJM Aceh tahun 2017-2022 kontribusi aceh untuk penyediaan pangan nasional menjadi 5 - 10 %.

Semua pihak terkait dalam pembangunan pertanian tanaman pangan seperti dinas pengairan, dinas pekerjaan umum, dinas perdagangan, dinas perindustrian, badan urusan logistik, BPS, PT. Pupuk Iskandar Muda, PT. Sang Hyang Seri, PT. Pertani dan instansi lainnya, untuk dapat meningkatkan kerjasama dan koordinasi agar pembangunan sektor pertanian yang menjadi andalan daerah bisa berjalan sebagaimana yang telah kita susun dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Aceh 2017 – 2022 dan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2022.

Kebijakan dalam rangka mendukung Prioritas dan sasaran program adalah sebagai berikut :

**1. Optimasi Lahan Pertanian dan Perkebunan.**

Kegiatan Optimasi Tahan tersebut mencakup kegiatan - kegiatan Pemanfaatan Lahan Tidur (sleeping land), Peningkatan Indek Tanam / Indek Panen, Gerakan Percepatan Tanam Padi (tepat waktu) dan Pengaturan Pola Tanam Spesifik Lokasi serta pemanfaatan lahan-lahan terlantar.

**2. Gerakan Peningkatan Mutu Intensifikasi.**

Gerakan peningkatan mutu intensifikasi mencakup Kebijakan subsidi benih padi, jagung & kedelai, Pengembangan model SLPTT dan SRI, Pengembangan Model Foods Estate dan Penyediaan Armada Alsintan.



**3. Revitalisasi Institusi Perbenihan.**

Revitalisasi Institusi Perbenihan mencakup kegiatan Revitalisasi Balai Benih Induk, Revitalisasi Balai Benih Utama dan Revitalisasi Penangkar Benih serta Penumbuhan dan Pengembangan Kebun-kebun Perbibitan Perkebunan.

**4. Penguatan Peran UPJA Provinsi dan Kabupaten/Kota.**

Penguatan peran UPJA tersebut mencakup Pembentukan Brigade Tanam & Brigade Panen serta pembangunan Workshop Provinsi & Kabupaten Melalui kerjasama dengan produsen Alat & Mesin Pertanian.

**5. Penguatan Peran dan Fungsi UPTD.**

Penguatan Peran dan Fungsi UPTD Balai Proteksi Tanaman Pangan & Hortikultura dan Perkebunan, Balai Pengawasan dan Sertifikasih Benih, Balai Benih Tanaman Pangan, Balai Benih Tanaman Hortikultura, Mekanisasi Pertanian.

**6. Koordinasi Penguatan Peran & Fungsi Penyuluhan Pertanian.**

Koordinasi penguatan peran dan fungsi penyuluhan pertanian mencakup antara lain Koordinasi Pembinaan Fungsi & Peran Kelompok Tani/Kelembagaan Petani, Koordinasi Penguatan Peran Penyuluhan Pertanian dan Balai Penyuluhan Pertanian.

**7. Peningkatan Nilai Tambah & Pemasaran Hasil Pertanian/Perkebunan**

Peningkatan Nilai Tambah dan Pemasaran Hasil Pertanian/Perkebunan melalui kegiatan Penanganan Panen dan Pasca Panen serta Aktif Membantu Kestabilan Harga Produk Pertanian/Perkebunan. Disamping itu upaya-upaya peningkatan mutu Hasil serta pengamanan mutu produk perlu mendapat perhatian khusus agar tidak terjadi pencemaran mutu produk yang berdampak pada penurunan nilai jual produk.



## **2.4. Review Terhadap Rencana Awal RKPA Tahun 2022.**

Analisa Kebutuhan Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh Tahun 2022, sebagaimana Tabel T-C.31 Review terhadap Rencana Awal RKPA Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh Tahun 2022 terdapat pada 6 Program, 16 Kegiatan dan 37 Sub Kegiatan, tersebar pada kegiatan Teknis dan non teknis Sekretariat, 5 Bidang Teknis, 4 UPTD dan 3 SMKPP dibutuhkan anggaran kegiatan sebesar Rp. 426.628.000.000.-

**RENCANA KERJA (RENJA)**  
**DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN ACEH**  
**TAHUN 2022**



**Tabel T-C. 31**  
**REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPA TAHUN 2022**

**DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN ACEH**

KODE	RANCANGAN AWAL RKPD					KODE	Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan	
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)		Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
3	<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>					3	<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>						
3 27	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN</b>					426.628.000.000	3 27	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN</b>					180.235.000.000
3 27 01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>					147.698.000.000	3 27 01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>					122.433.311.932
3 27 01 1.01.	<b>Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>					6.000.000.000	3 27 01 1.01.	<b>Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>					3.500.000.000
3 27 01 1.01. 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Banda Aceh	Tersedianya Dokumen Dokumen Perencanaan (Revisi dan Perubahan) Tahun 2022, Data Statistik dan Informasi Pertanian.	18 Dokumen	4.750.000.000	3 27 01 1.01. 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Banda Aceh	Tersedianya Dokumen Dokumen Perencanaan (Revisi dan Perubahan) Tahun 2022, Data Statistik dan Informasi Pertanian.	18 Dokumen	3.000.000.000		
3 27 01 1.01. 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Banda Aceh	Tersedianya Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan	2 Dokumen	1.250.000.000	3 27 01 1.01. 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Banda Aceh	Tersedianya Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan	2 Dokumen	500.000.000		
3 27 01 1.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>					89.000.000.000	3 27 01 1.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>					82.068.549.342
3 27 01 1.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Banda Aceh	Tersedianya gaji dan hak-hak pegawai	12 Bln	89.000.000.000	3 27 01 1.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Banda Aceh	Tersedianya gaji dan hak-hak pegawai	12 Bln	82.068.549.342		
3 27 01 1.05	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>					539.000.000	3 27 01 1.05	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>					290.000.000
3 27 01 1.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Banda Aceh/ Nasional	Termotivasinya sumber daya aparatur yang profesional dalam pelayanan publik	6 Keg	239.000.000	3 27 01 1.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Banda Aceh/ Nasional	Termotivasinya sumber daya aparatur yang profesional dalam pelayanan publik	6 Keg	190.000.000		
3 27 01 1.05 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Banda Aceh	Tersedianya Bahan sosialisasi menurut peraturan dan perundang-undangan yang berlaku	6 Bln	300.000.000	3 27 01 1.05 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Banda Aceh	Tersedianya Bahan sosialisasi menurut peraturan dan perundang-undangan yang berlaku	6 Bln	100.000.000		
3 27 01 1.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>					3.330.000.000	3 27 01 1.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>					2.155.000.000
3 27 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Banda Aceh	Tersedianya kebutuhan instalasi listrik dan alat penerangan gedung kantor	12 Bln	300.000.000	3 27 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Banda Aceh	Tersedianya kebutuhan instalasi listrik dan alat penerangan gedung kantor	12 Bln	150.000.000		
3 27 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Banda Aceh	Terlaksananya Penyediaan kebutuhan ATK, Makan dan minum	12 Bln	1.180.000.000	3 27 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Banda Aceh	Terlaksananya Penyediaan kebutuhan ATK, Makan dan minum	12 Bln	840.000.000		
3 27 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Banda Aceh	Terlaksananya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 Bln	450.000.000	3 27 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Banda Aceh	Terlaksananya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 Bln	220.000.000		
3 27 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Banda Aceh	Terlaksananya Pengadaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Bln	200.000.000	3 27 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Banda Aceh	Terlaksananya Pengadaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Bln	145.000.000		
3 27 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Banda Aceh	Terlaksananya sinkronisasi, Koordinasi dan Konsultasi dalam pencapaian kinerja yang tepat waktu dan tepat sasaran .	12 Bln	1.200.000.000	3 27 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Banda Aceh	Terlaksananya sinkronisasi, Koordinasi dan Konsultasi dalam pencapaian kinerja yang tepat waktu dan tepat sasaran .	12 Bln	800.000.000		
3 27 01 1.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>					14.300.000.000	3 27 01 1.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>					8.200.393.053
3 27 01 1.07 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Banda Aceh	Terlaksananya Pengadaan gedung kantor	10 Paket	10.300.000.000	3 27 01 1.07 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Banda Aceh	Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan lainnya		7.700.393.053		
3 27 01 1.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Banda Aceh	Terlaksananya Pengadaan perlengkapan gedung kantor	7 Keg	4.000.000.000	3 27 01 1.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Banda Aceh	Terlaksananya Pengadaan perlengkapan gedung kantor	7 Keg	500.000.000		

# RENCANA KERJA (RENJA)

## DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN ACEH

### TAHUN 2022



KODE	RANCANGAN AWAL RKPD					KODE	Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan	
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)		Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
3 27 01 1.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>					<b>21.725.000.000</b>	3 27 01 1.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>					<b>19.790.000.000</b>
3 27 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Banda Aceh	Jumlah surat yang terkirim	12 Bln	75.000.000	3 27 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Banda Aceh	Jumlah surat yang terkirim	12 Bln	40.000.000		
3 27 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Banda Aceh	Jumlah rekening jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik selama satu tahun	12 Bln	3.100.000.000	3 27 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Banda Aceh	Jumlah rekening jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik selama satu tahun	12 Bln	2.450.000.000		
3 27 01 1.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Banda Aceh	Terlaksananya Peningkatan Peralatan dan Peralatan Kantor	12 Bln	550.000.000	3 27 01 1.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Banda Aceh	Terlaksananya Peningkatan Peralatan dan Peralatan Kantor	12 Bln	600.000.000		
3 27 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Banda Aceh	Jumlah jasa tenaga administrasi/ Teknis Kegiatan terlaksananya peningkatan kualitas pelayanan	12 Bln	18.000.000.000	3 27 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Banda Aceh	Jumlah jasa tenaga administrasi/ Teknis Kegiatan terlaksananya peningkatan kualitas pelayanan	12 Bln	16.700.000.000		
3 27 01 1.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>					<b>12.804.000.000</b>	3 27 01 1.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>					<b>5.429.369.537</b>
3 27 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Banda Aceh	Terlaksananya Peningkatan kinerja aparatur dalam pelayanan publik	12 Bln	4.300.000.000	3 27 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Banda Aceh	Terlaksananya Peningkatan kinerja aparatur dalam pelayanan publik	12 Bln	4.029.369.537		
3 27 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Banda Aceh	Terlaksananya rehabilitasi gedung perkantoran yang merupakan aset daerah	23 Pkt	8.504.000.000	3 27 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Banda Aceh	Terlaksananya rehabilitasi gedung perkantoran yang merupakan aset daerah	23 Pkt	1.400.000.000		
						3 27 01 1.10	<b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>					<b>1.000.000.000</b>	
						3 27 01 1.10 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Aceh Besar	Terlaksananya Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1 Thn	1.000.000.000		
3 27 02	<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN</b>					<b>204.180.000.000</b>	3 27 02	<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN</b>					<b>36.239.526.219</b>
3 27 02 1.01	<b>Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian</b>					<b>14.380.000.000</b>	3 27 02 1.01	<b>Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian</b>					<b>3.830.250.000</b>
3 27 02 1.01 01	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Kab./Kota	Terlaksananya Pengawasan Peredaran pupuk bersubsidi	22 Kab./Kota	9.380.000.000	3 27 02 1.01 01	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Kab./Kota	Terlaksananya Pengawasan Peredaran pupuk bersubsidi	22 Kab./Kota	1.137.000.000		
3 27 02 1.01 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Kab./Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	22 Kab./Kota	5.000.000.000	3 27 02 1.01 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Kab./Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	22 Kab./Kota	2.693.250.000		
3 27 02 1.02	<b>Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman</b>					<b>184.800.000.000</b>	3 27 02 1.02	<b>Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman</b>					<b>31.793.595.406</b>
3 27 02 1.02 01	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	Kab./Kota	Terlaksananya Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih Unggul Tanaman Pangan dan Hortikultura	23 Kab./Kota	4.800.000.000	3 27 02 1.02 01	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	Kab./Kota	Terlaksananya Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih Unggul Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	23 Kab./Kota	702.000.000		
3 27 02 1.02 02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	Kab./Kota	Terlaksananya Pembinaan dan pengembangan usaha perbenihan/perbibitan Tanaman Hortikultura	11 Komoditi	55.000.000.000	3 27 02 1.02 02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	Kab./Kota	Terlaksananya Pembinaan dan pengembangan usaha perbenihan/perbibitan Hortikultura dan Terlaksananya Pengendalian OPT	11 Komoditi	6.007.262.890		
3 27 02 1.02 03	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan	Kab./Kota	Terlaksananya Pengembangan kawasan Padi, Jagung, Ubi Kayu.	60000 Ha	70.000.000.000	3 27 02 1.02 03	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan	Kab./Kota	Terlaksananya Pengembangan Kawasan Padi, Jagung, Ubi Kayu.	60000 Ha	8.551.832.516		
3 27 02 1.02 04	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	Kab./Kota	Terlaksananya Penyediaan Bibit Tanaman Perkebunan	5 Komoditi	55.000.000.000	3 27 02 1.02 04	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	Kab./Kota	Terlaksananya Penyediaan Bibit Tanaman Perkebunan	5 Komoditi	16.532.500.000		
3 27 02 1.03	<b>Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kew</b>					<b>5.000.000.000</b>	3 27 02 1.03	<b>Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme K</b>					<b>615.680.813</b>
3 27 02 1.03 04	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	Kab./Kota	Terlaksananya Penyediaan Benih Bumber Tanaman Pangan, Tanaman Hortikultura dan Tanaman Perkebunan	200 Ha	5.000.000.000	3 27 02 1.03 04	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	Kab./Kota	Terlaksananya Penyediaan Benih Bumber Tanaman Pangan, Tanaman Hortikultura dan Tanaman Perkebunan	200 Ha	615.680.813		



# RENCANA KERJA (RENJA)

## DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN ACEH

### TAHUN 2022



KODE	RANCANGAN AWAL RKP					KODE	Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)		Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3 27 03	<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN</b>				27.500.000.000	3 27 03	<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN</b>				5.400.000.000	
3 27 03 1.01	<b>Penataan Prasarana Pertanian</b>				27.500.000.000	3 27 03 1.01	<b>Penataan Prasarana Pertanian</b>				5.400.000.000	
3 27 03 1.01 03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	Kab./Kota	Terlaksananya Peningkatan Prasarana Pertanian	10 Keg	7.500.000.000	3 27 03 1.01 03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	Kab./Kota	Terlaksananya Peningkatan Prasarana Pertanian	1 Keg	100.000.000	
3 27 03 1.01 04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	Kab./Kota	Terlaksananya Pengelolaan Sumber Sumber Air Pertemuan Koordinasi dan Evaluasi Kegiatan Pengelolaan Lahan dan Air	10 Keg	8.000.000.000	3 27 03 1.01 04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	Kab./Kota	Terlaksananya Pertemuan Koordinasi dan Evaluasi Kegiatan Pengelolaan Lahan dan Air	1 Keg	150.000.000	
3 27 03 1.01 09	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Kab./Kota	Terlaksananya Pertemuan Sosialisasi dan Pemantapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Optimasi Lahan dan Perluasan Areal Pertanian	1250 Ha	12.000.000.000	3 27 03 1.01 09	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Kab./Kota	Terlaksananya Pertemuan Sosialisasi dan Pemantapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Optimasi Lahan dan Perluasan Areal Pertanian	1 Keg	150.000.000	
3 27 03 1.01 10						3 27 03 1.01 10	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	Banda Aceh	Terlaksananya Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	1 Keg	5.000.000.000	
3 27 05	<b>PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN</b>				5.000.000.000	3 27 05	<b>PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN</b>				450.000.000	
3 27 05 01	<b>Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi</b>				5.000.000.000	3 27 05 01	<b>Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi</b>				450.000.000	
3 27 05 01 01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Kab./Kota	Terlaksananya Pengendalian OPT Tanaman Pertanian dan Perkebunan	2 Keg	5.000.000.000	3 27 05 01 01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Kab./Kota	Terlaksananya Pengendalian OPT Tanaman Pertanian dan Perkebunan	2 Keg	450.000.000	
3 27 06	<b>PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN</b>				3.200.000.000	3 27 06	<b>PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN</b>				5.702.193.754	
3 27 06 1.01	<b>Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>				3.200.000.000	3 27 06 1.01	<b>Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>				5.702.193.754	
3 27 06 1.01 03	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Kab./Kota	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan terhadap usaha perkebunan besar	20 kab/ kota	3.200.000.000	3 27 06 1.01 03	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Kab./Kota	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan terhadap usaha perkebunan besar	20 kab/ kota	5.702.193.754	
3 27 07	<b>PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN</b>				39.050.000.000	3 27 07	<b>PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN</b>				10.009.968.095	
3 27 07 1.01	<b>Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian</b>				1.700.000.000	3 27 07 1.01	<b>Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian</b>				385.000.000	
3 27 07 1.01 02	Kerja Sama Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian Swadaya dan Swasta	Kab./Kota	Terlaksananya Peningkatan Kualitas Sistem Penyuluh Pertanian/ Perkebunan	7 Keg	1.700.000.000	3 27 07 1.01 02	Kerja Sama Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian Swadaya dan Swasta	Kab./Kota	Terlaksananya Peningkatan Kualitas Sistem Penyuluh Pertanian/ Perkebunan	7 Keg	385.000.000	
3 27 07 1.02	<b>Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian</b>				23.400.000.000	3 27 07 1.02	<b>Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian</b>				320.000.000	
3 27 07 1.02 01	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Kab./Kota	Terlaksananya Inovasi Pemanfaatan dan Pengolahan Hasil Tanaman Pangan	10 Even	18.900.000.000							
3 27 07 1.02 02	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Kab./Kota	Terlaksananya Pelatihan petani dan pelaku agribisnis pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	50 Kelas	4.500.000.000	3 27 07 1.02 02	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Kab./Kota	Terlaksananya Pelatihan petani dan pelaku agribisnis pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	2 Kls	320.000.000	
3 27 07 1.03	<b>Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan</b>				13.950.000.000	3 27 07 1.03	<b>Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan</b>				9.304.968.095	
3 27 07 1.03 01.	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Kooperasi	Kab./Kota	Terlaksananya Peningkatan Kelembagaan dan SDM Petani	7 Keg	3.150.000.000	3 27 07 1.03 01.	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Kooperasi	Kab./Kota	Terlaksananya Peningkatan Kelembagaan dan SDM Petani	2 Keg	304.501.095	
3 27 07 1.03 02.	Pendampingan Manajemen Kooperasi Petani	Kab./Kota	Terlaksananya Pendampingan (Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Program) Bidang Pertanian	7 Keg	1.800.000.000	3 27 07 1.03 02.	Pendampingan Manajemen Kooperasi Petani	Kab./Kota	Terlaksananya Pendampingan (Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Program) Bidang Pertanian	8 Keg	2.440.467.000	
3 27 07 1.03 04.	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani	Kab./Kota	Terlaksananya Peningkatan Kualitas Sistem Penyuluh Pertanian/Perkebunan Terselenggaranya Pendidikan Kejuruan Pertanian	3 SMK PP	9.000.000.000	3 27 07 1.03 04.	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani	Kab./Kota	Terlaksananya Peningkatan Kualitas Sistem Penyuluh Pertanian/Perkebunan Terselenggaranya Pendidikan Kejuruan Pertanian	3 SMK PP	6.560.000.000	



## **2.5. Penelaahan Usulan Program Kegiatan.**

Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat/pemangku kepentingan yang diperoleh dari pokok-pokok pikiran DPRA serta Hasil Desk Musrenbang Kabupaten/Kota Bersama Bappeda Provinsi Aceh serta Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, adalah sebagai berikut (Terlampir T-32). Usulan Program/Kegiatan dengan target yang telah ditetapkan sesuai dengan Rencana Strategis Tahun 2018-2022 dan Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh.

**RENCANA KERJA (RENJA)**  
**DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN ACEH**  
**TAHUN 2022**



**Tabel T-C. 32**  
**Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022**  
**Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh**

No.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/ VOLUME	CATATAN
1	2	3	4	5	6
<b>3</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>				
<b>3.27.</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN</b>				
<b>01.</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>				
<b>1.01.</b>	<b>Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>				
1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Banda Aceh	Tersedianya Dokumen Dokumen Perencanaan (Revisi dan Perubahan) Tahun 2022, Data Statistik dan Informasi Pertanian.	18 Dokumen	
1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Banda Aceh	Tersedianya Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan	2 Dokumen	
<b>1.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>				
1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Banda Aceh	Tersedianya gaji dan hak- hak pegawai	1 Dokumen	
<b>1.05</b>	<b>Administrasi Kependidikan Perangkat Daerah</b>				
1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Banda Aceh	Terciptanya keseragaman identitas dan disiplin pegawai Dinas	1038 Stell	
1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Banda Aceh	Termotivasinya sumber daya aparatur yang profesional dalam pelayanan publik	6 Keg	
1.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Banda Aceh	Tersedianya Bahan sosialisasi menurut peraturan dan perundang-undangan yang berlaku	6 Bln	
<b>1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>				
1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Banda Aceh	Tersedianya kebutuhan instalasi listrik dan alat penerangan gedung kantor	12 Bln	
1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Banda Aceh	Terlaksananya Penyediaan kebutuhan ATK, Makan dan minum	12 Bln	
1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Banda Aceh	Terlaksananya Penyediaan Barang Cetak	12 Bln	
1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Banda Aceh	Terlaksananya Pengadaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Bln	
1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Banda Aceh	Terlaksananya sinkronisasi, Koordinasi dan Konsultasi dalam pencapaian kinerja yang tepat waktu dan tepat sasaran .	12 Bln	
<b>1.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>				
1.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Banda Aceh	Terlaksananya Pengadaan perlengkapan gedung kantor	10 Pkt	
1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Banda Aceh	Terlaksananya Pengadaan perlengkapan gedung kantor	12 Bln	
<b>1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				
1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Banda Aceh	Jumlah surat yang terkirim	12 Bln	
1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Banda Aceh	Jumlah rekening jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik selama satu tahun	12 Bln	
1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Banda Aceh	Terlaksananya Peningkatan Perlengkapan dan Peralatan Kantor	12 Bln	
1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Banda Aceh	Jumlah jasa tenaga administrasi/ Teknis Kegiatan terlaksananya peningkatan kualitas pelayanan	12 Bln	
<b>1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				
1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Banda Aceh	Terlaksananya Peningkatan kinerja aparatur dalam pelayanan publik	12 Bln	
1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Banda Aceh	Terlaksananya rehabilitasi gedung perkantoran yang merupakan aset daerah	12 Bln	
<b>1.10</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				
1.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Aceh Besar	Terlaksananya Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	12 Bln	

**RENCANA KERJA (RENJA)**  
**DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN ACEH**  
**TAHUN 2022**



No.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/ VOLUME	CATATAN
1	2	3	4	5	6
<b>02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN</b>					
<b>1.01 Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian</b>					
1.01	01 Terlaksananya Pengawasan Peredaran pupuk bersubsidi	Kab./Kota	Terlaksananya Pengawasan Peredaran pupuk bersubsidi	12 Buln	
1.01	02 Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Kab./Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	22 Kab./Kota	
<b>1.02 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman</b>					
1.02	01 Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	Kab./Kota	Terlaksananya Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih Unggul Tanaman Pangan dan Hortikultura	23 Kab./Kota	
1.02	02 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	Kab./Kota	Terlaksananya Pembinaan dan pengembangan usaha perbenihan/perbibitan Tanaman Hortikultura	11 Komoditi	
1.02	03 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan	Kab./Kota	Terlaksananya Pengembangan kawasan Padi, Jagung, Ubi Kayu.	60000 Ha	
1.02	04 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	Kab./Kota	Terlaksananya Penyediaan Bibit Tanaman Perkebunan	5 Komoditi	
<b>1.03 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi</b>					
1.03	04 Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	Kab./Kota	Terlaksananya Penyediaan Benih Bumer Tanaman Pangan, Tanaman Hortikultura dan Tanaman Perkebunan	200 Ha	
<b>03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN</b>					
<b>1.01 Penataan Prasarana Pertanian</b>					
1.01	03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	Kab./Kota	Terlaksananya Peningkatan Prasarana Pertanian	10 Keg	
1.01	04 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	Kab./Kota	Terlaksananya Pengelolaan Sumber Sumber Air Pertemuan Koordinasi dan Evaluasi Kegiatan Pengelolaan Lahan dan Air	10 Keg	
1.01	09 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Kab./Kota	Terlaksananya Pertemuan Sosialisasi dan Pemantapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Optimasi Lahan dan	1250 Ha	
1.01	10 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	Banda Aceh	Terlaksananya Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana	1 Keg	
<b>05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN</b>					
<b>01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi</b>					
01.	01 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Kab./Kota	Terlaksananya Pengendalian OPT Tanaman Pertanian dan Perkebunan	14 Keg	
<b>06 PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN</b>					
<b>1.01 Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang kegiatannya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>					
1.01	03 Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Kab./Kota	Terlaksananya Pengendalian Organisme Pengganggu tanaman	20 kab/ kota	

**RENCANA KERJA (RENJA)**  
**DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN ACEH**  
**TAHUN 2022**



No.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/ VOLUME	CATATAN
1	2	3	4	5	6
<b>07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN</b>					
<b>1.01 Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian</b>					
1.01	02 Kerja Sama Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian Swadaya dan Swasta	Kab./Kota	Terlaksananya Peningkatan Kualitas Sistem Penyuluh Pertanian/ Perkebunan	7 Keg	
<b>1.02 Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian</b>					
1.02	01 Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Kab./Kota	Terlaksananya Inovasi Pemanfaatan dan Pengolahan Hasil Tanaman Pangan	10 Even	
1.02	02 Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Kab./Kota	Terlaksananya Pelatihan petani dan pelaku agribisnis pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	50 Kelas	
<b>1.03 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan</b>					
1.03	01. Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koorporasi	Kab./Kota	Terlaksananya Peningkatan Kelembagaan dan SDM Petani	7 Keg	
1.03	02. Pendampingan Manajemen Koorporasi Petani	Kab./Kota	Terlaksananya IPDMIP (Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Programe) Bidang Pertanian, Peningkatan	7 Keg	
1.03	04. Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani	Kab./Kota	Terlaksananya Peningkatan Kualitas Sistem Penyuluh Pertanian/Perkebunan Terselenggaranya Pendidikan Kejuruan Pertanian	3 SMK PP	



## BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT ACEH

### 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.

Berdasarkan RPJMN Tahun 2020 - 2024, sektor pertanian diberikan mandat pada agenda pembangunan memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan. Sebagai penerjemahan visi **“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**, maka pembangunan pertanian dan pangan diarahkan dalam mewujudkan pertanian maju, mandiri dan modern untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan petani.

Pertanian maju, mandiri dan modern akan mengarahkan kepada kondisi bangsa yang mampu memperkuat kedaulatan dan ketahanan pangan. Berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, pencapaian ketahanan pangan diarahkan dengan meningkatkan produksi komoditas pertanian untuk pangan yang beranekaragam dengan menerapkan prinsip keunggulan komparatif dan kompetitif, efisiensi dan daya saing. Pengembangan sistem pola integrasi diharapkan dapat meningkatkan produksi dan produktivitas dalam rangka pemenuhan kebutuhan pangan. Peningkatan produksi pangan haruslah mampu meningkatkan pendapatan petani dan kesejahteraan masyarakat perdesaan. Ketahanan pangan yang ingin diwujudkan juga memerhatikan kualitas pangan yang bergizi, beragam dan berimbang. Kebijakan untuk pangan diarahkan kepada menyediakan pangan yang cukup, bergizi, sehat, beragam, halal, ramah lingkungan dan bercita rasa bagi semua. Kebijakan pangan juga



diarahkan kepada pembangunan berbasis kewilayahan guna mengurangi ketidakseimbangan pembangunan antar wilayah yang merupakan dampak dari terpusatnya distribusi dan alokasi serta pemanfaatan sumber daya di wilayah perbatasan, tertinggal, dan daerah khusus. Oleh karena itu, pembangunan wilayah perbatasan, tertinggal, dan daerah khusus merupakan solusi dalam mengurangi ketidakseimbangan antar wilayah.

### **3.1.1. Arah Kebijakan Kementerian Pertanian**

Memerhatikan arah Kebijakan Nasional dalam RPJMN 2020-2024 dan arahan Presiden, kebijakan pertanian dalam periode ini diarahkan untuk mendukung ketahanan pangan, pertumbuhan ekonomi termasuk memerhatikan kesejahteraan keluarga petani dan memerhatikan keberlanjutan sumber daya pertanian. Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan maka Kementerian Pertanian menetapkan 5 (lima) arah kebijakan sebagai berikut :

- a. Terjaganya ketahanan pangan nasional
- b. Meningkatnya nilai tambah dan daya saing pertanian
- c. Menjaga keberlanjutan sumber daya pertanian serta tersedianya prasarana dan sarana pertanian
- d. Meningkatkan kualitas SDM pertanian, dan Terwujudnya reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintah yang berorientasi pada layanan prima.

Arah kebijakan tersebut dijelaskan melalui strategi dan upaya-upaya pelaksanaan melalui program yang sesuai dengan tugas dan kewenangan Kementerian Pertanian.



### **3.1.2. Strategi Kementerian Pertanian**

Secara garis besar, program dan kegiatan Kementerian Pertanian difokuskan kepada peningkatan produksi dan produktivitas dengan cara mekanisasi pertanian sehingga menghasilkan usaha tani dengan lebih efisien atau biaya yang rendah. Kegiatan mekanisasi juga meningkatkan kemampuan pertanian dalam menggarap lahan lebih luas bahkan bisa ekspansi ke luar wilayah pusat-pusat pertanian yang ada selama ini. Selain itu, hadirnya mekanisasi pertanian juga akan mendorong peningkatan produksi usaha tani melalui peningkatan produktivitas dan mutu produk pertanian.

Untuk menjawab tantangan agar komoditas pertanian Indonesia dapat bersaing di pasar domestik maupun global maka kegiatan mekanisasi pertanian perlu dilakukan dari industri hulu, onfarm, dan industri hilir sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi usaha pertanian.

Fokus strategi Kementerian Pertanian selanjutnya yaitu kegiatan research and development (R&D) dan inovasi pertanian yang lebih komprehensif lagi yang tidak hanya dilakukan dalam upaya meningkatkan produktivitas (yield) tetapi perlu diprioritaskan kepada penciptaan teknologi dan inovasi untuk menurunkan biaya produksi, peningkatan kualitas dan menurunkan biaya distribusi dan pemasaran (biaya logistik). Apabila dijabarkan lebih lanjut dalam setiap arah kebijakan maka strategi dari masing-masing kebijakan tersebut adalah sebagai berikut :





**a. Strategi untuk Menjaga Ketahanan Pangan Nasional**

Kondisi yang ingin dicapai dalam terjaganya ketahanan pangan nasional adalah stabilnya pasokan pangan, akses pangan mudah dan murah serta distribusi pangan yang lancar. Adapun strategi yang dilakukan untuk menjaga ketahanan pangan di antaranya :

1. Peningkatan produksi dan produktivitas sektor pertanian
2. Peningkatan ketersediaan pangan
3. Peningkatan keterjangkauan dan pemanfaatan pangan

**b. Strategi dalam Meningkatkan Nilai Tambah dan Daya Saing Pertanian**

Peluang penciptaan nilai tambah terbesar terjadi di sektor pertanian ada pada agroindustri atau pada mata rantai tengah antara hulu dan hilir. Penguasaan teknologi penciptaan nilai tambah dan akses pasar banyak dikuasai pada usaha pengolahan hasil pertanian. Untuk itu, perlu meningkatkan sinergitas yang tinggi dengan sektor industri dan perdagangan untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk pertanian. Adapun strategi yang dilakukan dari sisi pembangunan pertanian untuk peningkatan nilai tambah dan daya saing produk pertanian adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan nilai tambah
2. Peningkatan daya saing pertanian

**c. Strategi dalam Menjaga Keberlanjutan Sumber Daya Pertanian serta Tersedianya Prasarana dan Sarana Pertanian**

Kondisi yang ingin dicapai yaitu terkelolanya dengan baik lahan pertanian, air irigasi, pembiayaan, pupuk, pestisida dan alat mesin



pertanian. Adapun strategi dalam menjaga keberlanjutan sumber daya pertanian dan tersedianya prasarana dan sarana pertanian yaitu :

1. Meningkatkan ketersediaan, pemanfaatan dan perlindungan lahan serta peningkatan ketersediaan air
2. Revitalisasi pembiayaan petani dan kelembagaannya
3. Meningkatkan ketersediaan dan pengawasan peredaran benih, pupuk dan pestisida
4. Peningkatan penyediaan dan penggunaan mekanisasi (modernisasi) pertanian

#### **d. Strategi dalam Meningkatkan Kualitas SDM Pertanian**

Pengembangan SDM yang berkualitas diperlukan dalam rangka pelaksanaan pembangunan pertanian berkelanjutan. SDM yang andal dan profesional menjadi salah satu faktor kunci dalam membangun pertanian berdaya saing tinggi dan berkelanjutan. Adapun strategi yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas SDM pertanian adalah sebagai berikut :

1. Standardisasi dan sertifikasi profesi pertanian
2. Regenerasi dan Penumbuhan Minat Generasi Muda Pertanian
3. Penyuluhan pertanian berbasis teknologi informasi dan komunikasi
4. Peningkatan taraf pelatihan hingga level internasional
5. Pendidikan dan Pelatihan Vokasi berbasis Kompetensi
6. Penguatan kelembagaan petani



### **3.1.3. Program Kementerian Pertanian**

Pada awal tahun 2022, Kementerian Keuangan menginisiasi perancangan kembali (redesign) penyederhanaan program di masing-masing Kementerian/Lembaga. Dengan adanya perancangan kembali (redesign) tersebut maka sistem penganggaran dan Program Indikatif Kementerian Pertanian pada tahun 2021-2024 akan berubah menjadi :

a. Dukungan Manajemen

Sasaran Program sebagai berikut :

- Terwujudnya birokrasi yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima
- Terkelolanya anggaran yang akuntabel dan berkualitas
- Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan Kementan
- Meningkatnya kualitas pengawasan internal
- Meningkatnya maturitas SPIP.

b. Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

- Termanfaatkannya teknologi dan inovasi pertanian

c. Pendidikan dan Pelatihan Vokasi

- Meningkatnya kualitas SDM dan kelembagaan pertanian

d. Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas

- Meningkatnya ketersediaan pangan strategis
- Tersedianya infrastruktur pertanian pasca panen pertanian yang sesuai dengan kebutuhan
- Terjaminnya keamanan dan mutu pangan
- Terkendalinya penyebaran OPT dan DPI sektor pertanian
- Penyediaan Prasarana dan Sarana Pertanian yang sesuai kebutuhan.



- Meningkatnya lembaga distribusi pangan yang mandiri
- Meningkatnya penanganan kerawanan pangan
- Meningkatnya pengawasan pangan segar yang beredar
- Aman dari ancaman Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK), Hama Penyakit Hewan Karantina (HPHK) dan keamanan hayati.
- Tindakan karantina, pengawasan dan pengendalian yang efektif dan efisien.

e. Nilai Tambah dan Daya Saing Industri

- Meningkatnya daya saing komoditas pertanian
- Meningkatnya Pertumbuhan ekspor pertanian

Pelaksanaan kebijakan, strategi, dan program pembangunan pertanian, serta pencapaian target sasaran utama membutuhkan dukungan kerangka pendanaan yang memadai, pengelolaan dana yang profesional, alokasi dan distribusi pendanaan secara tepat sasaran, serta penggunaan dana yang efektif dan efisien.

Pendanaan pembangunan pertanian berasal dari pemerintah pusat (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/APBN) dan dari sumber lain yaitu:

- a. Pemerintah daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota;
- b. Swasta, BUMN, dan BUMD;
- c. Investasi dalam negeri (PMDN) dan investasi asing (PMA);
- d. Lembaga keuangan dan perbankan (skema kredit dan kredit komersial); dan
- e. Swadaya masyarakat.



Sumber dana pembangunan pertanian tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah pusat karena besarnya nilai dana yang dibutuhkan. Untuk mencapai target yang telah ditetapkan, investasi yang dibutuhkan untuk pembangunan pertanian sangatlah besar. Sebagian besar merupakan pembiayaan bersumber dari swasta, perbankan dan masyarakat.

### **3.2. Tujuan dan Sasaran Rancangan Akhir Renja Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, Tahun 2022.**

Tujuan dan Sasaran adalah tahapan untuk Perumusan Sasaran Strategis yang menunjukkan Tingkat Prioritas Tertinggi dan Utama dalam Perencanaan Pembangunan berupa Rencana Kerja Program/Kegiatan baik jangka menengah daerah maupun program/kegiatan setiap tahun berjalan terutama pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur Kinerja Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh selama 1 (satu) tahun, yakni yang ingin dicapai/dihasilkan secara nyata berupa peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan serta meningkatkan peran penyuluhan pertanian dalam rangka meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani serta membuka peluang dan kesempatan kerja bagi masyarakat.

Untuk mendukung Program Prioritas Pemerintah Aceh yang telah ditetapkan melalui SKPA Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, maka tujuan Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) dalam rangka Pembangunan Pertanian dan Perkebunan Aceh yang ingin dicapai pada tahun anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

- a. Lanjutan mewujudkan *Good Government* dilingkungan Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, efektivitas *pengawasan* kinerja untuk pelayanan publik.



- b. Meningkatkan sistem distribusi sarana produksi (Saprodi) dan hasil panen agar memenuhi kaidah 6 (enam) Tepat, tepat waktu, tepat mutu, tepat jumlah, tepat sasaran, tepat tempat dan tepat guna. Sehingga upaya penambahan luas areal penanaman, meningkatnya produksi dan produktivitas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan dapat dicapai.
- c. Meningkatkan mutu hasil pertanian tanaman pangan (Penetapan Kawasan dan IP300), hortikultura dan perkebunan serta pengembangan pemasaran hasil produk pertanian unggulan daerah melalui penelitian, pelatihan, promosi di tingkat Daerah, Nasional dan Luar Negeri dalam rangka meningkatkan nilai tambah produk pertanian dan perkebunan guna peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.
- d. Meningkatkan penerapan prasarana dan sarana teknologi pertanian tepat guna dalam rangka peningkatan infrastruktur dan modernisasi pertanian perkebunan.
- e. Menumbuhkembangkan dan memantapkan sentra-sentra agribisnis sehingga membentuk kawasan komoditas spesifik lokasi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan berbasis korporasi.
- f. Peningkatan sistem peramalan, pengkajian, pengendalian dalam rangka penanggulangan organisme pengganggu tanaman pertanian dan perkebunan.
- g. Penguatan UPJA Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan membentuk brigade olah tanah, brigade tanam dan brigade panen serta pola kerja sama pengelolaan alsintan menuju modernisasi pertanian dan mewujudkan pola tanam serentak serta luas tambah tanam.
- h. Penguatan Kelembagaan Petani dan Penyuluhan melalui Peningkatan Pengembangan Penyuluhan Pertanian, Peningkatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan dan Peningkatan Akreditasi Penyuluh Pertanian Lapangan.



- i. Penguatan Peran dan Fungsi UPTD Lingkup Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh.
- j. Penguatan Institusi Perbenihan Balai Benih Induk, Balai Benih Utama, Kebun-kebun induk perkebunan di sentra dan kawasan komoditas pertanian dan perkebunan serta menumbuh-kembangkan desa-desa mandiri benih dalam rangka kemandirian benih tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.
- k. Membuka peluang kerjasama integrasi lintas sektor guna menghadirkan korporasi lintas sektor dalam rangka meningkatkan nilai tambah, pendapatan dan kemandirian petani.

### 3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2022 serta Perkiraan Maju Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 berpedoman pada Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh 2017 – 2022. Program Spesifik SKPA Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh berdasarkan **Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah**, serta penyesuaian sebagaimana yang tercantum dalam RPJMA dan RENSTRA Perbaikan Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh terdiri dari :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH;
2. PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN;
3. PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN;
4. PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN;
5. PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN;
6. PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN;



Adapun Hasil Analisis Berdasarkan Rancangan Akhir, Pagu Indikatif Tahun 2022 adalah sebesar **Rp. 354.690.600.000.-** Terdiri dari Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar Rp. 144.240.600.000.- dan Program Spesifik sebesar Rp. 209.450.000.000.- Sedangkan pagu indikatif perkiraan maju untuk Tahun 2023 sebesar **Rp. 372.612.200.000,-**. Rincian Rencana Program/Kegiatan Tahun 2022 dan perkiraan maju tahun 2023, sebagai berikut :

### **URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN (3).**

#### **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN (3.27).**

##### **I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (3.27.01).**

###### **a. Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.**

Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah merupakan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, pada tahun anggaran 2022 diperkirakan pagu indikatif dibutuhkan sebesar Rp. 6.500.000.000.- terdiri dari dua sub kegiatan antara lain Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD dengan keluaran sub kegiatan : Tersedianya Dokumen Dokumen Perencanaan (Revisi dan Perubahan) Tahun 2022, Data Statistik dan Informasi Pertanian dengan target capaian kinerja sebanyak 20 Dokumen, Sedangkan perkiraan pagu indikatif maju pada Tahun 2023 sebesar Rp. 6.930.000.000.-

###### *Indikator Capaian Keluaran Sub Kegiatan :*

- Tersedianya Dokumen Perencanaan (Revisi dan Perubahan), Data Statistik dan Informasi Pertanian.
- Tersedianya Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan.





b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah merupakan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan perkiraan pagu indikatif sebesar Rp. 89.000.000.000.- pada Tahun 2022. Sedangkan pagu indikatif perkiraan maju pada Tahun 2023 sebesar Rp. 93.450.000.000.-

Indikator Capaian Keluaran Sub Kegiatan :

- Tersedianya gaji dan hak- hak pegawai.

c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.

Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah merupakan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan perkiraan pagu indikatif sebesar Rp. 1.265.600.000 pada Tahun 2022. Sedangkan pagu indikatif perkiraan maju pada Tahun 2023 sebesar Rp. 565.950.000.-

Indikator Capaian Keluaran Sub Kegiatan :

- Terciptanya keseragaman identitas dan disiplin pegawai Dinas.
- Termotivasinya sumber daya aparatur yang profesional dalam pelayanan publik.
- Tersedianya Bahan sosialisasi menurut peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

d. Administrasi Umum Perangkat Daerah.

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah merupakan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan perkiraan pagu indikatif sebesar Rp. 3.150.000.000 pada Tahun 2022. Sedangkan pagu indikatif perkiraan maju pada Tahun 2023 sebesar Rp. 3.307.500.000.



Indikator Capaian Keluaran Sub Kegiatan :

- Tersedianya kebutuhan instalasi listrik dan alat penerangan gedung kantor.
- Terlaksananya Penyediaan kebutuhan ATK, Makan dan minum.
- Terlaksananya Penyediaan Barang Cetakan.
- Terlaksananya Pengadaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.
- Terlaksananya sinkronisasi, Koordinasi dan Konsultasi dalam pencapaian kinerja yang tepat waktu dan tepat sasaran.

e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah merupakan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan perkiraan pagu indikatif sebesar Rp. 15.300.000.000 pada Tahun 2022. Sedangkan pagu indikatif perkiraan maju pada Tahun 2023 sebesar Rp. 16.065.000.000.

Indikator Capaian Keluaran Sub Kegiatan :

- Terlaksananya Pengadaan gedung kantor.
- Terlaksananya Pengadaan perlengkapan gedung kantor.

f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah merupakan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan perkiraan pagu indikatif sebesar Rp. 20.725.000.000 pada Tahun 2022. Sedangkan pagu indikatif perkiraan maju pada Tahun 2023 sebesar Rp. 21.761.250.000.



Indikator Capaian Keluaran Sub Kegiatan :

- Jumlah surat yang terkirim.
- Jumlah rekening jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik selama satu tahun.
- Terlaksananya Peningkatan Perlengkapan dan Peralatan Kantor.
- Jumlah jasa tenaga administrasi/ Teknis Kegiatan terlaksananya peningkatan kualitas pelayanan.

g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah merupakan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan perkiraan pagu indikatif sebesar Rp. 8.300.000.000 pada Tahun 2022. Sedangkan pagu indikatif perkiraan maju pada Tahun 2023 sebesar Rp. 8.715.200.000.

Indikator Capaian Keluaran Sub Kegiatan :

- Terlaksananya Peningkatan kinerja aparatur dalam pelayanan publik.
- Terlaksananya rehabilitasi gedung perkantoran yang merupakan aset daerah

h. Peningkatan Pelayanan BLUD.

Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD merupakan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan perkiraan pagu indikatif sebesar Rp. 1.000.000.000 pada Tahun 2022. Sedangkan pagu indikatif perkiraan maju pada Tahun 2023 sebesar Rp. 2.000.000.000.



Indikator Capaian Keluaran Sub Kegiatan :

Terlaksananya Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 1 Kegiatan.

**II. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian (3.27.02).**

a. Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian

Kegiatan Pengawasan Peredaran Saran Pertanian merupakan kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan daerah dengan perkiraan pagu indikatif sebesar Rp. 5.500.000.000 pada Tahun 2022. Sedangkan pagu indikatif perkiraan maju pada Tahun 2023 sebesar Rp. 5.775.000.000.

Indikator Capaian Keluaran Sub Kegiatan :

- Terlaksananya Pengawasan Peredaran pupuk bersubsidi di 22 kabupaten/Kota.
- Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian di 22 kabupaten/Kota..

b. Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman

Kegiatan Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman merupakan kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan perkiraan pagu indikatif sebesar Rp. 132.500.000.000 pada Tahun 2022. Sedangkan pagu indikatif perkiraan maju pada Tahun 2023 sebesar Rp. 139.125.000.000.

Indikator Capaian Keluaran Sub Kegiatan :

- Terlaksananya Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih Unggul Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan di 22 kabupaten/Kota.
- Terlaksananya Pembinaan dan pengembangan usaha perbenihan/perbibitan Tanaman Hortikultura sebanyak 11 Komoditi.



- Terlaksananya Pengembangan Kawasan Padi, Jagung dan Ubi Kayu seluas 60.000 Ha.
  - Terlaksananya Penyediaan Bibit Tanaman Perkebunan sebanyak 5 Komoditi.
- c. Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi.

Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi merupakan kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan daerah dengan perkiraan pagu indikatif sebesar Rp. 3.000.000.000 pada Tahun 2022. Sedangkan pagu indikatif perkiraan maju pada Tahun 2023 sebesar Rp. 3.150.000.000.

*Indikator Capaian Keluaran Sub Kegiatan :*

- Terlaksananya Penyediaan Benih Bumber Tanaman Pangan, Tanaman Hortikultura dan Tanaman Perkebunan, seluas 200 Ha.

**III. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian (3.27.03).**

a. Penataan Prasarana Pertanian

Kegiatan Penataan Prasarana Pertanian merupakan kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan daerah dengan perkiraan pagu indikatif sebesar Rp. 33.000.000.000 pada Tahun 2022. Sedangkan pagu indikatif perkiraan maju pada Tahun 2023 sebesar Rp. 34.650.000.000.

*Indikator Capaian Keluaran Sub Kegiatan :*

- Terlaksananya Peningkatan Prasarana Pertanian sebanyak 10 Kegiatan.



- Terlaksananya Pertemuan Koordinasi dan Evaluasi Kegiatan Pengelolaan Lahan dan Air, sebanyak 10 Kegiatan.
- Terlaksananya Pertemuan Sosialisasi dan Pemantapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, seluas 1.250 Ha.

#### **IV. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian (3.27.05).**

##### **a. Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi**

Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi merupakan kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan daerah dengan perkiraan pagu indikatif sebesar Rp. 5.000.000.000 pada Tahun 2022. Sedangkan pagu indikatif perkiraan maju pada Tahun 2023 sebesar Rp. 5.250.000.000.

*Indikator Capaian Keluaran Sub Kegiatan :*

- Terlaksananya Pengendalian OPT Tanaman Pertanian dan Perkebunan, sebanyak 20 Kegiatan.

#### **V. Program Perizinan Usaha Pertanian (3.27.06).**

##### **a. Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota**

Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota merupakan kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan daerah dengan perkiraan pagu indikatif sebesar Rp. 5.000.000.000 pada Tahun 2022. Sedangkan pagu indikatif perkiraan maju pada Tahun 2023 sebesar Rp. 5.250.000.000



Indikator Capaian Keluaran Sub Kegiatan :

- Terlaksananya pembinaan dan pengawasan terhadap usaha perkebunan besar, sebanyak 20 Kegiatan.

**VI. Program Penyuluhan Pertanian (3.27.07).**

a. Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian

Kegiatan Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian merupakan kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan daerah dengan perkiraan pagu indikatif sebesar Rp. 1.700.000.000 pada Tahun 2022. Sedangkan pagu indikatif perkiraan maju pada Tahun 2023 sebesar Rp. 1.785.000.000.

Indikator Capaian Keluaran Sub Kegiatan :

- Terlaksananya Peningkatan Kualitas Sistem Penyuluh Pertanian/ Perkebunan, sebanyak 7 Kegiatan.

b. Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian

Kegiatan Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian merupakan kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan daerah dengan perkiraan pagu indikatif sebesar Rp. 8.500.000.000 pada Tahun 2022. Sedangkan pagu indikatif perkiraan maju pada Tahun 2023 sebesar Rp. 8.925.000.000.

Indikator Capaian Keluaran Sub Kegiatan :

- Terlaksananya Inovasi Pemanfaatan dan Pengolahan Hasil Tanaman Pangan di 5 Kabupaten.
- Terlaksananya Pelatihan petani dan pelaku agribisnis pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan sebanyak 50 Kelas.



- c. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan
- Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan merupakan kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan daerah dengan perkiraan pagu indikatif sebesar Rp. 17.750.000.000 pada Tahun 2022. Sedangkan pagu indikatif perkiraan maju pada Tahun 2023 sebesar Rp. 18.637.500.000.

Indikator Capaian Keluaran Sub Kegiatan :

- Terlaksananya Peningkatan Kelembagaan dan SDM Petani sebanyak 7 Kegiatan.
- Terlaksananya IPDMIP (Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Programe) Bidang Pertanian, Peningkatan Kelembagaan dan SDM Petan sebanyak 7 Kegiatan.
- Terlaksananya Peningkatan Kualitas Sistem Penyuluh Pertanian/Perkebunan Terselenggaranya Pendidikan Kejuruan Pertanian sebanyak 3 Sekolah Kedinasan (SMK-PP) Aceh.

Dari berbagai Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan SKPA Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh baik Rencana Awal RKPA Tahun 2022 maupun Rencana Maju RKPA Tahun 2023 untuk lebih jelasnya dapat dilihat secara lengkap dan rinci pada *Tabel T-C.33 berikut :*



# RENCANA KERJA (RENJA)

## DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN ACEH

### TAHUN 2022



Tabel T-C. 33  
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN TAHUN 2022  
DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2023

No.	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Ouput Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target capaian kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
<b>3</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>													
<b>3.27.</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN</b>								<b>354.690.600.000</b>				<b>372.612.200.000</b>	
<b>01.</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>								<b>145.240.600.000</b>				<b>152.689.700.000</b>	
<b>1.01.</b>	<b>Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>								<b>6.500.000.000</b>				<b>6.825.000.000</b>	
1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase Laporan Capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu (Lakip, Renja, Laporan Keuangan, Laporan Realisasi, DLL di bagi dengan Total Laporan Wajib).	Tersedianya Dokumen Dokumen Perencanaan (Revisi dan Perubahan) Tahun 2022, Data Statistik dan Informasi Pertanian.	Terselenggaranya Administrasi Pelayanan Keuangan.	Banda Aceh	100%	18 Dokumen	23 Kab./Kota	5.000.000.000	APBA	Tersedianya Dokumen Dokumen Perencanaan (Revisi dan Perubahan) Tahun 2022, Data Statistik dan Informasi Pertanian.	100%	5.250.000.000	
1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Laporan Capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu (Lakip, Renja, Laporan Keuangan, Laporan Realisasi, DLL di bagi dengan Total Laporan Wajib).	Tersedianya Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan	Terselenggaranya Administrasi Pelayanan Keuangan.	Banda Aceh	100%	2 Dokumen	23 Kab./Kota	1.500.000.000	APBA	Tersedianya Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan	100%	1.575.000.000	
<b>1.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>								<b>89.000.000.000</b>				<b>93.450.000.000</b>	
1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan.	Tersedianya gaji dan hak-hak pegawai	Terbayarnya gaji dan hak-hak pegawai.	Banda Aceh	100%	12 Bln	12 Bln	89.000.000.000	APBA	Tersedianya gaji dan hak-hak pegawai	100%	93.450.000.000	
<b>1.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>								<b>1.265.600.000</b>				<b>565.950.000</b>	
1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Aparatur yang memenuhi Kompetensi.	Terciptanya keseragaman identitas dan disiplin pegawai Dinas	Meningkatnya Disiplin Aparatur	Banda Aceh/ Nasional	100%	1038 Stel	1038 Stel	726.600.000	APBA		-	-	
1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Aparatur yang memenuhi Kompetensi.	Termotivasinya sumber daya aparatur yang profesional dalam pelayanan publik	Meningkatnya SDM Aparatur yang profesional	Banda Aceh/ Nasional	100%	10 Dokumen	20 Org.	239.000.000	APBA	Termotivasinya sumber daya aparatur yang profesional dalam pelayanan publik	100%	250.950.000	
1.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Aparatur yang memenuhi Kompetensi.	Tersedianya Bahan sosialisasi menurut peraturan dan perundang-undangan yang berlaku	Meningkatkan Pemahaman Aparatur terkait Peraturan Perundang-undangan	Banda Aceh	100%	4 Dokumen	12 Bln	300.000.000	APBA	Tersedianya Bahan sosialisasi menurut peraturan dan perundang-undangan yang berlaku	100%	315.000.000	
<b>1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>								<b>3.150.000.000</b>				<b>3.307.500.000</b>	
1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tingkat Kelengkapan Saran dan Prasarana Aparatur.	Tersedianya kebutuhan instalasi listrik dan alat penerangan gedung kantor	Terpenuhinya kebutuhan instalasi listrik dan alat penerangan gedung kantor	Banda Aceh	100%	12 Bln	12 Bln	300.000.000	APBA	Tersedianya kebutuhan instalasi listrik dan alat penerangan gedung kantor	100%	315.000.000	
1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tingkat Kelengkapan Saran dan Prasarana Aparatur.	Terlaksananya Penyediaan kebutuhan ATK, Makan dan minum	Tersedianya kebutuhan ATK, Makan dan minum	Banda Aceh	100%	12 Bln	12 Bln	1.000.000.000	APBA	Terlaksananya Penyediaan kebutuhan ATK, Makan dan minum	100%	1.050.000.000	
1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tingkat Kelengkapan Saran dan Prasarana Aparatur.	Terlaksananya Penyediaan Barang Cetak	Tersedianya Barang Cetak	Banda Aceh	100%	12 Bln	12 Bln	450.000.000	APBA	Terlaksananya Penyediaan Barang Cetak	100%	472.500.000	
1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tingkat Kelengkapan Saran dan Prasarana Aparatur.	Terlaksananya Pengadaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Banda Aceh	100%	12 Bln	12 Bln	200.000.000	APBA	Terlaksananya Pengadaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	100%	210.000.000	
1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tingkat Kelengkapan Saran dan Prasarana Aparatur.	Terlaksananya sinkronisasi, Koordinasi dan Konsultasi dalam pencapaian kinerja yang tepat waktu dan tepat sasaran.	Terselenggaranya Sinkronisasi, Koordinasi dan Konsultasi dalam pencapaian kinerja yang tepat waktu dan tepat sasaran.	Banda Aceh	100%	12 Bln	12 Bln	1.200.000.000	APBA	Terlaksananya sinkronisasi, Koordinasi dan Konsultasi dalam pencapaian kinerja yang tepat waktu dan tepat sasaran.	100%	1.260.000.000	
<b>1.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>								<b>15.300.000.000</b>				<b>16.065.000.000</b>	
1.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tingkat Kelengkapan Saran dan Prasarana Aparatur	Terlaksananya Pengadaan gedung kantor	Tersedianya gedung kantor	Banda Aceh	100%	10 Pkt	10 Pkt	12.300.000.000	APBA	Terlaksananya Pengadaan gedung kantor	100%	12.915.000.000	
1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tingkat Kelengkapan Saran dan Prasarana Aparatur	Terlaksananya Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	Banda Aceh	100%	12 Bln	12 Bln	3.000.000.000	APBA	Terlaksananya Pengadaan perlengkapan gedung kantor	100%	3.150.000.000	

# RENCANA KERJA (RENJA)

## DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN ACEH

### TAHUN 2022



No.	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Ouput Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target capaian kinerja	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
1.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>							20.725.000.000				21.761.250.000	
1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	Jumlah surat yang terkirim	Lancarnya proses surat menyurat.	Banda Aceh	100%	12 Bln	12 Bln	75.000.000	APBA	Jumlah surat yang terkirim	100%	78.750.000
1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	Jumlah rekening jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik selama satu tahun	Lancarnya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Banda Aceh	100%	12 Bln	12 Bln	3.100.000.000	APBA	Jumlah rekening jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik selama satu tahun	100%	3.255.000.000
1.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	Tersedianya Peningkatan Perlengkapan dan Peralatan Kantor	Tersedianya Perlengkapan dan Peralatan Kantor	Banda Aceh	100%	12 Bln	12 Bln	550.000.000	APBA	Tersedianya Peningkatan Perlengkapan dan Peralatan Kantor	100%	577.500.000
1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	Jumlah jasa tenaga administrasi/ Teknis Kegiatan terlaksananya peningkatan kualitas pelayanan	Meningkatnya kualitas pelayanan	Banda Aceh	100%	12 Bln	12 Bln	17.000.000.000	APBA	Jumlah jasa tenaga administrasi/ Teknis Kegiatan terlaksananya peningkatan kualitas pelayanan	100%	17.850.000.000
1.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>							8.300.000.000				8.715.000.000	
1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tingkat Kelengkapan Saran dan Prasarana Aparatur	Terlaksananya Peningkatan kinerja aparatur dalam pelayanan publik	Meningkatnya kinerja aparatur dalam pelayanan publik	Banda Aceh	100%	12 Bln	12 Bln	4.300.000.000	APBA	Terlaksananya Peningkatan kinerja aparatur dalam pelayanan publik	100%	4.515.000.000
1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tingkat Kelengkapan Saran dan Prasarana Aparatur	Terlaksananya rehabilitasi gedung perkantoran yang merupakan aset daerah	Terpeliharanya gedung perkantoran peningkatan pelayanan	Banda Aceh	100%	12 Bln	23 Pkt	4.000.000.000	APBA	Terlaksananya rehabilitasi gedung perkantoran yang merupakan aset daerah	100%	4.200.000.000
1.10	<b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>							1.000.000.000				2.000.000.000	
1.10 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Tingkat Kelengkapan Saran dan Prasarana Aparatur	Terlaksananya Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Meningkatnya Pendapatan/PAD	Banda Aceh	100%	12 Bln	12 Bln	1.000.000.000	APBA	Terlaksananya Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	100%	2.000.000.000
02	<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN</b>							138.500.000.000				145.425.000.000	
1.01	<b>Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian</b>							5.500.000.000				5.775.000.000	
1.01 01	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Meningkatnya indeks yang diterima petani (t) Tanaman Pangan / Hortikultura / Perkebunan	Terlaksananya Pengawasan Peredaran pupuk bersubsidi	Lancarnya Proses Peredaran pupuk bersubsidi	Kab./Kota	100%	22 Kab./Kota	23 Kab/Kota	2.000.000.000	APBA	Terlaksananya Pengawasan Peredaran pupuk bersubsidi	100%	2.100.000.000
1.01 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Meningkatnya indeks yang diterima petani (t) Tanaman Pangan / Hortikultura / Perkebunan	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Terkoordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Kab./Kota	100%	22 Kab./Kota	23 Kab/Kota	3.500.000.000	APBA	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	100%	3.675.000.000
1.02	<b>Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman</b>							130.000.000.000				136.500.000.000	
1.02 01	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	Meningkatnya indeks yang diterima petani (t) Tanaman Pangan / Hortikultura / Perkebunan	Terlaksananya Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih Unggul Tanaman Pangan dan Hortikultura	Tersedianya benih yang bermutu.	Kab./Kota	100%	22 Kab./Kota	23 Kab/Kota	3.500.000.000	APBA	Terlaksananya Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih Unggul Tanaman Pangan dan Hortikultura	100%	3.675.000.000
1.02 02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	Meningkatnya indeks yang diterima petani (t) Tanaman Pangan / Hortikultura / Perkebunan	Terlaksananya Pembinaan dan pengembangan usaha perbenihan/perbibitan Tanaman Hortikultura	Tersedianya benih yang bermutu.	Kab./Kota	100%	11 Komoditi	11 Komoditi	30.000.000.000	APBA	Terlaksananya Pembinaan dan pengembangan usaha perbenihan/perbibitan Tanaman Hortikultura	100%	31.500.000.000
1.02 03	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan	Meningkatnya indeks yang diterima petani (t) Tanaman Pangan / Hortikultura / Perkebunan	Terlaksananya Pengembangan kawasan Padi, Jagung, Ubi Kayu.	Tersedianya benih yang bermutu.	Kab./Kota	100%	6000 Ha	6000 Ha	51.500.000.000	APBA	Terlaksananya Pengembangan kawasan Padi, Jagung, Ubi Kayu.	100%	54.075.000.000
1.02 04	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	Meningkatnya indeks yang diterima petani (t) Tanaman Pangan / Hortikultura / Perkebunan	Terlaksananya Penyediaan Bibit Tanaman Perkebunan	Tersedianya benih yang bermutu.	Kab./Kota	100%	5 Komoditi	5 Komoditi	45.000.000.000	APBA	Terlaksananya Penyediaan Bibit Tanaman Perkebunan	100%	47.250.000.000
1.03	<b>Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi</b>							3.000.000.000				3.150.000.000	
1.03 04	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	Meningkatnya indeks yang diterima petani (t) Tanaman Pangan / Hortikultura / Perkebunan	Terlaksananya Penyediaan Benih Tanaman Pangan, Tanaman Hortikultura dan Tanaman Perkebunan	Tersedianya Benih Bumer Tanaman Pangan, Tanaman Hortikultura dan Tanaman Perkebunan	Kab./Kota	100%	200 Ha	200 Ha	3.000.000.000	APBA	Terlaksananya Penyediaan Benih Bumer Tanaman Pangan, Tanaman Hortikultura dan Tanaman Perkebunan	100%	3.150.000.000

# RENCANA KERJA (RENJA)

## DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN ACEH

### TAHUN 2022



No.	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Ouput Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target capaian kinerja	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
<b>03</b>	<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN</b>								<b>33.000.000.000</b>			<b>34.650.000.000</b>	
1.01	<b>Penataan Prasarana Pertanian</b>								<b>33.000.000.000</b>			<b>34.650.000.000</b>	
1.01	03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	Meningkatnya produksi pertanian per komoditas	Terlaksananya Peningkatan Prasarana Pertanian	Tersedianya Prasarana Pertanian	Kab./Kota	100%	10 Keg	10 Keg	5.000.000.000	APBA	Terlaksananya Peningkatan Prasarana Pertanian	100%	5.250.000.000
1.01	04 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	Meningkatnya produksi pertanian per komoditas	Terlaksananya Pengelolaan Sumber Sumber Air Pertemuan Koordinasi dan Evaluasi Kegiatan Pengelolaan Lahan dan Air	Terkoordinasi dan Evaluasinya Kegiatan Pengelolaan Lahan dan Air	Kab./Kota	100%	10 Keg	10 Keg	8.000.000.000	APBA	Terlaksananya Pengelolaan Sumber Sumber Air Pertemuan Koordinasi dan Evaluasi Kegiatan Pengelolaan Lahan dan Air	100%	8.400.000.000
1.01	09 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Meningkatnya produksi pertanian per komoditas	Terlaksananya Pertemuan Sosialisasi dan Pemantapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Optimalisasi Lahan dan Perluasan Areal Pertanian	tersosialisasinya dan Pemantapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	Kab./Kota	100%	1250 Ha	1250 Ha	20.000.000.000	APBA	Terlaksananya Pertemuan Sosialisasi dan Pemantapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Optimalisasi Lahan dan Perluasan Areal Pertanian	100%	21.000.000.000
<b>05</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN</b>								<b>5.000.000.000</b>			<b>5.250.000.000</b>	
01	<b>Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi</b>								<b>5.000.000.000</b>			<b>5.250.000.000</b>	
01.	01 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Meningkatnya produksi pertanian per komoditas	Terlaksananya Pengendalian OPT Tanaman Pertanian dan Perkebunan	Terkendalanya OPT Tanaman Pertanian dan Perkebunan	Kab./Kota	100%	20 Keg	20 Keg	5.000.000.000	APBA	Terlaksananya Pengendalian OPT Tanaman Pertanian dan Perkebunan	100%	5.250.000.000
<b>06</b>	<b>PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN</b>								<b>5.000.000.000</b>			<b>5.250.000.000</b>	
1.01	<b>Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>								<b>5.000.000.000</b>			<b>5.250.000.000</b>	
1.01	03 Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Terbina dan terawasinya usaha perkebunan besar	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan terhadap usaha perkebunan besar	Terbina dan terawasinya usaha perkebunan besar	Kab./Kota	100%	20 Keg	20 Keg	5.000.000.000	APBA	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan terhadap usaha perkebunan besar	100%	5.250.000.000
<b>07</b>	<b>PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN</b>								<b>27.950.000.000</b>			<b>29.347.500.000</b>	
1.01	<b>Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian</b>								<b>1.700.000.000</b>			<b>1.785.000.000</b>	
1.01	02 Kerja Sama Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian Swadaya dan Swasta	Tersedianya tenaga penyuluh yang inovatif dan informatif	Terlaksananya Peningkatan Kualitas Sistem Penyuluh Pertanian/Perkebunan	Meningkatnya Kualitas Sistem Penyuluh Pertanian/Perkebunan	Kab./Kota	100%	7 Keg	7 Keg	1.700.000.000	APBA	Terlaksananya Peningkatan Kualitas Sistem Penyuluh Pertanian/ Perkebunan	100%	1.785.000.000
1.02	<b>Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian</b>								<b>8.500.000.000</b>			<b>8.925.000.000</b>	
1.02	01 Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Tersedianya hasil penyuluhan penerapan praktek pertanian	Terlaksananya Inovasi Pemanfaatan dan Pengolahan Hasil Tanaman Pangan	tersedianya Inovasi Pemanfaatan dan Pengolahan Hasil Tanaman Pangan	Kab./Kota	100%	5 Kab	5 Kab	6.500.000.000	APBA	Terlaksananya Inovasi Pemanfaatan dan Pengolahan Hasil Tanaman Pangan	100%	6.825.000.000
1.02	02 Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Tersedianya hasil penyuluhan penerapan praktek pertanian	Terlaksananya Pelatihan petani dan pelaku agribisnis pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	Meningkatnya keahlian petani dan pelaku agribisnis pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	Kab./Kota	100%	50 Kelas	50 Kelas	2.000.000.000	APBA	Terlaksananya Pelatihan petani dan pelaku agribisnis pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	100%	2.100.000.000
1.03	<b>Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan</b>								<b>17.750.000.000</b>			<b>18.637.500.000</b>	
1.03	01 Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koorporasi	Meningkatnya Kelembagaan dan SDM Petani	Terlaksananya Peningkatan Kelembagaan dan SDM Petani	Meningkatnya Kualitas Kelembagaan dan SDM Petani	Kab./Kota	100%	7 Keg	7 Keg	4.000.000.000	APBA	Terlaksananya Peningkatan Kelembagaan dan SDM Petani	100%	4.200.000.000
1.03	02 Pendampingan Manajemen Koorporasi Petani	Meningkatnya Kelembagaan dan SDM Petani	Terlaksananya IPDMIP (Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Programme) Bidang Pertanian.	Tersedianya IPDMIP (Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Programme) Bidang Pertanian.	Kab./Kota	100%	7 Keg	7 Keg	5.000.000.000	APBA	Terlaksananya IPDMIP (Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Programme) Bidang	100%	5.250.000.000
1.03	04 Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani	Meningkatnya Kelembagaan dan SDM Petani	Terlaksananya Peningkatan Kualitas Sistem Penyuluh Pertanian/Perkebunan Terselenggaranya Pendidikan Kejuruan Pertanian	Meningkatnya Kualitas Sistem Penyuluh Pertanian/Perkebunan Terselenggaranya Pendidikan Kejuruan Pertanian	Kab./Kota	100%	3 SMK PP	3 SMK PP	8.750.000.000	APBA	Terlaksananya Peningkatan Kualitas Sistem Penyuluh Pertanian/Perkebunan Terselenggaranya Pendidikan Kejuruan Pertanian	100%	9.187.500.000



## BAB IV

### RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Rencana Kerja dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh Tahun 2022 Disusun Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh Tahun 2018-2022 dan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 di Alokasikan Pagu Devitnitif sebesar Rp. 180.235.000.000, sebagai berikut :

Prog.	Keg.	Sub Kegiatan	Tahun 2022
		<b>Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh.</b>	<b>180.235.000.000</b>
<b>01.</b>		<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.</b>	<b>122.433.311.932</b>
	01.	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.500.000.000
	04.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3.000.000.000
	06.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	500.000.000
	02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	82.068.549.342
	01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	82.068.549.342
	05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	290.000.000
	09.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	190.000.000
	10.	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100.000.000
	06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	290.000.000
	01.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	150.000.000
	04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	840.000.000
	05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	220.000.000
	06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	145.000.000
	09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	800.000.000
	07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	8.200.393.053
	09.	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	7.700.393.053
	10.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	500.000.000
	08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	19.790.000.000
	01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	40.000.000
	02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2.450.000.000
	03.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	600.000.000
	04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	16.700.000.000
	09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.429.369.537
	02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	4.029.369.537
	09.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.400.000.000

**RENCANA KERJA (RENJA)**  
**DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN ACEH**  
**TAHUN 2022**



Prog.	Keg.	Sub Kegiatan	Tahun 2022
	10.	Peningkatan Pelayanan BLUD	1.000.000.000
	01.	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.000.000.000
<b>02.</b>		<b>Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian.</b>	<b>36.239.526.219</b>
	01.	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	3.830.250.000
	01.	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	1.137.000.000
	02.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	2.693.250.000
	02.	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	31.793.595.406
	01.	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	702.000.000
	02.	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	6.007.262.890
	03.	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan	8.551.832.516
	04.	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	16.532.500.000
	03.	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi	615.680.813
	04.	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	615.680.813
<b>03.</b>		<b>Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian.</b>	<b>5.400.000.000</b>
	01.	Penataan Prasarana Pertanian	5.400.000.000
	03.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani.	100.000.000
	04.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani.	150.000.000
	09.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya.	150.000.000
	10.	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	5.000.000.000
<b>05.</b>		<b>Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian.</b>	<b>450.000.000</b>
	01.	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	450.000.000
	01.	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	450.000.000
<b>06.</b>		<b>Program Perizinan Usaha Pertanian</b>	<b>5.702.193.754</b>
	01.	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota.	5.702.193.754
	03.	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	5.702.193.754

**RENCANA KERJA (RENJA)**  
**DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN ACEH**  
**TAHUN 2022**



Prog.	Keg.	Sub Kegiatan	Tahun 2022
<b>07.</b>		<b>Program Penyuluhan Pertanian.</b>	<b>10.009.968.095</b>
	01.	Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	385.000.000
	02.	Kerja Sama Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian Swadaya dan Swasta	385.000.000
	02.	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	320.000.000
	02.	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	320.000.000
	03.	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	9.304.968.095
	01.	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi	304.501.095
	02.	Pendampingan Manajemen Korporasi Petani	2.440.467.000
	04.	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani	6.560.000.000



## **BAB V**

### **PENUTUP**

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh Tahun 2022 ini Tujuan, Sasaran, Strategi serta Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Merupakan Rencana Awal RKPA dan Hasil Analisis Pagu Indikatif, kerangka pendanaan, indikator kinerja pembangunan serta kaidah pelaksanaannya. Hal ini diperlukan untuk merespon berbagai perubahan yang terjadi dan memiliki pengaruh terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang ingin dicapai.

Diharapkan Rencana Kerja (RENJA) Rencana Kerja ini akan menjadi Dokumen Perencanaan dan Acuan Kerja untuk Menyusun Rencana Kerja (RENJA) Renja dan Penetapan PPAS Tahun 2022 serta sebagai pedoman bagi seluruh Jajaran Bidang Teknis, UPTD dan Sekolah Kedinasan Pertanian Lingkungan Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh. Secara lebih spesifik, penjabaran mengenai Rencana Kerja (RENJA) Renja Tahun 2022 ini diharapkan juga dapat menjadi acuan dalam Penyusunan Rencana Akhir Renja dan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA-ABPA) Tahun 2022.

Sebanyak 7 Program dan (16) Kegiatan serta (37) Sub Kegiatan yang dijabarkan dalam Rencana Kerja (RENJA) Renja 2022 serta besaran Pagu Indikatif sebesar **Rp. 180.235.000.000**, sebagai acuan Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) renja dan Pelaksanaan Program/Kegiatan Tahun Anggaran 2022. Sehubungan dengan Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Susunan Perangkat Aceh dan dijabarkan melalui Peraturan Gubernur Aceh Nomor 126 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh. Melalui Renja ini dapat terlihat bahwa dari 6 (enam) Program direncanakan pagu indikatif pelaksanaan Program/Kegiatan ini memiliki berbagai perubahan yang terjadi dan mempengaruhi pembangunan bidang Pertanian Tanaman



Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Penyuluhan melalui Peningkatan Produksi dan Produktivitas Hasil Pertanian dan Perkebunan dalam rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat.

Dengan adanya Dokumen Rencana Kerja (RENJA) Renja ini, diharapkan pada Penyusunan Dokumen Rancangan Kerja serta Penetapan PPAS melalui Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan sasaran yang telah ditentukan dan memberikan kontribusi kepada pembangunan bidang Pertanian dan Perkebunan Aceh, apabila dipenuhinya target dan pendanaan yang sesuai dengan program/kegiatan yang termuat dalam Renja Tahun 2022 ini.

Banda Aceh, Juli 2021  
Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh

  
**Ir. CUT HUZAIMAH, MP**  
PEMBINA TK.I  
NIP. 19660217 199203 2 003